

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK  
MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA  
DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK**

***THE INFLUENCE OF HEADMAN LEADERSHIP  
TOWARDS PUBLIC PARTICIPATION TO REALIZING  
EFFECTIVENESS OF VILLAGE DEVELOPMENT  
PROGRAM IMPLEMENTATION  
IN PAMEUNGPEUK DISTRICT***

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti Ujian Sidang  
guna memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana  
Konsentrasi Ilmu Administrasi Bidang Kajian Administrasi Negara  
Universitas Garut

**Oleh:  
DASEP RAHMAT  
NPM. 24091116005**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS GARUT  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP  
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
DESA DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK**

***THE INFLUENCE OF LEADERSHIP HEADMAN TOWARDS  
PUBLIC PARTICIPATION TO REALIZING EFFECTIVENESS OF  
VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM IMPLEMENTATION IN  
PAMEUNGPEUK DISTRICT***

Oleh:  
**DASEP RAHMAT**  
**NPM. 24091116005**

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana ini Telah disetujui oleh Komisi Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini:

Garut, April 2018

Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad, M.Si**

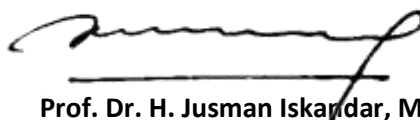
**Pemimbing II**



**Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si.**

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Garut,

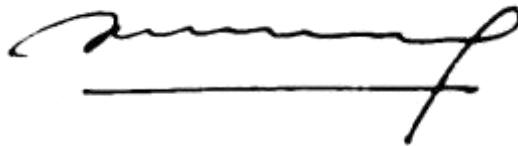


**Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS**

Garut, April 2018

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana Universitas Garut,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

**Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS.**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Saya yang berjudul "**Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk**", beserta isinya adalah karya Saya sendiri tanpa ada di dalamnya bagian yang merupakan jiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dikalangan masyarakat ilmiah.

Saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan Saya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya Saya ini atau dan pihak lain terhadap keaslian karya Saya ini.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Garut, April 2018

Peneliti

DASEP RAHMAT

NPM. 24091116005

## ABSTRAK

### **Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk**

Dasep Rahmat, NPM. 24091116005  
Program Pascasarjana Universitas Garut  
Tesis, 2018, 5 BAB, 186 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa di Kecamatan Pamengpeuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 orang ketua Rukun Tetangga yang tersebar di 8 Desa dalam wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi lapangan dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis statistik dengan model analisis jalur.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa kepemimpinan Kepala Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, walaupun pengaruhnya relatif lemah. Hasil analisis model pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa bentuk tindakan Kepala Desa yang dilakukan sebagai realisasi kepemimpinannya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program-program pembangunan desa. Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Adapun faktor lain yang mempengaruhi selain kepemimpinan Kepala Desa untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa diduga bahwa masyarakat sudah tidak ada kepedulian untuk mengetahui siapa yang menjadi pemimpin atau tokoh masyarakat di wilayah mereka karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh lembaga Rukun Tetangga.

Saran yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah Kepala Desa harus senantiasa melakukan introspeksi diri dan mau mendengarkan keluhan bawahannya agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif yang dapat dirasakan bawahannya, diperlukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat baik dalam rapat koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa untuk mengembalikan kepercayaan kepada pimpinan atau tokoh masyarakat. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa harus senantiasa ditingkatkan baik dari segi program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat maupun bentuk pelayanan yang diberikan.

**Kata kunci:** Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Program

## **ABSTRACT**

### ***The Influence of Headman Leadership towards Public Participation to Realizing The Effectiveness of Village Development Program Implementation in Pameungpeuk District.***

Dasep Rahmat, NPM. 24091116005  
Post Graduate University of Garut  
Thesis, 2018, 5 Chapters, 186 pages

*This research aims to analyze the influence of the Headman leadership towards the public participation to realize the effectiveness of the implementation of the village development program in Pamengpeuk District.*

*The research method is explanation method with evaluation technique. The sample population as many as 76 heads of Rukun Tetangga which is spread in 8 villages within Pameungpeuk District. Data collection techniques used are documentation studies and field studies. While the data analysis techniques is statistical analysis with path analysis model.*

*Based on the hypothesis testing results, it is known that the headman leadership has a significant influence on public participation, although the influence is relatively weak. The result of the model analysis of the influence of the headman leadership on public participation shows that the form of the headman actions performed as the realization of his leadership can influence the public participation in making decisions and implementing the village development programs. Headman leadership is significantly influences the effectiveness of village development programs. As for other factors that influence other than the headman leadership to realize the effectiveness of the village development program implementation, it is suspected that the public has no concern to know who is the leader or community figure in their area due to mistrust of the programs implemented by the Neighborhood Association.*

*The recommended suggestion from this research that the headman must always introspect himself and want to listen to the complaints of his subordinates so that no discriminatory treatment can be felt by his subordinates, socialization is needed by involving the community both in coordination meetings, planning and implementation of village development programs to restore trust to leaders or community figure. The effectiveness of village development programs implementation must always be improved both in terms of programs made for the benefit of the community and the form of services provided*

**Keyword:** *Headman Leaderships, Public Participation, Program Effectiity*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang berjudul **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk”**.

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam Sidang Tesis guna memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana bidang kajian Administrasi Negara Universitas Garut. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

*Pertama*, Rektor Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut.

*Kedua*, Direktur Pascasarjana Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan menempuh perkuliahan di Pascasarjan Universitas Garut dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

***Ketiga***, Bapak Prof. Dr .H. Endang Soetari Ad, M.Si, selaku Komisi Pembimbing I yang telah mencurahkan waktu dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan Usulan Peneltiian ini.

***Keempat***, Ibu Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si., selaku Komisi Pembimbing II yang mengarahkan, memotivasi dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

***Kelima***, seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti proses perkuliahan yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan kepada penulis.

***Keenam***, seluruh Civitas Akademika Universitas Garut yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis sampai dengan selesai.

***Ketujuh***, para Kepala Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini.

***Kedelapan***, seluruh rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Garut Angkatan XXI atas bantuannya selama penyusunan Usulan Penelitian ini

Akhirul kata, semoga Alloh SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dan semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, April 2018

Peneliti,



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	27
2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Organisasi Birokrasi dan Pembangunan Masyarakat.....	29
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu .....	35

2.3	Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Administrasi Negara	44
2.4	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian .....	47
2.4.1	Variabel Kepemimpinan Kepala Desa .....	47
2.4.2	Variabel Partisipasi Masyarakat .....	58
2.4.3	Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa .....	64
2.5	Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian .....	69
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>72</b>
3.1	Metode Yang Digunakan .....	72
3.2	Variabel-Variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian .....	72
3.2.1	Variabel-Variabel Penelitian .....	72
3.2.2	Paradigma Penelitian .....	73
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	74
3.4	Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian .....	77
3.5	Alat Ukur Penelitian, Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur .....	77
3.5.1	Alat Ukur Penelitian .....	77
3.5.2	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur .....	81
3.6	Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel .....	93
3.6.1	Populasi Penelitian .....	93
3.6.2	Teknik Penarikan Sampel .....	95
3.7	Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Proses Pengumpulan Data .....	97
3.7.1	Jenis dan Sumber Data .....	97
3.7.2	Teknik Pengumpulan Data .....	98

3.7.3	Proses Pengumpulan Data .....	99
3.8	Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian	101
3.8.1	Teknik Pengolahan Data .....	101
3.8.2	Proses Transformasi Data .....	102
3.8.3	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian .....	103
3.9	Lokasi, Jadwal Waktu dan Tahap-Tahap Penelitian .....	105
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>107</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	107
4.1.1	Permasalahan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Garut	108
4.1.2	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	110
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut .....	111
4.2	Karakteristik Responden .....	117
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	117
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	118
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	119
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian .....	120
4.3.1	Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa .....	122
4.3.1.1	Dimensi Mendengarkan .....	125
4.3.1.2	Dimensi Empati .....	127
4.3.1.3	Dimensi Menyembuhkan .....	128
4.3.1.4	Dimensi Kesadaran .....	130

4.3.1.5 Dimensi Persuasif .....	131
4.3.1.6 Dimensi Konseptualisasi .....	133
4.3.1.7 Dimensi Kemampuan Meramalkan .....	134
4.3.1.8 Dimensi Kemampuan Melayani .....	136
4.3.1.9 Dimensi Komitmen Terhadap Pekerjaan .....	137
4.3.1.10 Dimensi Membangun Masyarakat .....	139
4.3.2 Variabel Partisipasi Masyarakat .....	140
4.3.2.1 Dimensi Persyaratan Partisipasi .....	143
4.3.2.2 Dimensi Tipe-Tipe Partisipasi .....	144
4.3.2.3 Dimensi Tipe-Tipe Partisipan .....	146
4.3.2.4 Dimensi Hubungan Partisipan .....	148
4.3.2.5 Dimensi Tahap-Tahap Perkembangan Organisasi dalam Kaitannya dengan Partisipasi .....	150
4.3.3 Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa .....	152
4.3.3.1 Dimensi Keterbukaan Kebijakan Dasar .....	154
4.3.3.2 Dimensi Strategi .....	156
4.3.3.3 Dimensi Pengorganisasian .....	157
4.3.3.4 Dimensi Pelaksanaan Sesuai Rencana .....	159
4.3.3.5 Dimensi Target Hasil .....	160
4.4 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian .....	162
4.4.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z) .....	163
4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) .....	168

4.4.3	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Partisipasi Masyarakat (Y) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z) .....	170
4.4.4	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z) .....	172
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	176
5.1	Kesimpulan .....	176
5.2	Saran-Saran .....	179
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	183
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) per Desa di Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017 .....	6
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan Ketua Rukun Tetangga di Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017 .....	7
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian dngan Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	77
Tabel 3.2	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi .....	83
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Variabel X (Kepemimpinan Kepala Desa) .....	84
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Variabel Y (Partisipasi Masyarakat) .....	85
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Variabel Z (Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa) .....	87
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Kepemimpinan Kepala Desa) .....	90
Tabel 3.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Partisipasi Masyarakat) .....	91
Tabel 3.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z (Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa) .....	93
Tabel 3.9	Populasi Penelitian .....	94
Tabel 3.10	Sebaran Sampel Penelitian .....	95
Tabel 3.11	Jadwal Waktu Penelitian dan Langkah-Langkah Penelitan...	106
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	118
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.	119
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	120
Tabel 4.4	Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase .....	121

Tabel 4.5	Kriteria Penilaian Kepemimpinan Kepala Desa .....	122
Tabel 4.6	Kriteria Penilaian Dimensi Mendengarkan .....	125
Tabel 4.7	Kriteria Penilaian Dimensi Empati .....	127
Tabel 4.8	Kriteria Penilaian Dimensi Menyembuhkan .....	128
Tabel 4.9	Kriteria Penilaian Dimensi Kesadaran .....	130
Tabel 4.10	Kriteria Penilaian Dimensi Persuasif .....	132
Tabel 4.11	Kriteria Penilaian Dimensi Konseptualisasi .....	133
Tabel 4.12	Kriteria Penilaian Dimensi Kemampuan Meramalkan .....	135
Tabel 4.13	Kriteria Penilaian Dimensi Kemampuan Melayani .....	136
Tabel 4.14	Kriteria Penilaian Dimensi Komitmen Terhadap Pekerjaan..	137
Tabel 4.15	Kriteria Penilaian Dimensi Membangun Masyarakat .....	139
Tabel 4.16	Kriteria Penilaian Variabel Partisipasi Masyarakat .....	140
Tabel 4.17	Kriteria Penilaian Dimensi Persyaratan Partisipasi .....	143
Tabel 4.18	Kriteria Penilaian Dimensi Tipe-Tipe Partisipasi .....	145
Tabel 4.19	Kriteria Penilaian Dimensi Tipe-Tipe Partisipan.....	147
Tabel 4.20	Kriteria Penilaian Dimensi Hubungan Partisipan.....	148
Tabel 4.21	Kriteria Penilaian Dimensi Tahap-Tahap Perkembangan Organisasi dalam Kaitannya dengan Partisipasi .....	150
Tabel 4.22	Kriteria Penilaian Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa .....	152
Tabel 4.23	Kriteria Penilaian Dimensi Keterbukaan Kebijakan Dasar ...	154
Tabel 4.24	Kriteria Penilaian Dimensi Strategi .....	156
Tabel 4.25	Kriteria Penilaian Dimensi Pengorganisasian .....	157
Tabel 4.26	Kriteria Penilaian Dimensi Pelaksanaan Sesuai Rencana.....	159
Tabel 4.27	Kriteria Penilaian Dimensi Target Hasil.....	161

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Hierarki Landasan Hukum Kebijakan Desa dan Dana Desa	4
Gambar 1.2	Kerangka Teori .....	22
Gambar 1.3	Model Penelitian .....	25
Gambar 3.1	Paradigma Penelitian .....	66
Gambar 4.1	Diagram Jalur .....	161



## **LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	Alat Ukur Penelitian/Kuisisioner
LAMPIRAN III	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur Penelitian
LAMPIRAN IV	Pengolahan dan Analisis Data
LAMPIRAN V	Surat Keputusan Komisi Pembimbing Tesis
LAMPIRAN VI	Surat Permohonan Ijin Penelitian
LAMPIRAN VII	Surat Rekomendasi Penelitian
LAMPIRAN VIII	Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN IX	Jurnal Publik

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh.

Pemerintahan lokal dalam kerangka otonomi daerah bermakna memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi desa yang memiliki ciri khas politik pedesaan merupakan otonomi asli yang bersumber dari masyarakat hukum adat yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka berdasarkan ketentuan ini desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-ussul dan adat istiadat setempat.

Dengan lahirnya otonomi daerah tidak hanya berdampak pada pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota, tetapi juga sangat berdampak pada pemerintah Desa. Desa mampu dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedesaan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten maupun Kota.

Desa menjadi garda terdepan dalam proses pembangunan, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat desa akan menjadi sasaran atau objek dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah bertindak sebagai fasilitator dan motivator.

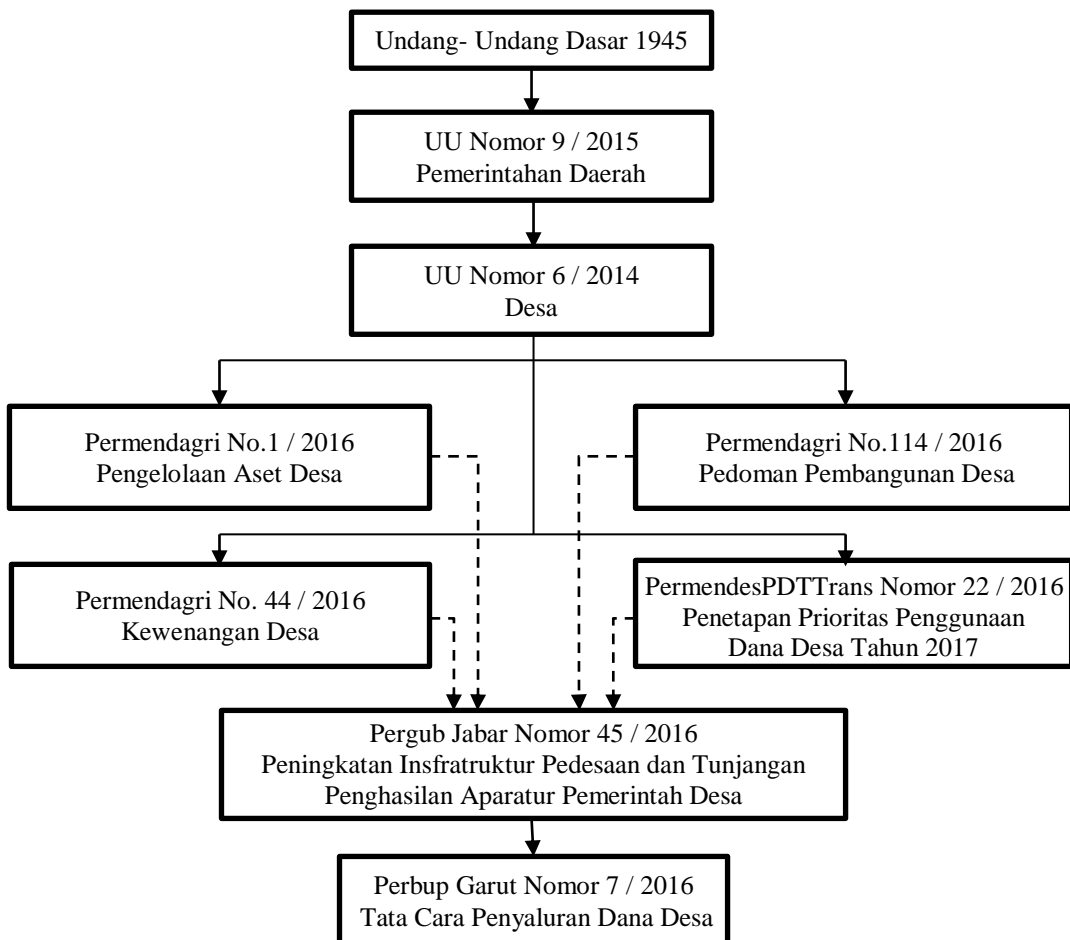
Permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa dijumpai pada keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terutama dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan dana desa yang belum optimal, dan banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan otonomi desa. Menurut Lynn (Iskandar, 2017a:240) bahwa manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari proses dan dari hasilnya, sebagai proses harus lebih mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana yang telah ditentukan, sedangkan sebagai hasil akan menggambarkan kesungguhan hati, penggunaan secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik melalui proses yang ada.

Berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan pembangunan desa terutama dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tidak semua desa mempunyai sumber daya manusia yang mengerti tentang penyusunan anggaran apalagi jika terdapat proyek pembangunan desa yang melibatkan berbagai pihak. Walaupun Pemerintah Daerah melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai penyusunan dan pengelolaan anggaran, dikarenakan latar belakang pengelola keuangan desa yang beragam maka memerlukan waktu untuk dapat memahaminya.

Sedangkan dalam hal pengelolaan dana desa yang belum optimal lebih banyak berhubungan dengan alokasi dana dengan program yang akan dilaksanakan. Bagaimanapun juga di setiap desa terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) dan dibawahnya terdapat Rukun Tetangga (RT) yang mempunyai keinginan pelaksanaan program pembangunan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hal ini tentunya memerlukan perencanaan yang matang sehingga masing-masing mendapatkan alokasi dana dan program yang merata dan memenuhi keinginan mereka.

Sehubungan dengan hal diatas maka pembagian alokasi dana dan program harus mengikuti aturan yang berlaku. Banyaknya peraturan menyebabkan Kepala Desa dan aparatnya harus berhati-hati karena bisa dimungkinkan karena ketidaksesuaian dengan aturan yang ada maka dapat terjerat kasus hukum. Hal ini sudah banyak terjadi berbagai wilayah khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, dimana Kepala Desa dijadikan tersangka berkaitan dengan adanya penyimpangan penggunaan dana desa dan harus berurusan dengan hukum.

Tentunya hal ini menjadi polemik dikalangan Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Akibatnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa menjadi terganggu dan tidak optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.



**Gambar 1.1**  
**Hierarki Landasan Hukum Kebijakan Desa dan Dana Desa**

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat desa yang belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kesediaan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa, rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, dan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari beberapa pihak.

Selain partisipasi masyarakat, hal yang dapat menjadi rendahnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa yaitu kepemimpinan Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa merupakan suatu kemampuan pemerintahan (*government*) untuk melakukan komunikasi, interaksi dan pengaruh terhadap masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik (*public service*) dan layanan sipil (*civil service*). Namun faktanya masih banyak komunikasi kepala desa dengan masyarakatnya belum efektif, kondisi ini dapat menyebabkan informasi tentang program pembangunan desa tidak merata dan bisa terjadi miskomunikasi.

Selain itu masih kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dipercaya masyarakat dapat menjadi konflik kepentingan. Disatu sisi program pembangunan desa merupakan penjabaran program pembangunan nasional namun disisi lain masyarakat menginginkan program lain. Disinilah dituntut peran Kepala Desa untuk menjadi jembatan agar program yang sudah direncanakan dapat diterima oleh semua pihak sehingga pembanguana desa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa kemampuan kepala Desa dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh aparat desa dan pelaksana di lapangan yaitu para Ketua Rukun Tetangga (RT), namun faktanya

pelaksanaan program-program pembnagunan desa belum optimal. Hal iini diduga keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

Berkaitan dengan kuantitas para pelaksana di lapangan dalam hal ini para Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)  
Per Desa di Kecamatan Pemeungpeuk Tahun 2017

No	Desa	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Bojong	13	26
2	Bojong Kidul	10	20
3	Jatimulya	13	49
4	Mancagahar	9	41
5	Mandalakasih	15	48
6	Paas	13	39
7	Pameungpeuk	15	49
8	Sirnabakti	14	35
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>307</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Pameungpeuk, 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata tiap desa memiliki jumlah RW yang relatif banyak jika dibandingkan dengan dengan jumlah RT-nya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak seimbangan antara jumlah RW dengan jumlah RT-nya sehingga terdapat RT di beberapa desa memiliki lingkup tugasnya relatif luas yang dapat menyebabkan informasi mengenai program pembangunan desa tidak sampai ke masyarakatnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan kesejahteraan desanya. Artinya Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan desa memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan

memberikan pelayanan kepada masyarakat seyogyanya menghasilkan dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Desa dalam merealisasikan program kerjanya dibantu oleh para Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sebagai pelaksana di lapangan tentunya harus memiliki latar belakang pendidikan yang memadai sehubungan dengan program pembangunan desa. Namun kenyataannya masih banyak yang berlatar belakang pendidikan relatif rendah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Tingkat Pendidikan Ketua Rukun Tetangga  
di Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Rukun Tetangga	Prosentase
1	SD atau belum tamat SD	-	-
2	Tamat SD / Sederajat	-	-
3	SLTP / Sederajat	64	20,8%
4	SLTA / Sederajat	191	62,2%
5	Akademi (DI, DII atau DIII)	36	11,7%
6	Sarjana (S1)	16	5,3%
	<b>Jumlah</b>	<b>307</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Garut, 2018

Jika dilihat pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa mayoritas tingkat pendidikan pada ketua RT yaitu SLTA/ sederajat dan paling sedikit adalah sarjana sebanyak 16 orang, artinya dalam proses pemahaman program-program pembangunan desa mengalami kendala dalam hal perbedaan pola pikir dan persepsi terhadap program pembangunan tersebut.



Dengan demikian fenomena permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa belum efektif, keadaan ini ditunjukkan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terutama pengelolaan keuangan, pengelolaan dana desa yang belum optimal, dan banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan otonomi dan keuangan desa.
2. Kepemimpinan Kepala Desa yang belum optimal, kondisi ini ditunjukkan oleh komunikasi dengan masyarakat belum efektif dan kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dipercaya warga masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat yang relatif rendah, kondisi ini ditunjukkan oleh rendahnya kesediaan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan desa, rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, dan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka yang menjadi pernyataan masalah penelitian ini adalah bahwa efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa belum efektif diduga disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kepemimpinan Kepala Desa.

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu; ” Adakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa?”.

Selanjutnya pertanyaan penelitian tersebut dapat dirumuskan ke dalam sub-sub pertanyaan terhadap masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat?
2. Adakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa?
3. Adakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini untuk mengkaji fenomena masalah pembangunan desa, khususnya tentang kepemimpinan Kepala Desa, partisipasi masyarakat, dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi dapat digunakan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dari aspek teoritis maupun praktis khususnya implementasi di lingkungan objek yang diteliti, dan penelitian ini dapat bernilai guna dengan mengungkapkan beberapa informasi untuk peningkatan efektivitas program pembangunan desa serta pihak-pihak yang berwenang dengan kebijakan pembangunan desa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang kajian ilmu administrasi negara dan kebijakan publik dan dapat dijadikan bahan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi kepentingan pengembangan ilmu administrasi negara.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai rekomendasi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut dan saran bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa pada masa yang akan datang.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian**

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara, sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan juga tergantung dari sejauh mana

partisipasi masyarakat setempat beserta aparaturnya dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga desanya, sehingga bisa mandiri selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparaturnya juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pembangunan di daerah pedesaan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah di tingkat desa atau kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan desa.

Permasalahan di atas berkaitan dengan administrasi negara dan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada era globalisasi munculnya permasalahan yang berkaitan dengan administrasi negara berawal dari permasalahan atau persoalan publik/masyarakat yang menuntut perubahan sistem administrasi negara menjadi lebih baik dan mengutamakan kepentingan publik. Maksudnya agar administrasi negara yang dijalankan oleh pemerintah sebagai suatu sistem manajemen yang melayani kepentingan dan permasalahan publik dan memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Laiden (dalam Iskandar, 2017b: 8) menyatakan bahwa pada hakekatnya Administrasi Negara

sebagai suatu disiplin ilmu yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat.

Dalam program pembangunan perdesaan, pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat serta kemampuan kelembagaan juga sangat terbatas. Untuk itu, upaya pendekatan kepada masyarakat melalui pendekatan budaya dalam proses pembangunan merupakan sebuah keharusan guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Administrasi negara (*public administration*) yang dikenal di Indonesia adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintah. Bentuk kerjasania semua pihak dalam rangka mencapai tujuan negara adalah merupakan kajian dari administrasi negara. Sebagaimana dikemukakan Waldo (dalam Iskandar 2017d: 18) yang memberikan definisi administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara dan White (dalam Iskandar, 2017d: 176) mengemukakan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan publik.

Dimock dan Dimock (dalam Iskandar, 2017d:17) menyatakan bahwa Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikataan Bangsa-Bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan,

Administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu, maka ilmu administrasi negara tidak saja mempersoalkan apa yang akan dilakukan pemerintah tetapi bagaimana juga melakukannya.

Perkembangan lebih lanjut dari suatu administrasi negara sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintah (*the governments bureaucracy structure*) yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep dalam ilmu politik. Siagian (dalam Iskandar, 2017d:143) memberikan pengertian administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dimock dan Dimock (dalam Iskandar, 2017d:176) mengemukakan bahwa sebagai suatu ilmu, administrasi negara mengamati setiap aspek usaha-usaha pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik.

Keterkaitan antara administrasi negara dengan kebijakan publik sangat terlihat pada perkembangan paradigma administrasi negara. Thoha (dalam Iskandar, 2017d:177) menjelaskan bahwa paradigma administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah ilmu kebijakan, politik, ekonomi, proses pembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya, serta cara pengukuran dari hasil-hasil kebijakan yang telah dibuat.

Aspek -aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai suatu mata rantai yang menghubungkan antara *focus* administrasi negara dengan *locus-nya*. Maka *focus* administrasi negara adalah teori organisasi, praktek dalam analisis kebijakan publik, dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang telah maju. Adapun

*locus* normatif dari administrasi negara berada pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat.

Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sarna pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu bidang kajian yang menjadi perhatian utama dari administrasi negara adalah kebijakan publik, kebijakan publik ini selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu di masyarakat juga untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah.

Adapun variabel-variabel penelitian yang akan dikaji dan terkait dengan penelitian ini yaitu Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas Pelaksanan Program Pembangunan Desa.

### **1. Kepemimpinan Kepala Desa**

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi, karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan kebutuhan manusia secara kodrat, karena kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan yang melekat pada diri manusia, disatu sisi memerlukan pemimpin dan disisi lain pada saat tertentu dituntut untuk mampu memimpin. Masalah kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia. Dan ada anggapan bahwa maju atau mundurnya suatu organisasi, maka sangat bergantung kepada bagaimana pemimpinnya berperilaku.

Menurut Terry mendefinisikan kepemimpinan yaitu “*Leadership is activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives*” (Kepemimpinan adalah keseluruhan kegiatan/aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain untuk mencapai tujuan bersama). Selanjutnya menurut Dubin mengemukakan bahwa “*Leadership is the exercises of authority and the making of decisions*” (Kepemimpinan adalah aktivitas pemegang kewenangan dan pengambil keputusan). Sedangkan Stogdill memberikan pengertian sebagai berikut; “*Leaderships is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement*” (Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam upaya perumusan dan pencapaian tujuan) (dalam Sedarmayanti, 2010:249).

Definisi tentang kepemimpinan menurut Rivai (2009:2) yaitu:

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi.

Greenleaf (dalam Iskandar, 2017a:273) mengemukakan kepemimpinan berkaitan dengan pelayanan publik yaitu; kepemimpinan pelayanan menekankan kepada peningkatan pelayanan kepada orang lain, yang merupakan sebuah pendekatan holistik dalam pekerjaan dan rasa kemasyarakatan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi tingkah laku orang-orang supaya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Atau kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok



orang terorganisasi supaya mau bekerjasama dengan pimpinan dalam suatu situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan hubungan pengaruh dari pemimpin terhadap para pengikutnya dengan memberikan misi, visi, perhatian, rasa senang, kasih sayang, kepercayaan, obsesi, dan konsistensi pada para anggota organisasi serta menggunakan simbol-simbol, perhatian, memberikan pelatihan, serta menunjukkan contoh dan tindakan nyata serta memotivasi para pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela.

Greenleaf (dalam Iskandar, 2017a:274) mengidentifikasi sepuluh ciri khas kepemimpinan, sebagai berikut:

1. Mendengarkan, secara tradisional pemimpin dihargai karena keahlian komunikasi serta mendengarkan yang dipadukan dengan masa renungan yang teratur. Maka diperlukan komunikasi efektif dan interaksi sosial.
2. Empati, berusaha keras untuk memahami dan memberikan perhatian kepada orang lain.
3. Menyembuhkan, belajar menyembuhkan daya yang kuat untuk perubahan dan integrasi dengan indikator inspirator dan motivator.
4. Kesadaran, membuat komitmen untuk meningkatkan kesadaran dengan berlandaskan pada introspeksi diri, menjaga komitmen, dan berpikir rasional.
5. Persuasif, mengandalkan kemampuan membujuk bukannya wewenang karena kedudukan dalam membuat keputusan dalam organisasi, dengan indikator kemampuan membujuk dan membangun konsensus.
6. Konseptualisasi, kemampuan untuk melihat suatu masalah dari perspektif konseptualisasi yang berarti orang harus berpikir melampaui realita, dengan indikator kemampuan melihat masalah, kemampuan membuat program kerja, dan kemampuan memberikan solusi.
7. Kemampuan meramalkan, kemampuan untuk memperhitungkan sebelumnya atau meramalkan hasil yang layak mendapatkan perhatian cermat, dengan indikator kemampuan memprediksi hasil serta kemampuan mencermati situasi dan kondisi.
8. Kemampuan melayani, memiliki makna memegang sesuatu dengan kepercayaan orang lain, indikasinya mengayomi dan memberikan bimbingan.

9. Komitmen terhadap pekerjaan, bermakna bahwa seorang pemimpin akan berkomitmen terhadap suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan indikator profesionalisme, bertindak rasional, dan melakukan evaluasi.
10. Membangun masyarakat, pemimpin memperlihatkan kemampuannya yang tidak terbatas untuk kelompok spesifik yang berhubungan dengan masyarakat, indikatornya kemampuan interaksi dan fasilitator.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan dimensi kepemimpinan terdiri dari mendengarkan, empati, menyembuhkan, kesadaran, persuasif, konseptualisasi, kemampuan meramalkan, kemampuan melayani, komitmen terhadap pekerjaan, dan membangun masyarakat yang akan diukur pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti pengambilan atau keikutsertaan. Partisipasi adalah gejala demokrasi yang melibatkan keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan di dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya keaktifan masyarakat diharapkan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga kemasyarakatan yang mampu menampung setiap aspirasi yang ada.

Soelaiman dalam Iskandar (2017i:227) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, ataupun dalam kesatuan masyarakat, dalam bentuk proses pembuatan keputusan bersama, pelaksanaan program pelayanan sosial, dan pembangunan masyarakat, atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Iskandar (2007c:115) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam *public policy* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara, baik secara pribadi maupun berkelompok yang direncanakan untuk mempengaruhi pembuatan

keputusan pemerintah. Partisipasi dapat dilakukan baik terorganisasi maupun atau spontanitas, baik terus menerus maupun sporadis.

Pengertian partisipasi menurut Cary (Iskandar, 2017b:228) mengemukakan sebagai berikut; kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu masyarakat yang merupakan hasil konsensus sosial masyarakat ke arah perubahan sosial yang diharapkan.

Menurut Iskandar (2017d: 306) dimensi partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Proses Partisipasi.

Proses Partisipasi yang kuat dalam upaya kernasyarakatatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis dan merupakan pencegahan bagi sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.

2. Bentuk Partisipasi.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang atau harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Selain itu, Tjokroamidjojo (dalam Iskandar, 2017d:207) yang mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan

Kehadiran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menerima informasi, pembinaan atau pemahaman dari aparat pemerintah baik melalui

rapat maupun disampaikan secara pribadi sehubungan dengan perencanaan pembangunan.

## 2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan tujuan perencanaan sehingga pada tahap pelaksanaan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menentukan gagal tidaknya suatu program atau proyek. Pada tahap pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa jenis kegiatan yang memungkinkan masyarakat dapat ikut terlibat dan ambil bagian terutama menyangkut pelaksanaan pekerjaan karena pada bagian ini masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut terlibat memberikan dukungan, motivasi atau semangat, mengorbankan tenaga, waktu dan material.

## 3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan

Setiap hasil pembangunan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga masyarakat. Dengan adanya keterlibatan warga mulai dari perencanaan, diharapkan pembangunan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Dalam menjelaskan partisipasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Carry (Iskandar, 2017b:235) yang mengungkapkan terdapat lima dimensi dalam partisipasi, yaitu:

1. Persyaratan partisipasi (*prerequisites to participation*), aspek partisipasi yang paling mendasar adalah luasnya pengetahuan dan latar belakang seseorang untuk mengidentifikasi sebagai prioritas untuk melihat berbagai masalah, serta kemampuan untuk bertindak secara efektif.

2. Tipe-tipe partisipasi (*types of participation*), meliputi tingkatan terendah hingga tingkatan yang tertinggi, yaitu keanggotaan dalam organisasi, frekuensi dan intensitas kehadiran dalam pertemuan, frekuensi dan intensitas memberikan sumbangan, keanggotaan dalam kepanitiaan, serta posisi kepemimpinan.
3. Tipe-tipe partisipan (*types of participant*), yaitu orang-orang yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan, yaitu; pemimpin masyarakat lokal, kaum profesional yang berasal dari masyarakat, kaum profesional pendatang, dan pekerja sosial profesional.
4. Hubungan partisipan dengan masyarakat lokal (*relationship of participant to locality*), ditinjau dari sifat dan tempat berlangsungnya proses pembangunan masyarakat, yaitu masyarakat setempat, dan masyarakat pendatang.
5. Tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi (*stages of organization as they relate to participation*), sebagai wahana merupakan tahapan dalam organisasi masyarakat, meliputi tahap permulaan kegiatan, tahap pencapaian tugas, dan tahap kontinuitas dan diskontinuitas partisipasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan dimensi partisipasi masyarakat terdiri dari persyaratan partisipasi, tipe-tipe partisipasi, tipe-tipe partisipan, hubungan partisipan dengan masyarakat lokal, dan tahap-tahap perkembangan dalam kaitannya dengan partisipasi yang akan diukur pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat

### **3. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa**

Kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat desa dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, dimana efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep efektivitas telah banyak digunakan dalam berbagai konteks, sebagian menyatakan efektivitas dengan keuntungan atau produktivitas dan yang lainnya melihat sebagai kegiatan kerja atau karakter kerja (Steers dalam Iskandar, 2017d:218).

Lebih lanjut Steers (Iskandar, 2017d:87) mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Pengertian efektivitas menurut Emerson (dalam Iskandar, 2017c:329) yaitu: pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dikatakan efektivitas suatu kegiatan jika tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

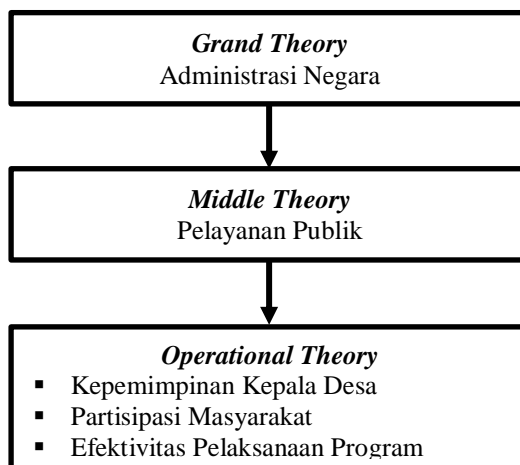
Dari beberapa definisi efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Kriteria suatu kegiatan atau program dapat mencapai efektivitas menurut Indrawidjaja (dalam Iskandar, 2017c:339) meliputi dimensi-dimensi berikut:

- 1) Kebijakan dasar, dimaksudkan agar para pihak yang berkepentingan dengan suatu kebijakan dapat mengetahuinya rencana dan tujuan dengan jelas, terbuka dan diketahui umum.
- 2) Strategi, bahwa suatu kebijakan yang dirumuskan harus memiliki kejelasan strategi dan ketepatan strategi kegiatan dalam melaksanakannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 3) Pengorganisasian, mengandung pengertian bahwa segala kegiatan dan aktivitas memerlukan pembagian tugas dan tanggungjawab atau hierarki wewenang sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- 4) Pelaksanaan sesuai rencana, mengandung makna bahwa setiap kegiatan atau program melibatkan sumber daya – sumber daya dengan perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pengawasan, dan evaluasi sehingga tujuan dan sasarannya dapat tercapai.
- 5) Target hasil, mempunyai pengertian bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki tujuan yang harus dicapai, ketepatan waktu, mendatangkan manfaat dan keuntungan, serta kepuasan masyarakat.

Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa merupakan *operational theory* yang diturunkan dari *middle theory* yaitu Pelayanan Publik, dan *middle theory* ini sangat terikat dengan *grand theory* yaitu Administrasi Negara dimana salah satu ruang lingkupnya mengenai Pelayanan Publik. Untuk lebih jelasnya

maka kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambat 1.2**  
**Kerangka Teori**

Sehubungan dengan variabel-variabel tersebut di atas, maka peneliti menduga adanya hubungan kausalitas, dimana kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan demikian dalam penelitian ini, kepemimpinan kepala desa sebagai variabel bebas, kemudian partisipasi masyarakat dijadikan sebagai variabel antara yang keduanya dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembanguna desa sebagai variabel terikat.

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Gredy Pangalila, Florence Daicy Lengkong, dan Femmy Tukusan (2011) dengan judul “*Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*



*di Desa Kembuan, Kembuan Satu dan Desa Tonsea di Kecamatan Tondano Utara*”, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dipersepsikan pada kategori sedang cenderung tinggi.
2. Efektivitas kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Gaya kepemimpinan transformasional/demokratis lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Temuan penting dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala desa sebagai pemimpin formal hendaknya menerapkan gaya transformasional/demokratis dengan mengedepankan keteladanan, kharismatik, dan motivasi inspirasional sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Kepemimpinan transformasional sebaiknya diterapkan bagi pemimpin dan aparat birokrasi pemerintahan khususnya di pedesaan.

**Kedua**, penelitian tuneka Setiawaty dkk (2015) dengan judul “*Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Penelitian di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)*”, dengan kesimpulan hasil penelitian yaitu:

1. Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa adalah signifikan terhadap partisipasi masyarakat, artinya semakin baik kepemimpinan Kepala Desa maka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Kepemimpinan Kepala Desa memiliki hubungan yang kuat dengan partisipasi masyarakat.

Temuan penting dari penelitian ini antara lain:

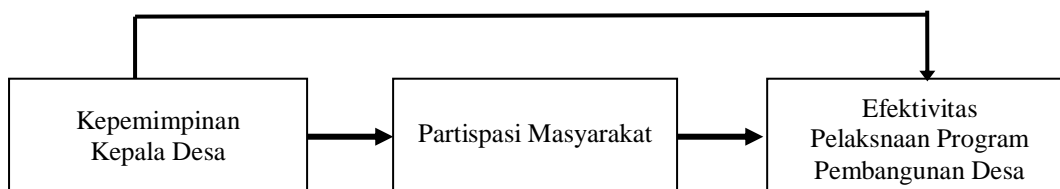
1. Kinerja Kepala Desa diharapkan terjadi peningkatan agar pembangunan dapat lebih maju dan menjadi lebih baik.
2. Diperlukan partisipasi masyarakat yang konsisten agar pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan cepat demi kepentingan bersama.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan proposisi yaitu jika kepemimpinan Kepala Desa dilakukan dengan optimal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dimana dampaknya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, anggapan dasar dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan program pembangunan desa akan efektif apabila partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan optimal.
2. Partisipasi masyarakat akan optimal apabila kepemimpinan Kepala Desa dilaksanakan dengan baik.
3. Kepemimpinan Kepala Desa yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan diantara variabel-variabel penelitian yang akan dikaji dalam pembahasan, maka kerangka pemikiran ini dirumuskan dalam suatu model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.3**  
**Model Penelitian**

Bertolak dari kerangka pemikiran yang tergambar pada model penelitian berkaitan dengan hubungan antar konsep, maka rumusan hipotesis utama yaitu:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Sedangkan rumusan sub-sub hipotesis sebagai berikut:

Sub Hipotesis 1:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat.

Sub Hipotesis 2:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Sub Hipotesis 3:

Ho : Tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan. Tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Menurut Iskandar (2017f: 318) menyatakan fungsi suatu teori mencakup:

- a. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan
- b. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian
- c. Menjelaskan dan menerangkan tentang gejala-gejala
- d. Memberikan ramalan terhadap gejala-gejala lain yang akan terjadi
- e. Mengisi lowongan-lowongan ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala yang tengah, telah atau akan terjadi.

Teori sebagai suatu unsur penelitian mempunyai peranan yang sangat besar, sebab dengan menggunakan unsur ilmu maka suatu penelitian dapat menjelaskan atau menerangkan tentang fenomena sosial maupun fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Menurut Iskandar (2017f:56), teori adalah proposisi-proposisi yang saling berhubungan, beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik. Jadi suatu teori memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Terdiri dari serangkaian proposisi
- b. Proposisi-proposisi tersebut saling berhubungan
- c. Beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik.

Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritis permasalahan yang menjadi pusat penelitian, menguraikan secara berurutan hubungan antara proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang melandasi penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa..

Pada penelitian ini variabel kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa merupakan teori operasional (*operational theory*) yang merupakan turunan dari teori tahap menengah (*middle range theory*) yaitu Pelayanan Publik. Dimana teori tahap menengah (*middle range theory*) berkaitan erat dengan teori utama (*grand theory*), yaitu Administrasi Negara dengan salah satu cakupannya yaitu Pelayanan Publik.

Pembahasan dalam bab tinjauan pustaka ini diuraikan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Tinjauan Teoritis tentang Organisasi Birokrasi dan Pembangunan Masyarakat
2. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu
3. Relevansi Masalah Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara
4. Tinjauan Teoritis tentang Variabel-Variabel Penelitian
  - a. Variabel Kepemimpinan Kepala Desa
  - b. Variabel Partisipasi Masyarakat
  - c. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

## 5. Hubungan Konseptual Antar Variabel Penelitian.

### **2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Sosiologi Desa**

Di negara-negara yang sudah maju, pembangunan cenderung sebagian besar dilakukan oleh kelompok infrastruktur politik, sedangkan di negara-negara berkembang, birokrasi pembangunan cenderung sebagian besar dilaksanakan oleh kelompok suprastruktur politik (Sudriamunawar, 2012: 23-24).

Infrastruktur politik dapat berbentuk perkumpulan buruh, perkumpulan petani, perkumpulan nelayan, perkumpulan pedagang, perkumpulan kaum wanita, perkumpulan kaum pemuda, perkumpulan kaum pelajar, perkumpulan ansan, perkumpulan keagamaan, perkumpulan kesukuan, perkumpulan karang taruna, perkumpulan pensiunan sipil, perkumpulan pensiunan militer, perkumpulan almamater, bahkan organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan, seperti para grup penekan (*pressure group*), kelompok kepentingan (*interest group*), yang kemudian pada gilirannya menjadi *elite power* dalam politik kenegaraan (Syafiie, 2013: 82).

Sedangkan supra struktur politik adalah lembaga-lembaga tinggi Pemerintahan, jadi ketika infrastruktur politik seperti partai politik memenangkan pemilihan umum, maka dia akan masuk ke dalam kelompok suprastruktur politik seperti legislatif ataupun mungkin eksekutif seperti Presiden dan lain-lain (Syafiie, 2013: 68).

Menurut Kartasmita (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:9) menyatakan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan diberi batasan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Batasan pembangunan seperti ini sangat luas, sehingga tidak secara tegas menentukan siapa birokrasi pembangunan Indonesia (Sudriamunawar, 2012:23),

Apabila diperhatikan dengan seksama, birokrasi pembangunan yang dilakukan oleh infrastruktur politik mempunyai kelebihan yang mendasar, yaitu bahwa program-program pembangunan sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat, hal ini membawa dampak hasil dari pembangunan itu benar-benar dapat terawat dengan sangat baik sehingga dapat lestari. Meskipun demikian mempunyai kekurangan yang sangat mendasar, yaitu dalam anggaran yang sangat terbatas. Begitu pula birokrasi pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok suprastruktur politik yang mempunyai kelebihan berupa anggaran yang sangat terjamin dan tersedianya tenaga ahli di berbagai bidang yang memadai. Meskipun demikian mempunyai kekurangan yang mendasar juga, yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para tenaga ahli yang sudah lebih disibukan lagi oleh tugas-tugas pembangunan.

Oleh karena itu secara konseptual maka birokrasi pembangunan yang ideal adalah adanya keseimbangan antara infrastruktur dan suprastruktur. Dengan cara ini kekurangan dan kelebihan dari kedua kelompok ini diharapkan akan saling mengisi, sehingga penyelenggaraan pembangunan akan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan (Sudriamunawar, 2012: 24).



Pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Salim, 2014: 261). Sedangkan Siagian (2014: 48) berpendapat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut seluruh komponen masyarakat. Idealnya, berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan pemerintah, semua warga negara turut menjadi “pemain” dan tidak ada lagi yang sekedar menjadi “penonton”.

Menurut Susanto (dalam Agusta, 2014:39) Desa adalah satuan wilayah di bawah Kecamatan. Pendapat lain mengatakan bahwa Desa adalah kestuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri (Arenawati, 2014: 61). Menurut Asy 'ari (dalam Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 3) karakteristik Desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: a). Aspek morfologi; b). Aspek jumlah penduduk; c). Aspek ekonorni; d). Aspek hukurn; dan e). Aspek sosial budaya.

Baik Pemerintah Indonesia maupun Organisasi Non Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan perdesaan adalah sangat penting. Beberapa macam pendekatan telah digunakan dalam pernbangunan perdesaan. Salah satunya adalah pendekatan dengan mernpercepat perbaikan dalam perekonomian perdesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan Daerah, khususnya Daerah-Daerah yang terbelakang. Perencanaan

pembangunan di Indonesia selama ini sering dikatakan menerapkan pendekatan *top down* sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Banyak proyek pembangunan yang berhasil secara fisik, tetapi dalam kenyataannya tidak berhasil secara masyarakat karena kurang mampu memberdayakan masyarakat setempat, sehingga pembangunan dikatakan tidak berhasil. Secara tertulis, perencanaan pembangunan daerah telah mengadopsi pendekatan *bottom up*, sedangkan dalam praktek perencanaan pembangunan nasional lebih merupakan kombinasi antara pendekatan *top down* dan *bottom up*. Permasalahannya adalah penerapan metode dan teknik pendekatan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya (Adisasmita, 2013: 13-14).

Menurut Irawan (dalam Agusta, 2014: 5-7) berkaitan dengan ketertinggalan perdesaan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 memandang kondisi umum perdesaan memprihatinkan. Salah satunya, yaitu dalam bidang sarana dan prasarana diketahui rendahnya kualitas permukiman, terutama ditunjukkan oleh rendahnya infrastruktur air minum dan persampahan. Visi pembangunan Nasional jangka panjang, yaitu menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Terdapat serangkaian misi untuk mencapai visi pembangunan Nasional tersebut. Salah satunya, yaitu misi nomor 2 (dua) yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan. Dalam misi ke-2 (dua) ditujukan untuk mewujudkan Bangsa yang berdaya saing. Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Bangsa yang berdaya saing, telah dirumuskan arah pembangunan perdesaan jangka panjang yang salah satunya, yaitu arah pembangunan Desa terhadap sarana dan prasarana. Maksudnya

ialah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan maju. Dalam hal ini terutama dibangunnya sistem transportasi perintis berbasis masyarakat.

Permasalahan pokok pembangunan perdesaan pada dewasa ini meliputi (Jamaludin, 2015: 235-236):

- a. Mempertahankan peningkatan produksi pangan (beras dan lainnya);
- b. Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pengembangan industry pedesaan;
- c. Mendorong ekspor dan substitusi impor;
- d. Melestarikan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup;
- e. Memasarkan hasil-hasil produksi daerah pedesaan;
- f. Memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan;
- g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SOM;
- h. Meningkatkan keswadayaan masyarakat;
- i. Menguatkan kelembagaan pedesaan (ekonomi dan sosial);
- j. Mengurangi tingkat kesenjangan antargolongan masyarakat dan antartata ruang dalam lingkup daerah pedesaan; serta
- k. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sosiologi menurut Roucek dan Warren (dalam Sumaryadi, 2013: 14) adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Pengertian kelompok adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi, bertatap muka, dimana masing-masing menyadari keanggotaannya, menyadari keanggotaan anggota lain dan masing-masing memperoleh kepuasan dari partisipasinya di dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Jadi inti dari kelompok adalah adanya interaksi pada sekumpulan orang (Iskandar, 2017c: 4). Adapun menurut Soemardjan dan Soelaeman (dalam Utsman, 2013: 35) sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk pembahasan-pembahasan sosial. Sedangkan pendapat lain menurut Ishomuddin (dalam Utsman, 2013: 36-37) mengatakan bahwa sosiologi dapat dibagi dibagi menjadi 4 (empat) elemen penting, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkah laku yang dikaji adalah dalam karakter sosial (bukan individu).

Tingkah laku sosial berarti tingkah laku yang ditunjukkan untuk orang lain, mempunyai konsekuensi bagi orang lain (ada hubungan timbal balik).

2. Tingkah laku sosial yang dipelajari adalah sosiologi tersebut adalah berstruktur. Struktur disini berarti pola atau regulasi tertentu. Dalam konteks ini, sosiologi bukanlah semata-mata hanya penjelasan deskriptif, tetapi berusaha memahami kaitan antara elemen-elemen tingkah laku sosial.
3. Penjelasan sosiologi bersifat analitis. Ini berarti bahwa dalam menjelaskan tingkah laku sosial berdasarkan prinsip-prinsip metodologi penelitian tertentu, bukan berdasarkan konsensus-konsensus yang hanya berlaku khusus.
4. Penjelasan sosiologi adalah sistematis, artinya dalam memahami tingkah laku sosial sosiologi menempatkan dirinya sebagai suatu kedisiplinan yang mengikuti aturan-aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa sosiologi salah satunya, yaitu mempelajari struktur sosial. Menurut Gibson (dalam Silalahi, 2013: 15) struktur artinya pola hubungan antara posisi. Pada umumnya struktur sosial di pedesaan adalah struktur sosial yang bersifat sederhana karena mata pencahariannya yang mayoritas sama atau seragam, aktivitas pedesaannya (*localine activities*) yang hanya terbatas pada persoalan cara mempertahankan hidup dan mencapai kebutuhan subsisternya, dan mereka tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar dalam hal kebutuhan subsistemnya (Jamaludin, 2015: 54).

Desa seperti diketahui dikelola oleh sebuah Pemerintahan sehingga bisa dikatakan bahwa sosiologi-nya identik kaitannya dengan sosiologi Pemerintahan.

Menurut Ndraha (dalam Sumaryadi, 2013: 25) sosiologi Pemerintahan bertitik awal dari interaksi antara Pemerintah dan yang diperintah (*the governed*) dalam upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, baik di bidang pelayanan publik maupun pelayanan sipil. Maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi Pemerintah merupakan kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil dilihat dari sudut proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.

Sebelumnya telah dituliskan di atas bahwa sosiologi mempelajari juga proses sosial. Untuk melihat proses sosial yang ada di perdesaan, harus melihat kategori terjadinya proses sosial tersebut. Proses yang pertama adalah asosiatif yang terdiri dari kerja sama, akomodasi dan asimilasi, sementara proses yang kedua adalah disosiatif yang terdiri dari persaingan, kontraversi dan konflik. (Jamaludin, 2015:64).

## **2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai pembanding dan pelengkap bagi kesempurnaan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Aries Djaenuri (2015), mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia dengan judul “Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun”.

- a. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena fenomena masalah yang muncul, yaitu bahwa di Kecamatan Tambun tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan pada masing-masing desa tidak sama, hal ini diduga artinya kurang terlibatnya masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan sehingga dukungan yang diberikan oleh masyarakat tidak maksimal.
- b. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survey, serta menggunakan pendekatan analisis statistik yaitu model regresi sederhana. Variabel penelitian yang dianalisis adalah Kepemimpinan Kepala Desa (variabel bebas) dengan 2 (dua) sub variabel yaitu Motivasi dan Pengarahan, dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (variabel terikat) dengan 4 (empat) sub variabel partisipasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pemanfaatan hasil pembangunan. Penelitian ini mengkaji pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
- c. Hasil penelitian menunjukkan gambaran sebagai berikut:
  - 1) Terdapat hubungan positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
  - 2) Terdapat pengaruh positif kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- d. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, artinya apabila kepemimpinan Kepala Desa dilaksanakan

dengan baik dan optimal maka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

e. Saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa harus lebih berperan untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembangunan di desanya dengan memperhatikan benar kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat, dalam pembuatan rencana Pembangunan Desa.
- 2) Hendaknya memberi tauladan yang baik, sejauh mungkin memberi bantuan dan memberikan penghargaan secara formal ke pada anggota masyarakat yang berprestasi.
- 3) Kepala Desa hendaknya lebih intensif memberikan penerangan tentang manfaat proyek pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pemuka Masyarakat dan meningkatkan kegiatan LKMD dan aktivitas pengurusnya.
- 4) Kepala Desa hendaknya menghimbau masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan Desa dan menilai terhadap pelaksanaannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maulid (2015), dengan judul penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas 19 November Kolaka yaitu “Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi di Desa Puuosu Kabupaten Kolaka)”.

a. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena fenomena permasalahan, yaitu dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh belum mencapai hasil

yang maksimal seperti yang diharapkan, atau tidak sesuai dengan yang di rencanakan, hal ini diduga diperlukannya kepemimpinan Kepala Desa sebagai penggerak partisipasi masyarakat dituntut mampu memberikan motivasi kepada masyarakat pada setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, kepala desa harus memiliki jiwa atau semangat kepeloporan, dan dapat memberikan contoh yang baik yang dapat diteladani serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

- b. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan survey. Variabel penelitian yang dianalisis adalah Kepemimpinan Kepala Desa dan Partispasi Masyarakat. Penelitian ini mengkaji secara sistematis dan mendalam tentang kepemimpinan Kepala Desa untuk sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Hasil penelitian menunjukkan gambaran sebagai berikut:
  - 1) Terkait pola kepemimpinan Kepala Desa disenangi masyarakatnya karena ketokohnya dengan tindakan tegas untuk menggerakkan masyarakat.
  - 2) Gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan cenderung otokratis
- d. Kesimpulan dari penelitian tersebut, adalah:
  - 1) Gaya kepemimpinan Desa Puusu dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menggunakan gaya Otokratis, penilaian tersebut didasarkan bahwa Kepala Desa Puusu dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi senantiasa menggunakan kekuatan posisinya sebagai



pemimpin tertinggi di Desa yang kemudian mengarah pada tindakan seakan-akan memaksa pada hal-hal tertentu.

- 2) Partisipasi masyarakat, baik pada pelaksanaan pembangunan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik relatif rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak bekerja untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.
  - 3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Puusu berupa material, tenaga, masukan atau saran.
- e. Temuan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Kepala Desa Puusu, masih dinilai kurang memberikan motivasi pada masyarakatnya meski dalam beberapa hal, Kepala Desa telah melibatkan masyarakat dalam hal menerima masukan dan saran.
  - 2) Disisi lain, pengambilan keputusan oleh Kepala Desa Puusu meskipun melibatkan masyarakatnya, namun pada akhirnya hanya diputuskan oleh Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya
- f. Saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah:
- 1) Kepala Desa sebagai pemimpin agar terus meningkatkan kualitas kepemimpinannya dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau terlibat secara aktif dan partisipatif dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
  - 2) Aparat atau perangkat Desa hendaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu Kepala Desa Guna mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat.

- 3) Hendaknya masyarakat menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh masyarakat, sehingga harus dipahami bersama bahwa Kepala Desa beserta dengan aparatnya tidak mungkin dapat melaksanakan pembangunan Desa sebagaimana mestinya tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakatnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marselinus Ajang (2015), dengan judul penelitian yaitu “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu” yang dipublikasikan pada e-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 4, hal. 1871-1884..

- a. Fenomena permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kepemimpinan tidak lepas dari hambatan–hambatan atau masalah yang ada seperti misalnya minimnya inovasi pemimpin, kurangnya tanggung jawab dan supervise serta keteladanan yang kurang. sehingga menyebabkan kinerja pegawai ikut menjadi terpengaruh menjadi kurang baik atau optimal terutama dalam hal kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, kualitas pekerjaan yang kurang baik serta ketepatan waktu pekerjaan yang tidak ada kejelasan.
- b. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan survey. Variabel penelitian yang dianalisis adalah Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Kinerja Aparatur Desa. Penelitian ini mengkaji secara sistematis tentang peran kepemimpinan Kepala Desa dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Desa.

- c. Hasil penelitian menunjukkan .dalam meningkatkan kinerja Apartur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kaupaten Mahakam Ulu dalam hal supervisi itu sudah berjalan dengan baik.
- 1) Peran Kepemimpinan Kelapa Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang dalam hal inisiatif berjalan dengan baik dapat terlihat pada saat Kepala Desa bisa memberikan himbauan kepada para aparatur Desa agar memberikan pelayanan yang optimal.
- d. Temuan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Kepemimpinan kepala desa kurang objektif dalam memberikan penghargaan kepada aparatur Desa yang memiliki pekerjaan yang bagus sehingga aparatur Desa dalam melakukan pekerjaan tidak ada persaingan agar mendapatkan penghargaan dari Kepala Desa.
  - 2) Kepala Desa masih memiliki kekurangan dalam jiwa kepemimpinannya seperti halnya belum bisa bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada para stafnya yang melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan aparatur Desa dalam memberikan pelayanan kurang maksimal.
  - 3) Kepala Desa Ujoh Bilang cepat dan tanggap terhadap masalah yang terjadi di Desa sehingga Kepala Desa Ujoh Bilang sangat di apresiasi oleh masyarakat dalam kepemimpinannya.
- e. Kesimpulan dari penelitian tersebut, adalah:
- 1) Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dalam indikator supervisi adalah Kepala Desa telah melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik.

- 2) Kepala Desa mempertanggung jawabkan semua yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan Kepala Desa yang dibantu oleh para aparatur Desa.
- f. Saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah:
- 1) Diharapkan Kepala Desa mampu mempertahankan supervisi, tanggung jawab dan insiasi dimasa mendatang selain peningkatan dalam pelayanan. Misalnya dengan memberikan penghargaan setiap bulannya terhadap aparatur Desa yang memiliki kemajuan dalam bekerja sehingga memberikan loyalitas yang baik terhadap pekerjaan yang diberikan.
  - 2) Hendaknya Kepala Desa bersifat objektif dalam memberikan penilaian terhadap aparatur Desa, jangan hanya melihat secara keseluruhan namun lebih kepada individu agar terlihat aparatur Desa yang bekerja dengan baik dan tidak. Serta lebih meningkatkan kinerja aparatur Desa secara keseluruhan denganmelihat kuantitas, kualitas serta ketepatan waktu, sehingga pelayanan yang diberikan juga dapat meksimal.

Untuk melihat penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil penelitian original, dibawah ini ditampilkan tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdahulu

<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu I</b>	<b>Penelitian Terdahulu II</b>	<b>Penelitian Terdahulu III</b>	<b>Penelitian Peneliti</b>
<b>Nama Peneliti</b>	M. Aries Djaenuri (2015)	Maulid (2015)	Marselinus Ajang (2015)	Dasep Rahmat (2018)
<b>Judul</b>	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun	Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Penggerak Masyarakat dalam Pembangunan (Studi di Desa Puuosu Kabupaten Kolaka)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Di Kecamatan Pameungpeuk
<b>Lokasi Penelitian</b>	3 Desa Swakarya dan 3 Desa Swasembada di Kecamatan Tambun	Desa Puuosu, Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka	Desa di Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu	Desa-Desa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten. Garut
<b>Metode Penelitian</b>	Metode Deskriptif Kuantitatif dengan teknik Survey	Metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan teknik Survey	Metode Deskriptif Kualitatif dengan teknik Survey	Metode Ekplanasi dengan teknik Evaluasi
<b>Variabel Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Kepemimpinan Kepala Desa</li> <li>• Variabel Y: Partisipasi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Kepimpinan Kepala Desa</li> <li>• Variabel Y: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Kepemimpinan Kepala Desa</li> <li>• Variabel Y: Kinerja Aparat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Kepemimpinan Kepala Desa</li> <li>• Variabel Y: Partisipasi Masyarakat</li> <li>• Variabel Z: Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa</li> </ul>



Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Metode penelitian termasuk didalamnya variabel-variabel penelitian yang digunakan yaitu metode ekplanasi dengan teknik evaluasi.
2. Fokus penelitian merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara, yaitu kepemimpinan Kepala Desa perngatuhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan desa.
3. Lokus penelitian dilakukan di tingkat Rukun Tetangga, walaupun terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu namun dengan karakteristik daerah yang berbeda.
4. Rujukan teori yang digunakan peneliti untuk variabel penelitian merupakan teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi dalam kaitannya dengan Administrasi Negara, Kebijakan Publik dan Manajemen publik, seperti teori Kepemimpinan dari Greenleaf, teori Partisipasi Masyarakat dari Cary, dan teori Efektivitas dari Emerson.

### **2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Administrasi Negara**

Admnistrasi negara merupakan cabang ilmu pengetahuan yang pada pelaksanaannya berkaitan erat dengan proses politik. Dimulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi. Pelaksanaan administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Disiplin administrasi negara ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat

(*public affairs*), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*) menurut Caiden (Thoha 2010:9). Melalui intervensi pemerintah, guna memberikan jawaban atas masalah-masalah yang memerlukan pemecahan-pemecahan seera kolektif. Dengan era memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (2010:14), yaitu :

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta,
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli,
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi negara dan administratonya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan.
4. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak ditentukan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat harga pasar dan untung rugi,
5. Usaha-usaha dilakukan oleh administrasi negara terutama dalam negara demokrasi ialah dilakukan sangat tergantung pada penilaian mata rakyat banyak.

Penyelenggaraan administrasi negara, harus dimulai dengan dilandasi oleh spirit paradigma administrasi negara, agar penyelenggaraan pemerintahan baik dan bertanggungjawab. Sehingga mampu menghadapi era globalisasi. Spirit paradigma baru administrasi negara menurut Supriatna (2011 :14), yaitu :

- 1) Efisiensi, yaitu menuntut lembaga yang kompetitif, profesional dan memberdayakan,
- 2) Ekonomis, yaitu memiliki arti filosofis, bijak, peka dan produktif,
- 3) Kesetaraan sosial, yaitu menuntut kesetaraan public yang memiliki semangat kepedulian, kenetralan dan kedermawanan

Dalam pelaksanaannya perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam administrasi negara. Prinsip-prinsip administrasi negara menurut Simon (2008:68) adalah sebagai berikut :



- 1) Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesifikasi tugas di kalangan kelompok;
- 2) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam suatu hierarki wewenang yang pasti;
- 3) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil;
- 4) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses langganan atau tempat.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diasumsikan bahwa administrasi negara memiliki peranan penting dari setiap perubahan yang terjadi di masyarakat baik pola kehidupan maupun pola pikir yang disesuaikan dengan tuntutan jaman.

Administrasi negara merupakan cabang ilmu yang sangat kompleks berhubungan dengan kompleksitas penyelenggaraan negara yang pada dasarnya bermuara pada tujuan pelayanan publik yang prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara berkembang seiring dinamika di dalam masyarakat, maka sudah sepantasnyalah administrasi negara berkembang untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul.

Berdasarkan uraian di atas, maka kepemimpinan Kepala Desa, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, dilihat dari segi tujuannya mempunyai relevansi atau keterkaitan satu sama lainnya dengan administrasi negara. Pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa yang menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu penerapan administrasi negara yang berhubungan dengan peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat sebagai proses pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## **2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian**

### **2.4.1 Variabel Kepemimpinan Kepala Desa**

Kepemimpinan merupakan fenomena universal yang sangat penting dalam organisasi, baik organisasi bisnis, pendidikan, politik, keagamaan maupun sosial. Hal ini disebabkan dalam proses interaksi untuk mencapai tujuan, orang-orang yang ada didalamnya membutuhkan seseorang yang dapat mengkoordinasikan, mengarahkan dan memudahkan orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Tanpa pemimpin suatu organisasi hanyalah sejumlah orang-orang atau mesin yang mengalami kebingungan (Keith David, dalam Badeni, 2013 : 126).

Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, karena kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran . Banyak definisi tentang kepemimpinan. Handoko (2010) mengemukakan bahwa kepemimpinan ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan merupakan suatu alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Menurut Tannebaum, Wescher dan Nassarik (dalam Sulastri, 2013 : 120) kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.

Definisi-definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya kepemimpinan merupakan kemampuan, proses dan seni mempengaruhi orang dan kelompok orang agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan organisasi (Badeni, 2013 : 126). Definisi di atas mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan, proses dan seni. Hal ini mengacu pada suatu kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan untuk mempengaruhi orang lain supaya berperilaku tertentu. Seorang pemimpin dapat melakukan dengan cara membujuk, mendesak, memaksa atau dengan cara lain sehingga orang lain menjadi mau melakukannya. Kepemimpinan lebih terfokus pada kemampuan, pengaruh dan seni mempengaruhi.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan diatas, kepemimpinan secara luas (Rivai dan Mulyadi, 2013 : 2) meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Serta adanya proses mengarahkan kedalam aktivitas-aktivitas positif yang ada hubungannya dengan pekerjaan dalam organisasi.

Kartono dalam Sudriamunawar (2013:17) menjelaskan arti pemimpin sebagai berikut : "Pemimpin adalah seseorang yang memiliki suatu atau beberapa kelebihan sebagai preposisi (bakat yang dibawa sejak lahir) , dan merupakan

kebutuhan dari satu situasi, sehingga ia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan". Dikemukakan oleh Fairchild dalam Sudriamunawar (2013: 17) yaitu "Pemimpin dalam arti luas adalah seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan dan mengorganisir atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi serta melalui akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya".

Berdasarkan definisi-definisi kepemimpinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan mengandung satu unsur utama yaitu bagian yang dianggap penting dalam manajemen organisasi, yang dimana melekat pada diri seorang pemimpin dalam bentuk kemampuan dan atau proses untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan perorangan atau kelompok, agar bawahan perorangan atau kelompok itu mau berperilaku seperti apa yang dikehendaki pemimpin dan memperbaiki budayanya, serta memotivasi perilaku bawahan dan mengarahkan ke dalam aktivitas-aktivitas positif yang ada hubungannya dengan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kemampuan untuk mengidentifikasi isyarat-isyarat yang terjadi di lingkungan, mendiagnosanya kemudian mengadaptasi perilaku kepemimpinannya sesuai kondisi lingkungan memberikan corak yang indah dalam seluruh rangkaian kegiatan organisasi. Seorang pemimpin harus bisa menilai secara benar bagaimana pengikutnya dan bagaimana tingkat kematangan pengikutnya sehingga dapat memilih gaya kepemimpinan yang seperti apa yang baik digunakan. Baik

kepada bawahannya secara keseluruhan maupun kepada bawahannya secara pribadi menurut Hersey dan Blanchard (dalam Rivai, 2013).

Kepemimpinan tidak sekedar mencapai target atau mengatur karyawan agar mematuhi standar, melainkan lebih kepada aspek bagaimana karyawan mematuhi standar tanpa diatur atau dipaksa. Kepemimpin menekankan pada usaha mencapai tujuan bersama-sama orang lain melalui pengikutnya. Sehingga memberi makna satu visi, misi dan tujuan sehingga anggotanya menjadi lebih (a) mampu melakukan tugas-tugasnya, (b) berorientasi pada masa depan dan (c) berorientasi pada tuntutan perubahan (Badeni; 2013: 130). Maka dari itu penekanan fungsi kepemimpinan menjadi penting.

Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam wilayah Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas yang dilimpahkan oleh Camat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Penyelenggaraan pembinaan perberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Fungsi kepemimpinan menurut Rivai dan Mulyadi berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti :

- a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
- b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi.

Berkembangnya penelitian tentang kepemimpinan menjadikan banyak teori-teori tentang kepemimpinan, model-model kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Keunikan kepemimpinan seunik manusianya itu sendiri. Rivai dan Mulyadi (2013) mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan organisasi masing-masing.

Dalam variabel ini yang akan diukur berdasarkan teori kepemimpinan menurut Greenleaf (dalam Iskandar, 2017a:273) yang mengemukakan sepuluh ciri khas kepemimpinan, yaitu:

#### **1. Dimensi mendengarkan**

Secara tradisional pemimpin dihargai karena keahlian komunikasi serta mendengarkan yang dipadukan dengan masa renungan yang teratur.

Dimensi ini diukur dengan indikator-indikator dan butir-butir item sebagai berikut:

a. Komunikasi efektif.

1. Pimpinan dalam memberikan informasi dan pengarahan melalui komunikasi yang baik dan jelas.
2. Pimpinan menggunakan tata bahasa yang baik dalam kegiatan pertemuan dengan para Ketua Rukun Tetangga

b. Interaksi sosial.

1. Pimpinan dapat berbaur dan berinteraksi dengan baik terhadap masyarakatnya,
2. Pimpinan dapat memenuhi undangan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## **2. Dimensi empati**

Berusaha keras untuk memahami dan memberikan perhatian kepada orang lain.

Dimensi ini diukur oleh indikator-indikator dan butir-butir item sebagai berikut:

a. Memahami orang lain

1. Pimpinan dapat memahami jika bawahannya menemui permasalahan dalam pelaksanaan program,

2. Pimpinan memberikan solusi kepada bawahannya agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.

b. Memberikan perhatian

1. Pimpinan memberikan perhatian dan apresiasi atas kinerja para bawahan,
2. Pimpinan mengembangkan pola pikir para bawahannya dengan memberikan contoh bekerja secara profesional.

**3. Dimensi menyembuhkan**

Belajar menyembuhkan daya yang kuat untuk perubahan dan integrasi. Dimensi ini diukur oleh indikator-indikator dan butir-butir item sebagai berikut:

a. Inspirator

1. Pimpinan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik,
2. Pimpinan mengembangkan pola pikir para bawahannya dengan memberikan contoh bekerja secara profesional.

b. Motivator

1. Pimpinan merupakan motivator yang baik sebagai wujud kepemimpinannya,
2. Pimpinan memberikan dorongan motivasi kepada bawahan.

**4. Dimensi kesadaran**



Membuat komitmen untuk meningkatkan kesadaran dengan berlandaskan pada introspeksi diri, menjaga komitmen, dan berpikir rasional. Dimensi ini diukur oleh indikator-indikator dan butir-butir item sebagai berikut:

a. Introspeksi diri

1. Pimpinan dapat mengintrospeksi diri apabila melakukan kekeliruan dalam pekerjaannya,
2. Pimpinan melakukan perbaikan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

b. Menjaga komitmen

1. Pimpinan mendorong perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik,
2. Pimpinan menghadapi tantangan tugas dengan tetap mampu memelihara kebersamaan yang kondusif.

c. Berpikir rasional

1. Pimpinan dapat berfikir rasional ketika bawahan menyampaikan permasalahan pelaksanaan program,
2. Pimpinan dapat mengambil keputusan yang rasional berkaitan dengan pelaksanaan program.

**5. Dimensi persuasif**

Mengandalkan kemampuan membujuk bukannya wewenang karena kedudukan dalam membuat keputusan dalam organisasi, dengan indikator kemampuan membujuk dan membangun konsensus. Dimensi ini diukur oleh indikator-indikator dan butir-butir item sebagai berikut:

a. Kemampuan membujuk

1. Pimpinan memiliki kemampuan membujuk yang baik agar bawahannya dapat bekerja sama,
  2. Pimpinan dapat melakukan pendekatan yang baik dalam membangun semangat dan kekompakan bawahannya.
- b. Membangun konsensus
1. Pimpinan mengadakan pertemuan/rapat untuk membahas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program,
  2. Pimpinan memberikan apresiasi terhadap aspirasi dan saran bawahan untuk kemajuan bersama.

## **6. Dimensi konseptualisasi**

Kemampuan untuk melihat suatu masalah dari perspektif konseptualisasi yang berarti orang harus berpikir melampaui realita, dengan indikator dan butir item:

- a. Kemampuan melihat masalah
  1. Pimpinan memiliki kemampuan melihat masalah dalam pelaksanaan program kerja,
  2. Pimpinan dapat meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam pelaksanaan program.
- b. Kemampuan membuat program kerja
  1. Pimpinan dapat membuat program kerja yang mudah dimengerti oleh bawahan,

2. Pimpinan dalam menjabarkan program-program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Kemampuan memberikan solusi
1. Pimpinan dapat memberi solusi kepada bawahan ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program,
  2. Pimpinan sangat simpati kepada bawahan dan memberikan arahan apabila terjadi kesalahan.

### **7. Dimensi kemampuan meramalkan**

Kemampuan untuk memperhitungkan sebelumnya atau meramalkan hasil yang layak mendapatkan perhatian cermat, dengan indikator dan butir item sebagai :

- a. Kemampuan memprediksi hasil
1. Pimpinan dapat mengetahui arah dan tujuan program yang akan dilaksanakan,
  2. Pimpinan memiliki kemampuan memprediksi hasil dalam proses penyelesaian suatu program.
- b. Kemampuan mencermati situasi dan kondisi.
1. Pimpinan dapat mencermati situasi lapangan dengan baik,
  2. Pimpinan dapat mencermati kondisi lapangan dengan baik.

### **8. Dimensi kemampuan melayani**

Memiliki makna memegang sesuatu dengan kepercayaan orang lain, dengan indikator dan butir item:

- a. Mengayomi
1. Pimpinan membantu kesulitan dan masalah yang dihadapi bawahan,

2. Pimpinan menciptakan iklim kerja dan komunikasi yang kondusif.
- b. Memberikan bimbingan.
1. Pimpinan memberitahukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya,
  2. Pimpinan memberi arahan kepada bawahan agar mampu menyelesaikan tugasnya.

### **9. Komitmen terhadap pekerjaan**

Bermakna bahwa seorang pemimpin akan berkomitmen terhadap suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan indikator dan butir item:

- a. Profesionalisme
1. Pimpinan mengedepankan sikap profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya,
  2. Pimpinan mendorong bawahannya untuk berkomitmen dan profesional dalam bekerja.
- b. Bertindak rasional
1. Pimpinan memiliki sikap yang rasional dalam melaksanakan kewajibannya.
  2. Sikap pimpinan sudah sesuai dengan azas kepatutan dan azas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi.
1. Pimpinan selalu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian program yang dilaksanakan oleh bawahannya,
  2. Pimpinan melakukan evaluasi dengan melihat langsung ke lapangan.

### **10. Membangun masyarakat**

Pemimpin memperlihatkan kemampuannya yang tidak terbatas untuk kelompok spesifik yang berhubungan dengan masyarakat, dengan indikator dan butir item:

a. Kemampuan interaksi

1. Pimpinan dapat berinteraksi dengan baik kepada bawahan,
2. Pimpinan dapat berinteraksi dengan baik kepada masyarakatnya.

b. Fasilitator

1. Pimpinan merupakan fasilitator yang baik dalam melaksanakan program,
2. Pimpinan membantu memfasilitasi bawahan berkaitan pelaksanaan program.

#### **2.4.2 Variabel Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti pengambilan atau keikutsertaan. Partisipasi adalah gejala demokrasi yang melibatkan keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya keaktifan masyarakat diharapkan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mampu menampung setiap aspirasi yang ada.

Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu (Iskandar, 2017:299-301):

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*).

Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat nasional. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditunjukkan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu.

2. Partisipasi kelompok (*group participation*).  
Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyatakan aspirasi mereka dan bekerja sama untuk membela kepentingan publik atau individu yang sama.
3. Kontak antara warga dan pemerintah (*citizen-go-government contacting*).  
Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahannya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara pribadi.
4. Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan.  
Pturut memberi ndartisipasi ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Partisipasi warga yang tinggi akan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada penyelenggara pembangunan. Tetapi juga partisipasi warga turut memberi andil yang besar untuk mencapai atau tidaknya setiap perencanaan program pembangunan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Menurut Sudriamunawar (2011) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, sedikitnya ada dua cara dalam pembangunan, yaitu:

1. Mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang serasi untuk kepentingan-kepentingan pencapai tujuan pembangunan. Dalam pengertian ini pada dasarnya peran serta masyarakat lebih didasarkan atas hubungan satu arah yaitu dari atas ke bawah.
2. Meningkatkan oto-aktivitas, swadaya dan swakarya masyarakat sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan ditujukan kepada sektor wirausaha, termasuk dalam hal ini sektor pertanian, kehutanan dan lain-lain. Kegiatan seperti ini dilakukan melalui serangkaian kebijaksanaan, penciptaan iklim yang sehat, penggunaan mekanisme pasar dan harga serta pelaksanaan program-program yang melibatkan masyarakat secara terpadu. Dalam rangka inilah perencanaan pembangunan lebih bersifat pendewasaan masyarakat dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan.

Sementara While (dalam Sudriamunawar, 2011) mengemukakan beberapa

alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan, yaitu:

1. Dengan partisipasi masyarakat akan lebih banyak hasil yang dicapai
2. Dengan partisipasi masyarakat pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya murah
3. Partisipasi masyarakat memiliki nilai dasar yang sangat berarti dalam menjalin persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat
4. Partisipasi masyarakat merupakan katalisator untuk kepentingan pembangunan selanjutnya .
5. Partisipasi masyarakat lebih menyadarkan masyarakat itu sendiri terhadap penyebab kemiskinan sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengatasinya.

Diharapkan dengan adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah bisa memberikan pelayanan yang baik dengan biaya yang murah. Bisa menjalin persatuan dan kerjasama diantara masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri.

Menurut Effendi ([http//id.Wikipedia.org](http://id.Wikipedia.org)) partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada pada posisi bawahan.
2. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Stuart (dalam Iskandar, 2017) mencatat ada lima aspek dasar yang terkait dengan tipe-tipe partisipasi sosial yang meliputi tingkatan terendah hingga tingkatan yang tertinggi. Tipe-tipe partisipasi ini adalah:

1. Keanggotaan seseorang dalam organisasi/kelompok/kegiatan sosial.
2. Frekuensi dan intensitas pertemuan-pertemuan masyarakat;

3. Frekuensi dan intensitas seseorang memberikan sumbangan dana keuangan bagi kepentingan masyarakat bersama;
4. Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat; dan
5. Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam menjelaskan partisipasi, peneliti menggunakan teori Cary (dalam Iskandar, 2015:235) mengungkapkan ada lima dimensi dalam partisipasi:

### **1. Dimensi persyaratan partisipasi**

Aspek partisipasi yang paling mendasar dan prioritas untuk mengidentifikasi dan melihat berbagai masalah, dengan indikator dan butir item:

- a. Luasnya pengetahuan dan latar belakang partisipan.
  1. Masyarakat memiliki pengetahuan dalam mendalami fenomena masalah yang terjadi,
  2. Masyarakat memiliki berkaitan latar belakang pendidikan yang cukup untuk mendalami permasalahan.
- b. Kemampuan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan.
  1. Masyarakat dapat mengidentifikasi fenomena masalah yang terjadi di masyarakat,
  2. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah sosial.
- c. Kemampuan untuk bertindak secara efektif.
  1. Masyarakat memiliki kemampuan bertindak secara efektif,
  2. Masyarakat menghindari kecerobohan atau kesalahan dalam bertindak.

### **2. Dimensi tipe-tipe partisipasi**



Meliputi tingkatan terendah hingga tingkatan yang tertinggi, dengan indikator dan butir item berikut:

- a. Keanggotaan dalam organisasi,
  1. Masyarakat yang berpartisipasi harus tercantum keanggotaannya dalam sebuah organisasi,
  2. Masyarakat melakukan partisipasi memiliki pengalaman berorganisasi.
- b. Frekuensi dan intensitas kehadiran dalam pertemuan,
  1. Seringnya mengikuti pertemuan-pertemuan dapat menentukan keberhasilan dalam melahirkan partisipasi,
  2. Intensitas warga dalam partisipasi dapat menentukan efektifitas pelaksanaan partisipasi.
- c. Frekuensi dan intensitas memberikan sumbangan,
  1. Seringnya memberikan sumbangan berupa uang/dana pembangunan sosial merupakan tindakan partisipasi,
  2. Memberikan sumbangan uang yang besar merupakan aturan dari intensitas partisipasi.
- d. Keanggotaan dalam kepanitiaan,
  1. Aktif terlibat dalam berbagai kepanitiaan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat,
  2. Aktif terlibat dalam program pembangunan di tingkat Desa.
- e. Posisi kepemimpinan.
  1. Seorang partisipan harus mempunyai posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat,

2. Kepemimpinan seorang partisipan berperan penting dalam sendi-sendi aspek kehidupan.

### **3. Dimensi tipe-tipe partisipan**

Orang-orang yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan, dengan indikator dan butir item;

- a. Pemimpin masyarakat lokal,
  1. Pemimpin di lingkungan setempat harus mengerti dan memahami permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat,
  2. Pemimpin lokal harus timbul/lahir dari lingkungan dimana kita berada.
- b. Kaum professional yang berasal dari masyarakat,
  1. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu yaitu ahli di bidang pertanian pembangunan, pendidikan di lingkungan tempat berada,
  2. Seseorang yang ahli di anggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan tempat berada.
- c. Kaum professional pendatang,
  1. Warga pendatang atau penduduk sementara yang bertugas di wilayah anda seperti bidan, dokter dianggap sebagai profesional,
  2. Mereka yang diminta kehadirannya oleh masyarakat karena keahlian yang dimilikinya seperti konsultan, penceramah, mubaligh dianggap sebagai profesional.
- d. Pekerja sosial profesional.
  1. Mereka yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial masyarakat,

2. Mereka yang ahli dalam konsultan bidang pembangunan mental spiritual masyarakat.

#### **4. Dimensi hubungan partisipan dengan masyarakat lokal**

Ditinjau dari sifat dan tempat berlangsungnya proses pembangunan masyarakat, dengan indikator dan butir item:

- a. Masyarakat setempat,
  1. Komunikasi diantara masyarakat setempat harus menggambarkan keakraban yang baik dan aktif,
  2. Pernimpin lingkungan setempat harus membangun keharmonisan dengan masyarakat.
- b. Masyarakat pendatang,
  1. Komunikasi warga pendatang dengan masyarakat setempat harus terjalin dengan baik dan keakraban,
  2. Warga pendatang harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memudahkan dalam partisipasi.

#### **5. Dimensi tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi**

Sebagai wahana merupakan tahapan dalam organisasi masyarakat, meliputi indikator dan butir item:

- a. Tahap permulaan kegiatan,
  1. Perencanaan yang dimulai dari pencarian gagasan dan ide tentang fenomena masalah yang ada di lingkungan serta menentukan rencana strategis,

2. Menentukan pimpinan atau perwakilan yang berminat dalam proses partisipasi di lingkungan.
- b. Tahap pencapaian tugas,
1. Warga masyarakat lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan daripada tahap permulaan,
  2. Partisipasi warga masyarakat dipandang sebagai tujuan pembangunan masyarakat.
- c. Tahap kontinuitas dan diskontinuitas partisipasi,
1. Partisipasi harus dilakukan secara terus menerus,
  2. Untuk kesinambungan partisipasi semua pimpinan masyarakat secara terbuka diundang untuk diskusi mengenai pembangunan masyarakat.

#### **2.4.3 Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa**

Steers (dalam Meitaningrum dkk., 2013:193) menyatakan bahwa efektivitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berharga dengan sependai mungkin dalam mengejar tujuan operasional.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai (Makmur, 2015: 6). Lebih lanjut unsur-unsur dari efektivitas dapat dilihat dari segi kriteria, antara lain (Makmur, 2015: 7-8): a) ketepatan penentuan waktu, b) ketepatan perhitungan biaya, c) ketepatan dalam pengukuran, d) ketepatan dalam menentukan pilihan, e) ketepatan berpikir, f) ketepatan dalam melakukan perintah, g) ketepatan menentukan tujuan, dan h) ketepatan sasaran.

Menurut Emerson (dalam Iskandar, 2017: 329-330) pengertian efektivitas sebagai pengukuran, dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berarti dapat dikatakan suatu kegiatan dapat mencapai efektivitas jika terjadi sasaran dan tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Anggarini dan Puranto, 2010: 170). Program pembangunan Daerah adalah merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan pembangunan Daerah terkait (Sjafrizal, 2015: 342). Selanjutnya Steers (dalam Iskandar, 2017d:87) mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Kriteria suatu kegiatan atau program dapat mencapai efektivitas menurut Indrawidjaja (dalam Iskandar, 2017c:339) meliputi dimensi-dimensi berikut:

#### **1. Dimensi kebijakan dasar**

Dimaksudkan agar para pihak yang berkepentingan dengan suatu kebijakan dapat mengetahuinya, dengan indikator dan butir item sebagai berikut:

- 6) Rencana diketahui secara terbuka.
  1. Prosentase aparat desa yang mengetahui rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa,
  2. Prosentase aparat desa yang memahami rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa.
- 7) Tujuan diketahui oleh umum

1. Prosentase aparat desa yang mengetahui secara umum tujuan dari program pembangunan desa,
2. Prosentase aparat desa yang memahami secara umum pelaksanaan program pembangunan desa.

## **2. Dimensi strategi**

Bahwa suatu kebijakan yang dirumuskan harus memiliki kejelasan strategi dan ketepatan strategi kegiatan dalam melaksanakannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dengan indikator dan butir item sebagai berikut:

### **a. Kejelasan strategi**

1. Prosentase aparat desa yang mengetahui tentang kejelasan strategi pelaksanaan program pembangunan desa,
2. Prosentase aparat desa yang memahami kejelasan strategi tentang prosedur pelaksanaan program pembangunan desa.

### **b. Ketepatan strategi**

1. Prosentase ketepatan strategi yang disusun pada program pembangunan desa,
2. Prosentase pemahaman aparat desa terhadap ketepatan strategi dalam melaksanakan program pembangunan desa.

## **3. Dimensi pengorganisasian**

Mengandung pengertian bahwa segala kegiatan dan aktivitas memerlukan pembagian tugas dan tanggungjawab atau hierarki wewenang sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan indikator dan butir item sebagai berikut:

- a. Kejelasan pembagian tugas
  - 1. Prosentase pencapaian tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas,
  - 2. Prosentase pembagian tugas dipengaruhi oleh kualitas aparat desa.
- b. Kejelasan tanggung jawab
  - 1. Prosentase kejelasan tanggung jawab aparat desa mempengaruhi kualitas rencana pelaksanaan program pembangunan desa,
  - 2. Prosentase kualitas tujuan pelaksanaan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan tanggung jawab aparat desa.

#### **4. Dimensi pelaksanaan sesuai rencana.**

Mengandung makna bahwa setiap kegiatan atau program melibatkan sumber daya–sumber daya dengan perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pengawasan, dan evaluasi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai, dengan indikator dan butir item sebagai berikut:

- a. Perencanaan program
  - 1. Prosentase kesesuaian program pembangunan desa dengan aturan yang berlaku,
  - 2. Prosentase kepatuhan dalam melaksanakan perencanaan program yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian sumber daya
  - 1. Prosentase kualitas tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh fasilitas atau sumber daya yang dimiliki,

2. prosentase kelayakan fasilitas atau sumber daya dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan rencana program pembangunan desa.

c. Pengawasan

1. Prosentase pelaksanaan program pembangunan desa diawasi oleh instansi yang berwenang,
2. Prosentase hasil pengawasan tentang kesesuaian antara realisasi dengan perencanaan program pembangunan desa

d. Evaluasi

1. Prosentase Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa,
2. Prosentase evaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

**5. Dimensi target hasil.**

Mempunyai pengertian bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki tujuan yang harus dicapai, ketepatan waktu, mendatangkan manfaat dan keuntungan, serta kepuasan masyarakat, dengan indikator dan butir item sebagai berikut:

a. Tercapai tujuan

1. Prosentase kesesuaian target dengan rencana program pembangunan desa yang dapat direalisasikan,
2. Prosentase pencapaian tujuan dengan target pelaksanaan program pembangunan desa,

b. Ketepatan waktu,



1. Prosentase pelaksanaan program pembangunan desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,
  2. Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan desa sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- c. Mendatangkan manfaat dan keuntungan
1. Prosentase tingkat manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa,
  2. Prosentase tingkat manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa.
- d. Kepuasan masyarakat
1. Prosentase tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan desa,
  2. Prosentase tingkat kepuasan masyarakat desa sesuai dengan partisipasinya dalam program pembangunan desa.

## **2.5 Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan proposisi-proposisi yaitu apabila kepemimpinan Kepala Desa dilaksanakan dengan optimal maka partisipasi masyarakat akan meningkat yang berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Kepemimpinan merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan

wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan organisasi dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang dinamis dan kreatif maka organisasi yang dipimpinnya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan semakin banyak. Efektivitas para bawahan sebagian besar ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin (Hasibuan, 2011).

Pemimpin harus mengutamakan tugas, tanggungjawab dan hubungan yang harmonis baik dengan atasannya maupun dengan para bawahannya. Jadi pemimpin harus mengadakan komunikasi ke atas dan ke bawah baik komunikasi formal maupun komunikasi informal. Pimpinan bertanggung jawab mengarahkan visi serta sumber-sumber daya ke arah yang menghasilkan yang paling efektif dan efisien.

Kajian tentang kepemimpinan dalam pembahasan ini tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup kajian administrasi negara, karena masalah kepemimpinan organisasi publik sebagai kebijakan publik merupakan bagian dari studi administrasi negara.

Struktur utama dari model penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan Kepala Desa mempunyai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dengan partisipasi masyarakat dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan sub strukturnya adalah: partisipasi masyarakat mempunyai hubungan kausal dengan mewujudkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain diduga oleh faktor partisipasi masyarakat yang belum

terlaksana dengan baik dan dampak belum optimalnya kepemimpinan Kepala Desa.

Melalui kepemimpinan Kepala Desa yang baik dan partisipasi masyarakat yang baik diharap tingkat efektivitas pelaksanaan program pembangunan akan mengalami peningkatan.

Menurut Sudriamunawar (2011:65) peran serta masyarakat dapat mempengaruhi produktivitas pembangunan, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa apabila peran serta masyarakat tumbuh dengan baik dalam setiap pembangunan, maka produktivitas pembangunan itu sendiri akan meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas pembangunan diharapkan dapat meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diharapkan masyarakat terus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik suatu analisa bahwa diduga terdapat hubungan kausalitas yaitu efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa diharapkan dapat meningkat melalui peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan dan didukung kepemimpinan Kepala Desa. Dengan demikian masing-masing variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini diduga memiliki keterkaitan dan hubungan kausalitas yang signifikan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Yang Digunakan**

Metode penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (*causal effectual*).

Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti dengan analisis data menggunakan pendekatan *path analysis* (analisis jalur).

#### **3.2 Varibel Penelitian dan Paradigma Penelitian**

##### **3.2.1 Variabel-Variabel yang Diteliti**

Dalam usulan penelitian ini menggunakan satu variabel bebas (*independent*), satu variabel antara (*intervening*), dan satu variabel terikat (*dependent*) dengan sifat hubungan diantara variabel tersebut yaitu *causal effectual*, dengan penjelasan sebagai berikut:

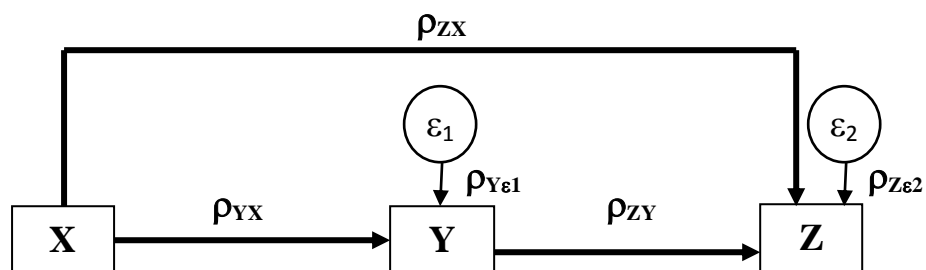
1. Variabel bebas (*Independent*) dengan simbol X yaitu Kepemimpinan Kepala Desa.

2. Variabel antara (*intervening*) dengan simbol Y yaitu Partisipasi Masyarakat.
3. Variabel terikat (*dependent*) dengan simbol Z yaitu Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.

### 3.2.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah suatu model penelitian yang menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, lalu membuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain sehingga masalah penelitian dapat dirumuskan, memilih teori yang relevan, merumuskan hipotesa, metode penelitian, instrumen penelitian, teknis analisa dan kesimpulan yang diharapkan.

Sehubungan dengan variabel-variabel penelitian yang disebutkan di atas maka dirumuskan paradigma penelitian yang merupakan model bersifat *causal effectual* yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4  
Paradigma Penelitian

Keterangan:

X = Kepemimpinan Kepala Desa

Y = Partisipasi Masyarakat

Z = Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

→ = Hubungan kausal

$\rho_{YX}$  = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y

$\rho_{ZX}$  = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Z

$\rho_{ZY}$  = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Y terhadap variabel Z

$\rho_{Z\epsilon_2}$  = Pengaruh variabel lain terhadap Z  
 $\rho_{Y\epsilon_1}$  = Pengaruh variabel lain terhadap Y

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Untuk kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu variabel bebas (*dependent*), variabel antara (*intervening*), dan variabel terikat (*dependent*) dengan batasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala Desa (X) adalah pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
  - a. Mendengarkan, dengan indikator komunikasi efektif dan interaksi sosial.
  - b. Empati, dengan indikator memahami orang lain dan memberikan perhatian.
  - c. Menyembuhkan, dengan indikator inspirator dan motivator.
  - d. Kesadaran, dengan indikator intropeksi diri, menjaga komitmen, dan berpikir rasional.
  - e. Persuasif, dengan indikator kemampuan membujuk dan membangun konsensus.

- f. Konseptualisasi, dengan indikator kemampuan melihat masalah, kemampuan membuat program kerja, dan kemampuan memberikan solusi.
  - g. Kemampuan meramalkan, dengan indikator kemampuan memprediksi hasil serta kemampuan mencermati situasi dan kondisi.
  - h. Kemampuan melayani, dengan indikator mengayomi dan memberikan bimbingan.
  - i. Komitmen terhadap pekerjaan, dengan indikator profesionalisme, bertindak rasional, dan melakukan evaluasi.
  - j. Membangun masyarakat, dengan masyarakat, indikatornya kemampuan interaksi dan fasilitator.
2. Partisipasi Masyarakat (Y) adalah aktivitas atau keterlibatan aktif masyarakat, baik secara perorangan atau kelompok sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam proses pembangunan desa, yang diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
- a. Persyaratan partisipasi (*prerequisites to participation*), dengan indikator luasnya pengetahuan dan latar belakang, kemampuan mengidentifikasi dan pengambilan keputusan, serta kemampuan bertindak secara efektif.
  - b. Tipe-tipe partisipasi (*types of participation*), dengan indikator keanggotaan dalam organisasi, frekuensi dan intensitas kehadiran dalam pertemuan, frekuensi dan intensitas memberikan sumbangan, keanggotaan dalam kepanitiaan, serta posisi kepemimpinan.

- c. Tipe-tipe partisipan (*types of participant*), dengan indikator pemimpin masyarakat lokal, kaum profesional yang berasal dari masyarakat, kaum profesional pendatang, dan pekerja sosial profesional.
- d. Hubungan partisipan dengan masyarakat lokal (*relationship of participant to locality*), dengan indikator masyarakat setempat, dan masyarakat pendatang.
- e. Tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi (*stages of organization as they relate to participation*), dengan indikator tahap permulaan kegiatan, tahap pencapaian tugas, serta tahap kontinuitas dan diskontinuitas partisipasi.
- f. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z) adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dicapai yang melibatkan kepemimpinan Kepala Desa dan partisipasi masyarakat, yang diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
  - a. Kebijakan dasar, dengan indikator rencana diketahui secara terbuka, dan tujuan diketahui oleh umum.
  - b. Strategi, dengan indikator kejelasan strategi dan ketepatan strategi.
  - c. Pengorganisasian, dengan indikator kejelasan pembagian tugas dan kejelasan tanggungjawab.
  - d. Pelaksanaan sesuai rencana, dengan indikator perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pengawasan, dan evaluasi sehingga tujuan dan sasarannya dapat tercapai.



- e. Target hasil, dengan indikator tercapai tujuan, ketepatan waktu, mendatangkan manfaat dan keuntungan, serta kepuasan masyarakat.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel penelitian yang ditetapkan. Operasionalisasi variabel ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang ditujukan dalam merumuskan instrument (alat ukur) penelitian. Adapun operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
1	Kepemimpinan Kepala Desa (X)	1. Mendengarkan	a. Komunikasi efektif	1, 2
			b. Interaksi sosial	3, 4
		2. Empati	a. Memahami orang lain	5, 6
	Greenleaf (Iskandar, 2017a:273)		b. Memberikan perhatian	7, 8
		3. Menyembuhkan	a. Inspirator	9, 10
	Kepemimpinan pelayanan menekankan kepada peningkatan pelayanan kepada orang lain, yang merupakan sebuah pendekatan holistik dalam pekerjaan dan rasa kemasyarakatan	4. Kesadaran	b. Motivator	11, 12
			a. Introspeksi diri	13, 14
			b. Menjaga komitmen	15, 16
		5. Persuasif	c. Berpikir rasional	17, 18
			a. Kemampuan membujuk	19, 20
			b. Membangun konsensus	21, 22
		6. Konseptualisasi	a. Kemampuan melihat masalah	23, 24
			b. Kemampuan membuat program kerja	25, 26
			c. Kemampuan memberikan solusi	27, 28

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
2	Partisipasi Masyarakat (Y)  Cary (Iskandar, 2017b:228)  Partisipasi adalah kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu masyarakat yang merupakan hasil consensus sosial masyarakat ke arah perubahan sosial yang diharapkan.	7. Kemampuan meramalkan	a. Kemampuan memprediksi hasil	29, 30
			b. Kemampuan mencermati situasi dan kondisi	31, 32
		8. Kemampuan melayani	a. Mengayomi	33, 34
			b. Memberikan bimbingan	35, 36
		9. Komitmen terhadap pekerjaan	a. Profesionalisme	37, 38
			b. Bertindak rasional	39, 40
			c. Melakukan evaluasi	41, 42
		10. Membangun masyarakat	a. Kemampuan berinteraksi	43, 44
			b. Fasilitator	45, 46
		1. Persyaratan partisipasi	a. Pengetahuan dan latar belakang partisipan	47, 48
	b. Kemampuan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan	49, 50		
	c. Kemampuan bertindak secara efektif	51, 52		
	2. Tipe-tipe partisipasi	a. Keanggotaan dalam organisasi	53, 54	
		b. Frekuensi dan intensitas kehadiran dalam pertemuan masyarakat	55, 56	
		c. Frekuensi dan intensitas memberikan sumbangan	57, 58	
		d. Keanggotaan dalam kepanitiaan	59, 60	
		e. Posisi kepemimpinan	61, 62	
	3. Tipe-tipe partisipan	a. Pemimpin masyarakat lokal	63, 64	
		b. Kaum profesional yang berasal dari masyarakat	65, 66	
		c. Kaum profesional pendatang	67, 68	
		d. Pekerja sosial profesional	69, 70	

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
		4. Hubungan partisipan dengan masyarakat lokal	a. Masyarakat setempat b. Masyarakat pendatang	71, 72 73, 74
		5. Tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi	a. Tahap permulaan kegiatan b. Tahap pencapaian tugas c. Tahap kontinuitas dan diskontinuitas partisipasi	75, 76 77, 78 79, 80
3	Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)  Indrawidjaya (Iskandar, 2017c:339)  Sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dikatakan efektivitas suatu kegiatan jika tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.	1. Kebijakan Dasar  2. Strategi  3. Pengorganisasian  4. Pelaksanaan sesuai rencana  5. Target hasil	a. Rencana diketahui secara terbuka b. Tujuan diketahui oleh umum a. Kejelasan strategi b. Ketepatan strategi a. Kejelasan pembagian tugas b. Kejelasan tanggung jawab e. Perencanaan program f. Pengorganisasian sumber daya g. Pengawasan h. Evaluasi e. Tercapai tujuan f. Ketepatan waktu g. Mendatangkan manfaat dan keuntungan h. Kepuasan masyarakat	81, 82 83, 84 85, 86 87, 88 89, 90 91, 92 93, 94 95, 96 97, 98 99,100 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108

### 3.5 Alat Ukur Penelitian, Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

#### 3.5.1 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian dengan tingkat informasi yang tepat dan sesuai dengan kaidah

ilmiah. Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka langkah yang ditempuh adalah merumuskan dan menyusun alat ukur penelitian.

Iskandar (2017a:171) mengemukakan bahwa salah satu tahapan yang paling penting dalam proses penelitian ilmiah adalah menyusun alat ukur penelitian sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Oleh sebab itu perlu disusun sesuai kebutuhan data berdasarkan variabel yang akan diukur, sehingga alat ukur yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket (kuisisioner) yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain (responden) yang bersedia memberikan tanggapan (respon) sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mencari informasi yang lengkap mengenai fenomena masalah penelitian. Angket yang digunakan berupa angket jenis tertutup (terstruktur) terdiri dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan bersifat tertutup berikut alternatif jawaban yang disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan cara memberikan tanda silang ( x ) atau tanda checklist (  $\checkmark$  ).

Dalam kegiatan pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan tingkat pengukuran variabel yang bersifat ordinal dan kategori jawaban terdiri dari 5 (lima) tingkatan skala perbedaan semantik dengan menggunakan model *Likert Scale*. Sugiyono (2014:86) menjelaskan "Skala Likert digunakan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial".

Dalam usulan penelitian ini, fenomena masalah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi-dimensi, kemudian dimensi tersebut dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dijadikan titik tolak untuk membuat item instrument berupa pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden.

Jawaban dengan menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari positif sampai negatif berupa jawaban terhadap pertanyaan dengan skor berikut:

1. Sangat Baik (SB) dengan skor 5 atau berjenis kebalikannya dengan skor 1
2. Baik (B) dengan skor 4 atau pertanyaan berjenis kebalikannya dengan skor 2
3. Cukup (C) dengan skor 3 atau pernyataan berjenis kebalikannya dengan skor 3
4. Buruk (B) dengan skor 2 atau pernyataan berjenis kebalikannya dengan skor 4
5. Sangat Buruk (SB) dengan skor 1 atau berjenis kebalikannya dengan skor 5

### **3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur**

Sebelum melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan pengujian alat ukur penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, mengingat ketepatan alat ukur sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian hipotesis. Maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian.

Iskandar (2017a:147) mengemukakan bahwa validitas suatu alat ukur didefinisikan sebagai suatu ukuran yang memungkinkan peneliti beranggapan

bahwa alat ukur tersebut dapat dipergunakan untuk karakter yang hendak diukurnya. Dengan kata lain, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu alat ukur. Suatu alat ukur yang sah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Menurut Iskandar (2017a:130-131) ada dua kriteria untuk menyusun pengukuran yang baik, yaitu pertama, ukuran harus menggambarkan secara tepat kegiatan sosial yang nyata. Kedua, besarnya jawaban-jawaban yang sama dalam setiap waktu dan dapat dipergunakan dalam berbagai situasi. Kriteria pertama dinamakan validitas dan kriteria kedua dinamakan reliabilitas.

Tujuan dari pengujian validitas alat ukur adalah supaya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid, sehingga tujuan dari penelitian bisa tercapai sesuai harapan. Pengujian validitas dilakukan sebagai berikut :

- a. Uji Validitas konseptual, yang terdiri dari uji validitas isi atau validitas muka, uji validitas prediktif dan concurrent serta uji validitas konstrak, untuk lebih jelaskan penulis uraikan sebagai berikut :
  - 1). Uji Validitas Isi yaitu merupakan tipe validitas kuantitatif. Item-item itu harus mencakup dalam ukuran sehingga mencerminkan kemampuan-kemampuan dan tujuan orang yang melakukan pengujian atau pengalaman pribadi dan latar belakang profesi mereka.
  - 2). Uji Validitas Prediktif dan *Concurrent* yaitu validitas yang didasarkan pada aturan hubungan antara bagaimana alat ukur meramalkan perilaku yang terjadi dengan akibat perilaku yang dilakukan individu atau kelompok.

- 3). Uji Validitas Konstrak berguna untuk mengukur karakter / sifat misalnya keagresifan yang tersembunyi / atau laten. Magnuson dalam Iskandar (2017a ; 161) Validitas Konstrak secara umum ditentukan melalui aplikasi dari faktor analisis terhadap suatu pengukuran instrument.
- b. Uji Validitas Lapangan, yang dilaksanakan terhadap sampel populasi, supaya alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid.

Pengujian validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rumus korelasi *Product Moment Pearson* (Iskandar, 2017) dengan rumus berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] - [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi  
 $\sum X$  = Jumlah skor tiap item ke-i  
 $\sum Y$  = Total seluruh item  
n = Jumlah responden

Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ( r ) dilakukan uji pada taraf nyata (  $\alpha$  ) sebesar 0,05 dan derajat kebebasan ( dk ) yaitu n – 2 dengan rumus (Iskandar, 2017):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t = Nilai t hitung  
r = koefisien korelasi hasil hitung  
n = Jumlah responden

Kaidah keputusan sebagai berikut:

- a. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka alat ukur penelitian dinyatakan valid.
- b. Jika  $t$  hitung  $\leq$   $t$  tabel, maka alat ukur penelitian dinyatakan tidak valid.

Secara operasional, pengujian validitas alat ukur penelitian dilakukan melalui uji coba terhadap 20 orang responden yang mewakili kelompok populasi. Secara statistik, jumlah responden sebesar itu sudah memadai untuk menentukan validitas alat ukur penelitian karena akan menghasilkan distribusi skor mendekati kurva normal. Jika alat ukur valid, maka selanjutnya dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 -0,599	Sedang
0,60 -0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber; Sugiyono, 2014

Adapun hasil pengujian validitas lapangan terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner/angket dari masing-masing variabel hasilnya sebagai berikut:

1) Uji validitas variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X)

Alat ukur variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X) telah diuji validitasnya dari total 46 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 1 sampai 46). Hasil uji validitas variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Uji Validitas Variabel X**  
**(Kepemimpinan Kepala Desa)**



<b>Nomor Item</b>	<b>Nilai Korelasi (r hitung)</b>	<b>Nilai t hitung</b>	<b>Nilai t tabel</b>	<b>Ket</b>
1	0.585	3.057	2.101	Valid
2	0.602	3.198	2.101	Valid
3	0.651	3.638	2.101	Valid
4	0.812	5.908	2.101	Valid
5	0.899	8.719	2.101	Valid
6	0.602	3.198	2.101	Valid
7	0.486	2.362	2.101	Valid
8	0.812	5.908	2.101	Valid
9	0.729	4.513	2.101	Valid
10	0.899	8.719	2.101	Valid
11	0.651	3.638	2.101	Valid
12	0.651	3.638	2.101	Valid
13	0.602	3.198	2.101	Valid
14	0.651	3.638	2.101	Valid
15	0.812	5.908	2.101	Valid
16	0.899	8.719	2.101	Valid
17	0.602	3.198	2.101	Valid
18	0.486	2.362	2.101	Valid
19	0.812	5.908	2.101	Valid
20	0.729	4.513	2.101	Valid
21	0.899	8.719	2.101	Valid
22	0.651	3.638	2.101	Valid
23	0.651	3.638	2.101	Valid
24	0.899	8.719	2.101	Valid
25	0.602	3.198	2.101	Valid
26	0.486	2.362	2.101	Valid
27	0.812	5.908	2.101	Valid
28	0.729	4.513	2.101	Valid
29	0.899	8.719	2.101	Valid
30	0.651	3.638	2.101	Valid
31	0.651	3.638	2.101	Valid
32	0.899	8.719	2.101	Valid
33	0.651	3.638	2.101	Valid
34	0.651	3.638	2.101	Valid
35	0.899	8.719	2.101	Valid
36	0.602	3.198	2.101	Valid
37	0.486	2.362	2.101	Valid
38	0.812	5.908	2.101	Valid
39	0.729	4.513	2.101	Valid
40	0.899	8.719	2.101	Valid
41	0.899	8.719	2.101	Valid

Nomor	Nilai	Nilai	Nilai	Ket
42	0.812	5.908	2.101	Valid
43	0.729	4.513	2.101	Valid
44	0.899	8.719	2.101	Valid
45	0.711	4.294	2.101	Valid
46	0.476	2.298	2.101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

## 2) Uji validitas variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Alat ukur variabel Partisipasi Masyarakat (Y) telah diuji validitasnya dari total 34 butir item pertanyaan/ Pernyataan (nomor item 47 sampai 80). Hasil uji validitas variabel Partisipasi Masyarakat (Y) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Y**  
**(Partisipasi Masyarakat)**

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Ket
47	0.731	4.545	2.101	Valid
48	0.861	7.172	2.101	Valid
49	0.861	7.172	2.101	Valid
50	0.596	3.150	2.101	Valid
51	0.731	4.545	2.101	Valid
52	0.731	4.545	2.101	Valid
53	0.861	7.172	2.101	Valid
54	0.731	4.545	2.101	Valid
55	0.861	7.172	2.101	Valid
56	0.861	7.172	2.101	Valid
57	0.596	3.150	2.101	Valid
58	0.731	4.545	2.101	Valid
59	0.731	4.545	2.101	Valid
60	0.861	7.172	2.101	Valid
61	0.596	3.150	2.101	Valid
62	0.731	4.545	2.101	Valid
63	0.731	4.545	2.101	Valid
64	0.731	4.545	2.101	Valid
65	0.861	7.172	2.101	Valid
66	0.731	4.545	2.101	Valid
67	0.861	7.172	2.101	Valid

Nomor	Nilai	Nilai	Nilai	Ket
68	0.861	7.172	2.101	Valid
69	0.889	8.247	2.101	Valid
70	0.614	3.301	2.101	Valid
71	0.654	3.664	2.101	Valid
72	0.596	3.150	2.101	Valid
73	0.791	5.487	2.101	Valid
74	0.614	3.301	2.101	Valid
75	0.731	4.545	2.101	Valid
76	0.614	3.301	2.101	Valid
77	0.825	6.201	2.101	Valid
78	0.614	3.301	2.101	Valid
79	0.861	7.172	2.101	Valid
80	0.596	3.150	2.101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3) Uji validitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)

Alat ukur variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)

telah diuji validitasnya dari total 28 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 81 sampai 108). Hasil uji validitas variabel Efektivitas Pelaksanaan

Program Pembangunan Desa (Z) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Z**  
**(Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa)**

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Ket
81	0.769	5.112	2.101	Valid
82	0.823	6.157	2.101	Valid
83	0.773	5.168	2.101	Valid
84	0.774	5.188	2.101	Valid
85	0.793	5.513	2.101	Valid
86	0.781	5.303	2.101	Valid
87	0.820	6.089	2.101	Valid
88	0.823	6.157	2.101	Valid
89	0.698	4.140	2.101	Valid
90	0.765	5.042	2.101	Valid
91	0.790	5.472	2.101	Valid
92	0.820	6.089	2.101	Valid

93	0.823	6.157	2.101	Valid
94	0.773	5.168	2.101	Valid
95	0.774	5.188	2.101	Valid
96	0.793	5.513	2.101	Valid
97	0.781	5.303	2.101	Valid
98	0.502	2.464	2.101	Valid
99	0.781	5.303	2.101	Valid
100	0.820	6.089	2.101	Valid
101	0.823	6.157	2.101	Valid
102	0.502	2.464	2.101	Valid
103	0.820	6.089	2.101	Valid
104	0.823	6.157	2.101	Valid
105	0.502	2.464	2.101	Valid
106	0.743	4.710	2.101	Valid
107	0.823	6.157	2.101	Valid
108	0.769	5.112	2.101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Selain harus valid, alat ukur penelitian juga harus handal (*reliable*). Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur penelitian memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu alat ukur dipakai berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur tersebut reliabel atau handal. Dengan demikian reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur penelitian dalam mengukur gejala yang sama (Sugiyono, 2014:102).

Menurut Iskandar (2017:166) bahwa reliabilitas suatu instrumen pengukuran sebagai suatu kemampuan instrumen guna mengukur secara konsisten terhadap fenomena yang dirancang untuk diukur. Pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini menggunakan pendekatan *Alpha Cronbach* dengan tahapan berikut:

1. Penentuan nilai koefisien korelasi (  $r$  )

Untuk menentukan nilai koefisien korelasi (  $r$  ) digunakan rumus berikut:

$$r = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{S_i^2}{S_t^2} \right\}$$

Rumus menghitung  $S_i^2$  dan  $S_t^2$

$$S_i^2 = \frac{JK_i}{n} - \frac{JK_s}{n^2}$$

$$S_t^2 = \frac{\sum X_i^2}{n} - \frac{(\sum X_i)^2}{n^2}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

k = Jumlah item

$JK_i$  = Penjumlahan dari kuadrat seluruh skor tiap item

$JK_s$  = Penjumlahan dari kuadrat jumlah skor tiap item

$X_i$  = Skor masing-masing responden

## 2. Penentuan nilai $t_{hitung}$

Untuk menentukan  $t_{hitung}$  menggunakan persamaan:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

## 3. Kaidah keputusan

Nilai  $t_{hitung}$  yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat  $\alpha$  tertentu dan derajat bebas (dk) sebesar  $n-2$ . Kaidah keputusan diambil dengan kaidah sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka alat ukur yang digunakan reliabel
- b. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel

Adapun hasil pengujian reliabilitas terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisioner/angket dari masing-masing variabel menggunakan sampel sebanyak 20 responden dengan hasil sebagai berikut:

1) Uji reliabilitas variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel X**  
**(Kepemimpinan Kepala Desa)**

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
		1	0.793
2	0.729	Varians Instrumen	32.117
3	0.606	Alpha	0.979
4	0.800	$t_{hitung}$	20.279
5	0.606	$t_{tabel}$	2.101
6	0.729	Keputusan	Reliabel
7	0.736	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka alat ukur yang digunakan reliabel	
8	0.800		
9	0.839	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel	

<b>Nomor</b>	<b>Varians</b>	<b>Hasil Perhitungan</b>
10	0.606	yang digunakan tidak reliabel
11	0.606	
12	0.606	
13	0.729	
14	0.606	
15	0.800	
16	0.606	
17	0.729	
18	0.736	
19	0.800	
20	0.839	
21	0.606	
22	0.606	
23	0.606	
24	0.606	
25	0.729	
26	0.736	
27	0.800	
28	0.839	
29	0.606	
30	0.606	
31	0.606	
32	0.606	
33	0.606	
34	0.606	
35	0.606	
36	0.729	
37	0.736	
38	0.800	
39	0.839	
40	0.606	
41	0.606	
42	0.800	
43	0.839	
44	0.606	
45	0.871	
46	0.623	

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

2) Uji reliabilitas variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Partisipasi Masyarakat (Y) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Partisipasi Masyarakat (Y) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y**  
**(Partisipasi Masyarakat)**

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
47	0.796	Varians Total	468.6 35
48	0.784	Varians Instrumen	26.51 6
49	0.784	Alpha	0.972
50	0.432	$t_{hitung}$	17.55 2
51	0.796	$t_{tabel}$	2.101
52	0.796	Keputusan	Relia bel
53	0.784	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka alat ukur yang digunakan reliabel	
54	0.796		
55	0.784		
56	0.784	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel	
57	0.432		
58	0.796		
59	0.796		
60	0.784		
61	0.432		
62	0.796		
63	0.796		
64	0.796		
65	0.784		
66	0.796		
67	0.784		
68	0.784		
69	0.676		
70	1.307		
71	1.404		
72	0.002		



Nomor	Varians	Hasil Perhitungan
73	0.607	
74	1.307	
75	0.796	
76	1.307	
77	0.714	
78	1.307	
79	0.784	
80	0.002	

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3) Hasil uji reliabilitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z**  
**(Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa)**

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan
81	0.634	Varians Total 320.921
82	0.636	Varians Instrumen 20.053
83	0.802	Alpha 0.972
84	0.634	$t_{hitung}$ 17.627
85	0.802	$t_{tabel}$ 2.101
86	0.785	Keputusan Reliabel
87	0.763	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka alat ukur
88	0.636	yang digunakan reliabel
89	0.634	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka alat ukur

Nomor	Varians	Hasil Perhitungan
90	0.634	yang digunakan tidak reliabel
91	0.813	
92	0.763	
93	0.636	
94	0.802	
95	0.634	
96	0.802	
97	0.785	
98	0.839	
99	0.785	
100	0.763	
101	0.636	
102	0.839	
103	0.763	
104	0.636	
105	0.839	
106	0.630	
107	0.492	
108	0.634	

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

### 3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel

#### 3.6.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:80), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya". Sedangkan sampel bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian dan pengujian data.

Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah populasi terbatas yaitu populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.

Pengambilan populasi sebagai objek penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara hierarki merupakan unsur pemerintahan terendah atau terkecil adalah Rukun Tetangga (RT).
2. Rukun Tetangga (RT) mengetahui adanya program atau kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa.
3. Rukun Tetangga (RT) berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam wilayahnya sehingga mengetahui keterlibatan/partisipasi warganya.

Berdasarkan substansi penelitian yang dilakukan, sasaran populasi dalam penelitian ini adalah individu yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Populasi Penelitian**

No	Desa	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Bojong	13	26
2	Bojong Kidul	10	20
3	Jatimulya	13	49
4	Mancagahar	9	41
5	Mandalakasih	15	48
6	Paas	13	39
7	Pameungpeuk	15	49
8	Sirnabakti	14	35
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>307</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Pameungpeuk, 2017.

### 3.6.2 Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2014:73). Dalam suatu penelitian tidak selalu perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena memakan biaya yang sangat besar, terbatasnya tenaga ahli serta memerlukan waktu yang lama, maka untuk

mewakili populasi tersebut menggunakan sampel yang dapat dipandang representatif dan tidak bias (Iskandar, 2017:230).

*Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2014:73). Dalam penelitian ini tidak mengambil seluruh anggota populasi, namun menggunakan *sampling* dengan menggunakan teknik non-probabilitas dan *Cluster Random Sampling*. Penggunaan *sampling* secara non probabilitas menurut Sekaran (2006:135-136) karena suatu pertimbangan tertentu yang memungkinkan mendapatkan data yang sesuai dan alasan pengambilan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti.

Sedangkan *Cluster Random Sampling* adalah teknik penarikan sampel yang terlebih dahulu mengolong-golongkan dalam kelompok yang sejenis, kemudian dirandom dari setiap golongan tersebut secara proporsional (dalam Sudrajat dan Achyar, 2012:81).

Untuk kepentingan penelitian ini maka unit analisis sebagai sampel penelitian (responden) adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk dengan pertimbangan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan unsur pemerintahan yang dekat dengan pemerintahan desa sehingga dapat mengetahui program atau kegiatan Kepala Desa.

Umar (2013:78) menjelaskan untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan metode Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Ukuran populasi

n = Ukuran sampel

e = Nilai kritis (toleransi) sebesar 10%

Berdasarkan rumus tersebut, maka ditarik sampel atas populasi dalam penelitian ini dengan nilai kritis (e) yang ditetapkan sebesar 10 % sebagai berikut:

$$n = \frac{307}{1 + (307 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{307}{4,07}$$

$$n = 75,43 \approx 76$$

Hasil *sampling* dengan rumus Slovin yang digunakan maka sebaran sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Sebaran Sampel Penelitian**

No	Desa	Populasi (unit)	Perhitungan	Sampel (unit)
1	Bojong	26	$(26 : 307) \times 76$	7
2	Bojong Kidul	20	$(20 : 307) \times 76$	5
3	Jatimulya	49	$(49 : 307) \times 76$	12
4	Mancagahar	41	$(41 : 307) \times 76$	10
5	Mandalakasih	48	$(48 : 307) \times 76$	12
6	Paas	39	$(39 : 307) \times 76$	9
7	Pameungpeuk	49	$(49 : 307) \times 76$	12
8	Sirabakti	35	$(35 : 307) \times 76$	9
		<b>307</b>	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>

Sumber: Hasil Olah Data, 2017.

### 3.7 Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Proses

#### Pengumpulan Data

##### 3.7.1 Jenis dan Sumber Data

Berikut adalah klasifikasi jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama, yaitu jawaban responden dengan bentuk angket/kuesioner dan data hasil

wawancara serta hasil observasi peneliti berupa data keadaan tentang Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.

- b. Data Sekunder, berupa dokumentasi-dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, literatur lainnya, yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, perda, kebijakan-kebijakan dan sebagainya.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara penyebaran angket (kuesioner) kepada responden selaku objek penelitian yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan statistik. Data primer bersumber dari hasil jawaban responden melalui kuisisioner berisikan item-item pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang disediakan untuk dijawab oleh responden sebagai objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang diterbitkan para pihak yang berkompeten berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder bersumber dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen dan publikasi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek penelitian, antara lain Kantor Kecamatan Pameungpeuk, BPD Kecamatan Pameungpeuk, BPS Kabupaten Garut, perpustakaan, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

### **3.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui :

1. Studi lapangan (*Field Research*)

Yaitu meneliti secara langsung variabel-variabel objek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dengan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan keperluan penelitian terutama mengenai Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameunngpeuk.
- b. Angket/ Kuesioner, melakukan penyebaran angket/ kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis dengan disertai lima alternatif jawaban untuk setiap item pertanyaan, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Data yang dikumpulkan dengan teknik ini akan memberikan kontribusi sangat besar dalam mendeskripsikan hasil penelitian.
- c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung/dialog dengan responden berkaitan dengan masalah penelitian guna memperoleh data yang tidak dapat dilakukan melalui observasi atau studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dijadikan informan/responden penelitian untuk menggali tentang Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameunngpeuk.

## 2. Studi dokumentasi/ kepustakaan

Yaitu pengambilan data sekunder dengan menggali dan mencari beberapa dokumen tentang: (a) data profil Desa dan Kecamatan Pameungpeuk, (b) data program-program yang dilaksanakan Kepala Desa di Kecamatan Pameungpeuk, dan (c) dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

### **3.7.3 Proses Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuisisioner) yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (September 2017) meliputi :
  - a. Mengurus surat-surat perijinan yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai media pemberitahuan kepada para pihak dalam penelitian.
  - b. Melakukan uji validitas dan realibilitas terhadap alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian.
  - c. Melakukan rekrutmen tenaga pengumpul data, direncanakan 5 orang.
  - d. Memberikan pelatihan kepada tenaga pengumpul data dalam hal memberikan kemampuan pengetahuan baik tentang objek penelitian ataupun tentang apa yang akan diteliti, kecakapan melakukan riset terutama dalam keterampilan melakukan wawancara, membuat laporan dan keterampilan dalam berkomunikasi, serta sikap positif sebagai seorang ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan, responden dan masalah yang dihadapi.



- e. Melaksanakan uji coba teknik pengumpulan data ke lapangan oleh tim pengumpul data untuk mengestimasi waktu pengumpulan data.
  - f. Memperbanyak alat ukur penelitian sesuai dengan jumlah sampel.
  - g. Membuat kerangka sampling dan daftar nama serta identitas responden untuk memudahkan penyebaran kuisioner.
2. Tahap pelaksanaan (Oktober 2017) meliputi :
- a. Menyusun jadual kegiatan pengumpulan data variabel-variabel penelitian yang akan dilakukan oleh tim pengumpul data.
  - b. Memberitahukan jadual kegiatan pengumpulan data kepada responden.
  - c. Melaksanakan pengumpulan data di lapangan sesuai dengan jadual kegiatan pengumpulan data.
3. Tahap evaluasi dan terminasi (Oktober 2017) meliputi :
- a. Melakukan evaluasi melalui pengamatan proses pengumpulan data dan mengawasi tenaga pengumpul data untuk mengetahui capaian sasaran dan sesuai dengan jadual penelitian.
  - b. Melakukan penyelesaian pengumpulan data berdasarkan evaluasi.
  - c. Melakukan persiapan mengakhiri penelitian di lokasi/lapangan, selanjutnya mengakhiri proses pengumpulan data.
  - d. Melakukan proses pengolahan data hasil dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan.
4. Tahap tindak lanjut (November 2017).
- Langkah ini untuk menindaklanjuti fase evaluasi terhadap masalah yang ditemukan dan mencari pemecahannya dalam pengumpulan data.

5. Tahap pengakhiran (Desember 2017).

Merupakan langkah terakhir dari proses pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pemeriksaan akhir ke lapangan untuk memastikan seluruh kuesioner telah diisi dan dikembalikan kepada peneliti dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses analisis data.

### **3.8 Teknik Pengolahan serta Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian**

#### **3.8.1 Teknik Pengolahan Data**

Dari hasil pengumpulan data yang akan dilakukan di lapangan, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan makna untuk menjawab masalah yang diteliti dan dapat menarik beberapa kesimpulan yang tepat terhadap hasil penelitiannya (Iskandar, 2017:279).

Sementara data yang diperoleh dari data primer, pengolahan datanya melalui proses:

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan pengumpulan data dan penyuntingan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang benar-benar otentik.
2. *Coding*, yaitu melakukan penggolongan, pengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempermudah proses analisis data.

3. *Tabulating* yaitu menyusun data dalam bentuk tabel untuk digunakan dalam mengolah data kedalam tabel-tabel tertentu serta mengaturnya untuk keperluan analisis data dan pengujian hipotesis.

### 3.8.2 Proses Transformasi Data

Mengingat data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal sedangkan analisis data memerlukan data interval, maka terlebih dahulu data mentah yang telah terkumpul ditransformasikan menjadi data interval melalui metode MSI (*Method Successive Interval / Scale Value*) yaitu teknik penskalaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat pengukuran dari data ordinal ke interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung frekuensi jawaban dari masing-masing item pertanyaan.
2. Menentukan rasio proporsi melalui frekuensi dibagi jumlah responden.
3. Menghitung proporsi kumulatif yaitu menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respons atau jawaban.
4. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.
5. Tentukan nilai interval (*scale value*) untuk setiap nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SV(\text{Scale Value}) = \frac{(\text{Density At Lower Limit}) - (\text{Density At Upper Limit})}{(\text{Area Under Upper Limit}) - (\text{Area Under Lower Limit})}$$

6. Hitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan :  $SV_{\text{Transformasi}} = SV - SV_{\text{Minimum}} + 1$

### 3.8.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Selanjutnya data yang telah diolah diidentifikasi untuk menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah dan hipotesis yang diajukan maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis statistik dengan rumus *Path Analysis*. Iskandar (2017: 32) mengemukakan bahwa analisis jalur dimaksudkan untuk menguji hipotesis hubungan kausalitas (sebab akibat dan pengaruh).

Adapun langkah-langkah pengujian data dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun matriks korelasi (R) antar variabel dengan variabel terikat (Z) serta variabel antara (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X) serta faktor luar yang tidak teridentifikasi sebagai berikut :

$$R = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ & r_{yy} & r_{zy} \\ & & r_{zz} \end{bmatrix}$$

$$r_{X_1X_i} = \frac{n \sum X_i X_i - \sum X_i \sum X_i}{\sqrt{\left\{ n \sum X_i^2 - \left[ \sum X_i \right]^2 \right\} \left\{ n \sum X_i^2 - \left[ \sum X_i^2 \right] \right\}}}$$

2. Menguji koefisien jalur  $P_{YX_i}$

**Hipotesis statistik :**

$H_0 : P_{yix_i} \leq 0$  artinya pengaruh variabel  $X_i$  terhadap  $Y_i$  tidak signifikan

$H_1 : P_{yix_i} > 0$  artinya pengaruh variabel  $X_i$  terhadap  $Y_i$  signifikan

**Statistik Uji :**

$$t = \frac{Px_i x_i}{\sqrt{\frac{1 - P^2 x_i x_i}{n - 2}}} \quad \text{dimana } P_{x_i x_i} = r x_i x_i$$

**Kriteria Uji :**

Tolak  $H_0$  apabila  $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

3. Membuat invers korelasi ( $R^{-1}$ )

$$R^{-1} \begin{bmatrix} C_{xx} & C_{yx} & C_{zx} \\ & C_{yy} & C_{zy} \\ & & C_{zz} \end{bmatrix}$$

## 4. Menghitung besarnya pengaruh

$$P_{ZX} = \frac{-C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZXY}^2 = P_{ZX} r_{ZY} + P_{ZY} r_{ZY}$$

Menguji hipotesis keberartian koefisien jalur:

$H_0 : P_{ZX} \leq 0$  melawan  $H_0 : P_{ZX} > 0$

$H_0 : P_{ZY} \leq 0$  melawan  $H_0 : P_{ZY} > 0$

**Statistik Uji :**

$$t_x = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

$$t_y = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

**Kriteria Uji :**

Tolak  $H_0$  apabila  $t > t_{(1-\alpha)(n-k-1)}$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

## 5. Menentukan besar pengaruh variabel lain

Besar pengaruh variabel lain terhadap variabel Z

$$P_{X\epsilon 2} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

$$P_{X\epsilon 1} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

## 6. Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung

## a. Pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZY} = r_{ZY} + r_{ZX}$$

## b. Pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZXY} = P_{Zx} P_{YX} P_{ZY}$$

## c. Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z

$$Z = P_{ZY} + P_{ZXY}$$

## d. Pengaruh langsung variabel Y terhadap variabel Z

$$P_{ZY} = r_{ZY} r_{ZY}$$

**3.9 Lokasi, Jadwal Waktu dan Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap para Ketua Rukun Tetangga (RT) di desa-desa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebagaimana dinyatakan dalam sampel penelitian. Penelitian ini akan berlangsung mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan April 2018 dengan langkah-langkah dan jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Jadwal Waktu Penelitian dan Langkah-Langkah Penelitian**

No	Kegiatan	2017								2018			
		Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mrt	Apr
1	Memilih masalah penelitian												
2	Melakukan studi pustaka												
3	Merumuskan masalah penelitian												
4	Menyusun usulan penelitian												
5	Melakukan seminar usulan penelitian												
6	Perbaikan usulan penelitian												
7	Melakukan uji validitas dan reliabilitas												
8	Proses pengumpulan data												
9	Pengolahan dan analisis data												
10	Penyusunan hasil penelitian/tesis												
11	Ujian sidang tesis												
12	Perbaikan tesis												
13	Publikasi tesis												

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada sebuah penelitian pengamatan langsung di lapangan terhadap objek penelitian sangat diperlukan agar seorang peneliti dapat mengetahui secara jelas tentang objek penelitiannya baik mengenai ciri-ciri fisik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun kondisi sosio historis (kultur masyarakat). Hal ini dipandang perlu karena dapat membantu memberikan informasi dalam rangka mengungkapkan fakta-fakta autentik yang dapat mempermudah proses analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang baik tentunya harus mampu menghasilkan data-data yang diperlukan secara akurat dan komprehensif. Data-data tersebut tidak sekedar merupakan data primer, tetapi juga merupakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan pendapat publik baik melalui wawancara maupun pengisian kuesioner, akan tetapi juga harus dilengkapi dengan data-data berdasarkan pengamatan di lapangan sehingga dapat mensinkronkan antara data primer dan data sekunder sebagai informasi yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian secara komprehensif.

Pada penelitian ini, diuraikan terlebih dahulu tentang gambaran umum objek penelitian pada tataran yang berkaitan dengan masalah penelitian agar mempermudah melakukan pembahasan atas data-data yang terkumpul dari responden



#### **4.1.1 Permasalahan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Garut**

Pada saat sekarang ini partisipasi masyarakat bukanlah barang yang mudah untuk kita temukan. Hanya sebuah wacana belaka semangat otonomi daerah, yang mengharuskan masyarakatnya berpartisipasi aktif. Hal ini dimungkinkan karena adanya pergeseran perilaku dan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Sistem gotong royong yang selama ini menjadi ikon bangsa Indonesia sudah menjadi barang yang mahal untuk kita temui di masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena pembangunan daerah merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Apabila mekanisme yang aspiratif dan partisipatif ini dapat dikembangkan dalam kerangka pembangunan daerah berkelanjutan, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.

Di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dengan harapan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik di daerah selalu berpihak pada kepentingan rakyat,
- b. Kebijakan publik di daerah sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat,
- c. Kebijakan publik di daerah dapat menumbuhkan semangat persatuan,
- d. Kebijakan publik di daerah dapat menimbulkan semangat bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi pembangunan warga masyarakat Kabupaten Garut masih rendah, yaitu sebesar

4% dari total pembangunan. Secara garis besar, permasalahan partisipasi pembangunan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi membutuhkan kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan dengan ikut serta dalam pengambil keputusan namun kenyataan di lapangan kesadaran yang dimiliki masyarakat masih rendah.
- b. Kepekaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan masih rendah.
- c. Tingkat inisiatif yang dimiliki masyarakat masih rendah, padahal partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu,
- d. Proses dialog antara masyarakat setempat dengan para stakeholder dalam melakukan persiapan pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak social belum berjalan dengan baik. Masyarakat belum memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan perubahan yang ditentukan sendiri, guna meningkatkan kesejahteraan.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan masih rendah,

#### **4.1.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara teknis operasional diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Garut. Perda tersebut dirinci kembali dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 433 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.

Tujuan dibuatnya peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa tersebut adalah untuk menjadi pedoman dan sebagai rujukan hukum (*rule of law*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Garut sejalan dengan kerangka tujuan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut serta dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Selain tujuan tersebut, hal ini juga bermanfaat bagi para pihak yang menjadi *leading sector* atau penanggung jawab dalam upaya pembinaan terhadap pemerintah desa di Kabupaten Garut. Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, yang berbunyi: "Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridho Allah SWT", maka isu strategis yang dapat menjadi bahan perumusan arah kebijakan utama (*core policy*) antara lain sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- b. Reformasi birokrasi dan Tataan Pemerintahan
- c. Perluasan kesempatan lapangan kerja
- d. Penataan struktur pemerintahan daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani,

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Garut tersebut, maka kebijakan yang dilakukan dalam perwujudan dari visi tersebut diantaranya adalah:

1. Mengembangkan birokrasi yang professional dan akuntabel,
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi,
3. Meningkatkan sinergitas manajemen kepegawaian yang akurat dan akuntabel berbasis teknologi informasi,
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai,
5. Meningkatkan kerjasama dan kinerja pegawai dalam pembangunan.

#### **4.1.3 Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Kabupaten Garut pun telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang mengamanatkan, khususnya pada Pasal 15 untuk mengatur lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peneliti menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Garut cukup responsif dalam membuat regulasi turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena dalam peraturan dirnaksud mengamanatkan 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan harus sudah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Seperti diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan pada Tanggal 31 Desember 2015, sedangkan Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan pada

tanggal 4 Agustus 2016 sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan regulasi turunan yang dapat mengakibatkan stagnasi pelaksanaan Pemerintahan Desa pada wilayah Kabupaten Garut.

Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Desa memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban serta partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; serta
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sekretaris Desa memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana dan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan serta administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya, serta
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

### **3. Kepala Urusan**

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Urusan memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas serta pelayanan umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan serta administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan Perencanaan, seperti menyusun rencana APBDesa, menginventansir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

### **4. Kepala Seksi**

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Seksi memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:



- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - 1. Pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - 2. Penyusunan rancangan regulasi Desa;
  - 3. Pembinaan masalah pertanahan;
  - 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - 6. Pelaksanaan kependudukan;
  - 7. Penataan dan pengelolaan wilayah; serta
  - 8. Pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - 1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
  - 2. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, serta
  - 3. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
  
- c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
  - 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; serta
  - 3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

## **5. Kepala Dusun**

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Dusun memiliki fungsi, yaitu :

- a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; serta
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **4.2 Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) sebanyak 76 orang yang berada di 8 Desa dalam wilayah Kecamatan Pamenungpeuk sebagai pihak yang mengetahui dan melaksanakan program pembangunan desa. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan umur, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

#### **4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), dapat diperoleh informasi mengenai sebaran umur responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	31 - 35 tahun	2	2.63
2	36 - 40 tahun	9	11.84
3	41 - 45 tahun	11	14.47
4	46 - 50 tahun	14	18.42
5	51 - 55 tahun	19	25.00
6	> 55 tahun	21	27.63
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>76</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dengan usia lebih dari 55 tahun merupakan proporsi responden terbesar dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 21 orang atau sebesar 27,63% dari keseluruhan responden, sedangkan responden dengan rentang usia antara 31 sampai 35 tahun merupakan proporsi responden terkecil yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 2,63% dari keseluruhan responden.

Gambaran ini mengindikasikan bahwa kondisi rata-rata responden dari segi usia merupakan aspek yang penting dan berpengaruh terhadap aktivitas pekerjaan, dan usia berhubungan erat dengan kekuatan fisik yang akan menentukan kemampuan dan produktivitas kerja. Dengan proporsi usia responden yang sudah berada pada tingkat dewasa maka dianggap responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kusioner.

#### **4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), dapat diperoleh informasi mengenai

sebaran pendidikan terakhir responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SMP / sederajat	13	17.11
2	SMA / sederajat	47	61.84
3	Diploma (D3)	4	5.26
4	Sarjana (S1)	9	11.84
5	Magister (S2)	3	3.95
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.2, tingkat pendidikan yang dimiliki responden menunjukkan sebanyak 47 orang atau 61,84% memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat. Terbesar kedua memiliki pendidikan Sekolah Menengah/sederajat yaitu 13 orang atau 17,11%, sedangkan sisanya untuk tingkat pendidikan Diploma dengan jumlah 4 orang atau 5,267%, dan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 9 orang atau 11,84% dan Magister sebanyak 3 orang atau 3,95%.

Pendidikan dapat membentuk dasar pemikiran responden untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan dan menerapkan manajemen yang baik dalam melakukan pekerjaannya.. Latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan individu menerima dan mereduksi informasi yang didapatkan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, akan semakin meningkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Kesimpulannya dengan proporsi latar belakang pendidikan di atas maka dianggap responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kusioner.

### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Ketua ukun Tetangga (RT), dapat diperoleh informasi mengenai sebaran masa kerja dari responden. Informasi hasil tanggapan responden tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	< 5 tahun	9	11.84
2	5 - 10 tahun	25	32.89
3	11 - 15 tahun	19	25.00
4	> 15 tahun	23	30.26
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja antara 5 -10 tahun sebanyak 25 orang atau 32,89% merupakan proporsi responden terbanyak. Terbesar kedua yaitu responden dengan masa kerja lebih dari 15 tahun atau 30,26%, sedangkan yang terendah yaitu responden yang memiliki masa kerja dengan rentang waktu kurang dari 5 tahun. Kemudian sisanya untuk rentang masa antara 11 – 15 tahun sejumlah 19 orang atau 25,00%

Masa kerja merupakan refleksi pengalaman seseorang mengabdikan dirinya, artinya semakin lama masa kerja responden akan menentukan kemampuan responden dalam menjalankan perannya. Berdasarkan kondisi masa kerja responden yang berdurasi cukup lama maka dianggap responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kusioner.

## 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 76 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah responden adalah 76 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
  - a. Jumlah kumulatif nilai terbesar =  $76 \times 5 = 380$
  - b. Jumlah kumulatif nilai terkecil =  $76 \times 1 = 76$
  - c. Nilai Persentase terbesar adalah  $= (380/380) \times 100\% = 100\%$
  - d. Nilai persentase terkecil =  $(76/380) \times 100\% = 20\%$ ,
  - e. Dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang =  $100\% - 20\% = 80\%$  dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar  $= (80\%)/5 = 16\%$  sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase**

No	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	20 - 35,99	Sangat Kurang Baik/Sangat Rendah

2	36 - 51,99	Kurang Baik/Rendah
3	52 - 67,99	Cukup Baik/Cukup
4	68 - 83,99	Baik/Tinggi
5	84 - 100	Sangat Baik/Sangat Tinggi

Sumber: Peneliti, 2018

#### 4.3.1 Variabel Kepemimpinan Kepala Desa

Untuk mengetahui kondisi variabel Kepemimpinan Kepala Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 46 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 46 pernyataan tentang Kepemimpinan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Kriteria Penilaian Kepemimpinan Kepala Desa**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pimpinan dalam memberikn informasi dan pengarahan melalui komunikasi yang baik dan jelas	317	83.42	Baik
2	Pimpinan menggunakan tata bahasa yang baik dalam kegiatan pertemuan dengan para Ketua Rukun Tetangga	297	78.16	Baik
3	Pimpinan dapat berbaur dan berinteraksi dengan baik terhadap masyarakatnya	290	76.32	Baik
4	Pimpinan dapat memenuhi undangan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat	309	81.32	Baik
5	Pimpinan dapat memahami jika bawahannya menemui permasalahan dalam pelaksanaan program.	270	71.05	Baik
6	Pimpinan memberikan solusi kepada bawahannya agar pelaksanaan program berjalan dengan baik	287	75.53	Baik
7	Pimpinan memberikan perhatian dan apresiasi atas kinerja para bawahan	274	72.11	Baik
8	Pimpinan memberikan perhatian dan menghargai bawahan sebagai pribadi manusia	309	81.32	Baik
9	Pimpinan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik	268	70.53	Baik
10	Pimpinan mengembangkan pola pikir para bawahannya dengan memberikan contoh bekerja secara profesional	274	72.11	Baik
11	Pimpinan merupakan motivator yang baik sebagai wujud kepemimpinannya	296	77.89	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
12	Pimpinan memberikan dorongan motivasi kepada bawahan	294	77.37	Baik
13	Pimpinan dapat mengintrospeksi diri apabila melakukan kekeliruan dalam pekerjaannya	274	72.11	Baik
14	Pimpinan melakukan perbaikan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat	295	77.63	Baik
15	Pimpinan mendorong perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik	296	77.89	Baik
16	Pimpinan menghadapi tantangan tugas dengan tetap mampu memelihara kebersamaan yang kondusif	309	81.32	Baik
17	Pimpinan dapat berfikir rasional ketika bawahan menyampaikan permasalahan pelaksanaan program	275	72.37	Baik
18	Pimpinan dapat mengambil keputusan yang rasional berkaitan dengan pelaksanaan program	294	77.37	Baik
19	Pimpinan memiliki kemampuan membujuk yang baik agar bawahannya dapat bekerja sama	271	71.32	Baik
20	Pimpinan dapat melakukan pendekatan yang baik dalam membangun semangat dan kekompakan bawahannya	287	75.53	Baik
21	Pimpinan mengadakan pertemuan/rapat untuk membahas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program	274	72.11	Baik
22	Pimpinan memberikan apresiasi terhadap aspirasi dan saran bawahan untuk kemajuan bersama	309	81.32	Baik
23	Pimpinan memiliki kemampuan melihat masalah dalam pelaksanaan program kerja	280	73.68	Baik
24	Pimpinan dapat meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam pelaksanaan program	277	72.89	Baik
25	Pimpinan dapat membuat program kerja yang mudah dimengerti oleh bawahan	297	78.16	Baik
26	Pimpinan dalam menjabarkan program-program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat	294	77.37	Baik
27	Pimpinan dapat memberi solusi kepada bawahan ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program	274	72.11	Baik
28	Pimpinan sangat simpati kepada bawahan dan memberikan arahan apabila terjadi kesalahan	270	71.05	Baik
29	Pimpinan dapat mengetahui arah dan tujuan program yang akan dilaksanakan	309	81.32	Baik
30	Pimpinan memiliki kemampuan memprediksi hasil dalam proses penyelesaian suatu program	274	72.11	Baik
31	Pimpinan dapat mencermati situasi lapangan dengan baik	287	75.53	Baik
32	Pimpinan dapat mencermati kondisi lapangan dengan baik	284	74.74	Baik
33	Pimpinan membantu kesulitan dan masalah yang dihadapi bawahan	269	70.79	Baik



No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
34	Pimpinan menciptakan iklim kerja dan komunikasi yang kondusif	294	77.37	Baik
35	Pimpinan memberitahukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya	291	76.58	Baik
36	Pimpinan memberi arahan kepada bawahan agar mampu menyelesaikan tugasnya	274	72.11	Baik
37	Pimpinan mengedepankan sikap profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya	295	77.63	Baik
38	Pimpinan mendorong bawahannya untuk berkomitmen dan profesional dalam bekerja	296	77.89	Baik
39	Pimpinan memiliki sikap yang rasional dalam melaksanakan kewajibannya	309	81.32	Baik
40	Sikap pimpinan sudah sesuai dengan azas kepatutan dan azas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	275	72.37	Baik
41	Pimpinan selalu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian program yang dilaksanakan oleh bawahannya	294	77.37	Baik
42	Pimpinan melakukan evaluasi dengan melihat langsung ke lapangan	272	71.58	Baik
43	Pimpinan dapat berinteraksi dengan baik kepada bawahan	309	81.32	Baik
44	Pimpinan dapat berinteraksi dengan baik kepada masyarakatnya	294	77.37	Baik
45	Pimpinan merupakan fasilitator yang baik dalam melaksanakan program	312	82.11	Baik
46	Pimpinan membantu memfasilitasi bawahan berkaitan pelaksanaan program	277	72.89	Baik
Jumlah			3493.68	
Rata-Rata			75.95	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.5, menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Kepemimpinan Kepala Desa memiliki kriteria baik yaitu sebesar 75,95% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut, Kepemimpinan Kepala Desa secara umum dianggap sudah baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi pada butir item nomor 1, yaitu: Pimpinan dalam memberikan informasi dan pengarahan melalui komunikasi yang baik dan jelas, sebesar 83,42%, dengan kriteria **Baik**.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada butir item nomor 9, yaitu Pimpinan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik dengan persentase sebesar 70,53% dan termasuk kriteria **Baik**.

Berdasarkan jawaban responden pada butir-butir item tersebut secara umum oleh para responden bahwa kepemimpinan Kepala Desa dianggap sudah baik. Artinya peran kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan baik serta mendapat perhatian dan apresiasi yang baik dari responden.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas dan terperinci jawaban responden dari setiap dimensi variabel Kepemimpinan Kepala Desa, rincian dan penjelasan setiap dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 4.3.1.1 Dimensi Mendengarkan

Untuk mengetahui kondisi dimensi mendengarkan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Mendengarkan**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
1	Pimpinan dalam memberikan informasi dan pengarahan melalui komunikasi yang baik dan jelas	317	83.42	Baik
2	Pimpinan menggunakan tata bahasa yang baik dalam kegiatan pertemuan dengan para Ketua Rukun Tetangga	297	78.16	Baik

3	Pimpinan dapat berbaur dan berinteraksi dengan baik terhadap masyarakatnya	290	76.32	Baik
4	Pimpinan dapat memenuhi undangan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat	309	81.32	Baik
Jumlah			319.21	
Rata-rata			79.80	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa rata-rata rata-rata jawaban responden pada dimensi mendengarkan adalah **baik**, yaitu sebesar 79,80% dari seluruh pernyataan pada dimensi tersebut. Hal tersebut dengan bentuk tindakan yang dilakukan Kepala Desa yang bersedia mendengarkan dan menampung aspirasi serta permasalahan bawahannya.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada item nomor 1 sebesar 83,42% dengan kriteria baik, yaitu Pimpinan dalam memberikan informasi dan pengarahan melalui komunikasi yang baik dan jelas, artinya Kepala Desa dalam memberikan informasi dan pengarahan menggunakan komunikasi melalui bahasa yang baik dan jelas, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dimengerti. Hal ini pun sejalan dengan pendapat Edwards (dalam Iskandar, 2017: 221) bahwa komunikasi menjadi acuan yang penting agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui secara persis yang mereka kerjakan.

Sedangkan indikator dengan persentase terendah terdapat pada item nomor 3 sebesar 76,32%, yaitu Pimpinan dapat berbaur dan berinteraksi dengan baik terhadap masyarakatnya, namun termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa disela-sela kesibukannya menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pada pemerintahan desa, Kepala Desa masih menyempatkan diri untuk

berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat walaupun tidak lama atau berkaitan dengan kunjungannya ke suatu tempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ketua RT menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki jadwal kunjungan untuk bertemu dengan warga dalam kegiatan tidak resmi seperti pengajian atau menghadiri undangan warga.

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi mendengarkan bila melihat hasil tanggapan responden dengan kriteria baik, artinya Kepala Desa melaksanakan tugasnya harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan berinteraksi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayahnya.

#### 4.3.1.2 Dimensi Empati

Untuk mengetahui kondisi dimensi empati, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Empati**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
5	Pimpinan dapat memahami jika bawahannya menemui permasalahan dalam pelaksanaan program.	270	71.05	Baik
6	Pimpinan memberikan solusi kepada bawahannya agar pelaksanaan program berjalan dengan baik	287	75.53	Baik
7	Pimpinan memberikan perhatian dan apresiasi atas kinerja para bawahan	274	72.11	Baik
8	Pimpinan memberikan perhatian dan menghargai bawahan sebagai pribadi manusia	309	81.32	Baik
Jumlah			300.00	
Rata-rata			75.00	

*Sumber: Hasil Penelitian 2018*

Hasil pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi empati, responden memberikan penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 75,00% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki rasa empati dengan memberikan perhatian dan apresiasi terhadap warganya.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item nomor 8 sebesar 81,32%, yaitu Pimpinan memberikan perhatian dan menghargai bawahan sebagai pribadi manusia dan termasuk pada kriteria baik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai individu memberikan perhatian dan menghargai bawahannya juga warganya sebagaimana dirinya sebagai pribadi manusia.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item nomor 5 sebesar 71,05%, yaitu Pimpinan dapat memahami jika bawahannya menemui permasalahan dalam pelaksanaan program, namun termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin kurang memahami bawahannya jika menemui permasalahan dalam pelaksanaan program. Hasil wawancara pun menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk memberitahukan permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan program dikarenakan kesibukan Kepala Desa.

#### **4.3.1.3 Dimensi Menyembuhkan**

Untuk mengetahui kondisi dimensi menyembuhkan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan

jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Menyembuhkan**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
9	Pimpinan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik	268	70.53	Baik
10	Pimpinan mengembangkan pola pikir para bawahannya dengan memberikan contoh bekerja secara profesional	274	72.11	Baik
11	Pimpinan merupakan motivator yang baik sebagai wujud kepemimpinannya	296	77.89	Baik
12	Pimpinan memberikan dorongan motivasi kepada bawahan	294	77.37	Baik
Jumlah			297.89	
Rata-rata			74.47	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi menyembuhkan, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 74,47% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, maka secara umum dianggap baik oleh responden. Hal ini menunjukkan Kepala Desa memberikan dorongan motivasi agar bawahannya dapat bekerja dengan baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 18 yaitu Pimpinan merupakan motivator yang baik sebagai wujud kepemimpinannya, dengan persentase 77,89% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Kepala Desa sebagai motivator bagi bawahannya karena bagaimanapun juga ketua RT sebagai bawahannya perlu dukungan dari pimpinannya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 9 yaitu Pimpinan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik, dengan

persentase 70,53%, dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan walaupun sebagai pimpinan belum tentu dapat dijadikan inspirasi oleh bawahannya karena berbagai faktor, seperti sikap atau tingkah Kepala Desa yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Hasil wawancara dengan salah seorang ketua RT menjelaskan bahwa sebagai pemimpin harus bisa memberikan teladan dan inspirasi bagi bawahannya, karena seorang pemimpin pun perlu dukungan dari bawahannya.

#### 4.3.1.4 Dimensi Kesadaran

Untuk mengetahui kondisi dimensi kesadaran, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Kesadaran**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
13	Pimpinan dapat mengintrospeksi diri apabila melakukan kekeliruan dalam pekerjaannya	274	72.11	Baik
14	Pimpinan melakukan perbaikan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat	295	77.63	Baik
15	Pimpinan mendorong perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik	296	77.89	Baik
16	Pimpinan menghadapi tantangan tugas dengan tetap mampu memelihara kebersamaan yang kondusif	309	81.32	Baik
17	Pimpinan dapat berfikir rasional ketika bawahan menyampaikan permasalahan pelaksanaan program	275	72.37	Baik
18	Pimpinan dapat mengambil keputusan yang rasional berkaitan dengan pelaksanaan program	294	77.37	Baik
Jumlah			458.68	
Rata-rata			76.45	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi kesadaran, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 76,45% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi keadaran secara umum dinilai baik oleh para responden, hal ini menunjukkan sebagai seorang pemimpin harus memiliki kesadaran akan dirinya sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin yang akan dinilai oleh bawahannya baik dalam sikap, pola pikir, dan tindakannya.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 16 yaitu Pimpinan menghadapi tantangan tugas dengan tetap mampu memelihara kebersamaan yang kondusif, dengan persentase 81,32% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan sikap yang kuat dan berani menghadapi resiko dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap menjaga kebersamaan dengan bawahan dan warganya. Peneliti pun melihat bahwa para Kepala Desa telah menyadari akan konsekuensi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk menghadapi tantangan tugas dan berusaha menjaga dan memelihara kebersamaan yang kondusif.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 13 yaitu Pimpinan dapat mengintrospeksi diri apabila melakukan kekeliruan dalam pekerjaannya, dengan persentase 72,11%, dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa tak jarang Kepala Desa ketika melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pekerjaan mau mengintrospeksinya bahkan justru mencari pembenaran atau melemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Peneliti menyimpulkan dalam dimensi kesadaran, sebagai seorang Kepala Desa sebagai



pemimpin harus memiliki kesadaran yang tinggi daripada bawahannya sebagai perwujudan kharisma seorang pemimpin.

#### 4.3.1.5 Dimensi Persuasif

Untuk mengetahui kondisi dimensi persuasif, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Persuasif**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
19	Pimpinan memiliki kemampuan membujuk yang baik agar bawahannya dapat bekerja sama	271	71.32	Baik
20	Pimpinan dapat melakukan pendekatan yang baik dalam membangun semangat dan kekompakan bawahannya	287	75.53	Baik
21	Pimpinan mengadakan pertemuan/rapat untuk membahas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program	274	72.11	Baik
22	Pimpinan memberikan apresiasi terhadap aspirasi dan saran bawahan untuk kemajuan bersama	309	81.32	Baik
Jumlah			300.26	
Rata-rata			75.07	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi persuasif, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 75,07% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi persuasif secara umum dinilai baik oleh para responden, hal ini

menunjukkan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin memiliki sikap pendekatan dan membujuk yang baik kepada bawahan dan warganya..

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 22 yaitu Pimpinan memberikan apresiasi terhadap aspirasi dan saran bawahan untuk kemajuan bersama, dengan persentase 81,32% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan sebagai seorang pimpinan harus memiliki sikap yang mengapresiasi atas aspirasi dan saran walaupun datangnya dari bawahan atau warganya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 19 yaitu Pimpinan memiliki kemampuan membujuk yang baik agar bawahannya dapat bekerja sama, dengan persentase 71,321%, dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan tidak semua Kepala Desa memiliki kemampuan membujuk yang baik terhadap bawahannya maupun warganya.

#### 4.3.1.6 Dimensi Konseptualisasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi konseptualisasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden.

Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Konseptualisasi**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
23	Pimpinan memiliki kemampuan melihat masalah dalam pelaksanaan program kerja	280	73.68	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
24	Pimpinan dapat meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam pelaksanaan program	277	72.89	Baik
25	Pimpinan dapat membuat program kerja yang mudah dimengerti oleh bawahan	297	78.16	Baik
26	Pimpinan dalam menjabarkan program-program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat	294	77.37	Baik
27	Pimpinan dapat memberi solusi kepada bawahan ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program	274	72.11	Baik
28	Pimpinan sangat simpati kepada bawahan dan memberikan arahan apabila terjadi kesalahan	270	71.05	Baik
Jumlah			445.26	
Rata-rata			74.21	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi konseptualisasi, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 74,217% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi konseptualisasi secara umum dinilai baik oleh para responden, hal ini menunjukkan Kepala Desa memiliki kemampuan konseptual dalam proses perencanaan sehingga program/kegiatan berkaitan dengan pembangunan desa mempunyai tujuan dengan indikator-indikator capaiannya.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 25 yaitu Pimpinan dapat membuat program kerja yang mudah dimengerti oleh bawahan, dengan persentase 78,16% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan kepala desa sudah memiliki konseptual yang baik dan diimplementasikan pada program kerja pembangunan desa.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 28 yaitu Pimpinan sangat simpati kepada bawahan dan memberikan arahan apabila terjadi kesalahan, dengan persentase 71,05%, dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini

menunjukkan kurangnya rasa simpati kepala desa kepada bawahan dan jarang memberikan arahan sehingga menyebabkan para ketua RT merasa enggan apabila bertemu dengan aparat desa.

#### 4.3.1.7 Dimensi Kemampuan Meramalkan

Untuk mengetahui kondisi dimensi kemampuan meramalkan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden.

Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Kemampuan Meramalkan**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
29	Pimpinan dapat mengetahui arah dan tujuan program yang akan dilaksanakan	309	81.32	Baik
30	Pimpinan memiliki kemampuan memprediksi hasil dalam proses penyelesaian suatu program	274	72.11	Baik
31	Pimpinan dapat mencermati situasi lapangan dengan baik	287	75.53	Baik
32	Pimpinan dapat mencermati kondisi lapangan dengan baik	284	74.74	Baik
Jumlah			303.68	
Rata-rata			75.92	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi kemampuan meramalkan, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 75,92% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi kemampuan meramalkan secara umum dinilai baik oleh

para responden, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dinilai memiliki kemampuan meramalkan yang baik terhadap suatu hasil program kerja atau kegiatan yang sedang dilaksanakan..

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 29 yaitu Pimpinan dapat mengetahui arah dan tujuan program yang akan dilaksanakan, dengan persentase 81,32% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dapat mengetahui arah dan tujuan program yang akan dilaksanakan sehingga dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 30 Pimpinan memiliki kemampuan memprediksi hasil dalam proses penyelesaian suatu program, dengan persentase 72,11%, dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan memprediksi hasil seorang Kepala Desa pada proses penyelesaian pekerjaan dinilai kurang oleh responden.

#### **4.3.1.8 Dimensi Kemampuan Melayani**

Untuk mengetahui kondisi dimensi kemampuan melayani, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Kemampuan Melayani**

<b>No Item</b>	<b>Item</b>	<b>Jumlah Kumulatif</b>	<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
33	Pimpinan membantu kesulitan dan masalah yang dihadapi bawahan	269	70.79	Baik

34	Pimpinan menciptakan iklim kerja dan komunikasi yang kondusif	294	77.37	Baik
35	Pimpinan memberitahukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya	291	76.58	Baik
36	Pimpinan memberi arahan kepada bawahan agar mampu menyelesaikan tugasnya	274	72.11	Baik
Jumlah			296.84	
Rata-rata			74.21	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi kemampuan melayani, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 74,21% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi kemampuan melayani secara umum dinilai baik oleh para responden, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa telah memiliki kemampuan melayani yang baik kepada bawahan dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 34 yaitu Pimpinan menciptakan iklim kerja dan komunikasi yang kondusif, dengan persentase 77,37% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan dapat berkomunikasi dengan baik pula kepada bawahannya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 33 yaitu Pimpinan membantu kesulitan dan masalah yang dihadapi bawahan, dengan persentase 70,79%, dan masih termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan temuan positif, bahwa Kepala Desa masih dapat membantu bawahannya dalam hal pengayoman dan pembimbingan berkaitan masalah bawahannya dalam pekerjaan.

#### 4.3.1.9 Dimensi Komitmen Terhadap Pekerjaan

Untuk mengetahui kondisi dimensi komitmen terhadap pekerjaan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden.

Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Komitmen Terhadap Pekerjaan**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
37	Pimpinan mengedepankan sikap profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya	295	77.63	Baik
38	Pimpinan mendorong bawahnya untuk berkomitmen dan profesional dalam bekerja	296	77.89	Baik
39	Pimpinan memiliki sikap yang rasional dalam melaksanakan kewajibannya	309	81.32	Baik
40	Sikap pimpinan sudah sesuai dengan azas kepatutan dan azas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	275	72.37	Baik
41	Pimpinan selalu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian program yang dilaksanakan oleh bawahannya	294	77.37	Baik
42	Pimpinan melakukan evaluasi dengan melihat langsung ke lapangan	272	71.58	Baik
Jumlah			458.16	
Rata-rata			76.36	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.14, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi komitmen terhadap pekerjaan, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 74,21% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi komitmen terhadap pekerjaan secara umum dinilai baik oleh para responden, hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik yang berdampak pada tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 39 yaitu Pimpinan memiliki sikap yang rasional dalam melaksanakan kewajibannya, dengan persentase 81,32% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat mampu bersikap rasional sehingga mudah berbaur dan berinteraksi dengan masyarakatnya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 40 yaitu Sikap pimpinan sudah sesuai dengan azas kepatutan dan azas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dengan persentase 72,37%, dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap kepala desa belum tentu baik semuanya tetapi tidak semuanya terkadang diluar dugaan terdapat sikap yang tidak sesuai dengan azas kepatuhan dan kepatutan.

#### 4.3.1.10 Dimensi Membangun Masyarakat

Untuk mengetahui kondisi dimensi membangun masyarakat, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden.

Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Membangun Masyarakat**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
43	Pimpinan dapat berinteraksi dengan baik kepada bawahan	309	81.32	Baik



No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
44	Pimpinan dapat berinteraksi dengan baik kepada masyarakatnya	294	77.37	Baik
45	Pimpinan merupakan fasilitator yang baik dalam melaksanakan program	312	82.11	Baik
46	Pimpinan membantu memfasilitasi bawahan berkaitan pelaksanaan program	277	72.89	Baik
Jumlah			313.68	
Rata-rata			78.42	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.15, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi membangun masyarakat, penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 78,42% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi membangun masyarakat secara umum dinilai baik oleh para responden, hal ini menunjukkan bahwa salah satu tugas Kepala Desa sebagai pemimpin adalah membangun masyarakat yang diupayakan sedemikian rupa melalui program/kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 45 yaitu Pimpinan merupakan fasilitator yang baik dalam melaksanakan program, dengan persentase 82,11% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Kepala Desa berperan juga sebagai fasilitator agar program/kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 46 yaitu Pimpinan membantu memfasilitasi bawahan berkaitan pelaksanaan program, dengan persentase 72,89%, dan masih termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepala desa memosisikan sebagai pimpinan sehingga hanya memberi perintah kepada bawahannya dalam pelaksanaan program.

### 4.3.2 Variabel Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui kondisi variabel Partisipasi Masyarakat, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 34 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 26 pernyataan tentang variabel Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Kriteria Penilaian Variabel Partisipasi Masyarakat**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
47	Masyarakat memiliki pengetahuan dalam mendalami fenomena masalah yang terjadi	294	77.37	Baik
48	Masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk mendalami permasalahan	262	68.95	Baik
49	Masyarakat dapat mengidentifikasi fenomena masalah yang terjadi di masyarakat	270	71.05	Baik
50	Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah sosial	293	77.11	Baik
51	Masyarakat memiliki kemampuan bertindak secara efektif	294	77.37	Baik
52	Masyarakat menghindari kecerobohan atau kesalahan dalam bertindak	294	77.37	Baik
53	Masyarakat yang berpartisipasi harus tercantum keanggotaannya dalam sebuah organisasi	270	71.05	Baik
54	Masyarakat yang melakukan partisipasi memiliki pengalaman berorganisasi	257	67.63	Cukup baik
55	Seringnya mengikuti pertemuan-pertemuan dapat menentukan keberhasilan dalam melahirkan partisipasi	258	67.89	Cukup baik
56	Intensitas warga dalam partisipasi dapat menentukan efektifitas pelaksanaan partisipasi	270	71.05	Baik
57	Seringnya memberikan sumbangan berupa uang/dana pembangunan sosial merupakan tindakan partisipasi	294	77.37	Baik
58	Memberikan sumbangan uang yang besar merupakan aturan dari intensitas partisipasi	270	71.05	Baik
59	Aktif terlibat dalam berbagai kepanitiaan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat	258	67.89	Cukup baik
60	Aktif terlibat dalam program pembangunan di tingkat Desa	293	77.11	Baik
61	Seorang partisipan harus mempunyai posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat	297	78.16	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
62	Kepemimpinan seorang partisipan berperan penting dalam sendi-sendi aspek kehidupan	270	71.05	Baik
63	Pemimpin di lingkungan setempat harus mengerti dan memahami permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat	294	77.37	Baik
64	Pemimpin lokal harus timbul atau lahir dari lingkungan dimana kita berada	270	71.05	Baik
65	Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu yaitu ahli di bidang pertanian pembangunan, pendidikan di lingkungan tempat berada	287	75.53	Baik
66	Seseorang yang ahli di anggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan tempat berada	270	71.05	Baik
67	Warga pendatang atau penduduk sementara yang bertugas di wilayah anda seperti bidan, dokter dianggap sebagai profesional	287	75.53	Baik
68	Mereka yang diminta kehadirannya oleh masyarakat karena keahlian yang dimilikinya seperti konsultan, penceramah, mubaliqh dianggap sebagai profesional	293	77.11	Baik
69	Mereka yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial masyarakat	312	82.11	Baik
70	Mereka yang ahli dalam konsultan bidang pembangunan mental spiritual masyarakat	270	71.05	Baik
71	Komunikasi diantara masyarakat setempat harus menggambarkan keakraban yang baik dan aktif	274	72.11	Baik
72	Pernimpin lingkungan setempat harus membangun keharmonisan dengan masyarakat	294	77.37	Baik
73	Komunikasi warga pendatang dengan masyarakat setempat harus terjalin dengan baik dan keakraban	293	77.11	Baik
74	Warga pendatang harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memudahkan dalam partisipasi	270	71.05	Baik
75	Perencanaan yang dimulai dari pencarian gagasan dan ide tentang fenomena masalah yang ada di lingkungan serta menentukan rencana strategis	286	75.26	Baik
76	Menentukan pimpnan atau perwakilan yang berminat dalam proses partisipasi di lingkungan	294	77.37	Baik
77	Warga masyarakat lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan daripada tahap permulaan	270	71.05	Baik
78	Partisipasi warga masyarakat dipandang sebagai tujuan pembangunan masyarakat	294	77.37	Baik
79	Partisipasi harus dilakukan secara terus menerus	273	71.84	Baik
80	Untuk kesinambungan partisipasi semua pimpinan masyarakat secara terbuka diundang untuk diskusi mengenai pembangunan masyarakat	297	78.16	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
	Jumlah		2518.95	
	Rata-Rata		74.09	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di 4.15, dapat dilihat bahwa penilaian jawaban responden pada variabel Partisipasi Masyarakat adalah **baik** yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 74,09% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut, yang dapat peneliti simpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat secara umum dianggap sudah baik .

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item butir 69 yaitu Mereka yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial masyarakat sebesar 82,11%. Sedangkan persentase terendah pada item nomor 54 yaitu Masyarakat yang melakukan partisipasi memiliki pengalaman berorganisasi,. sebesar 67,63% dengan kriteria cukup baik.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel Partisipasi Masyarakat, dapat dilihat pada penjelasan berikut:

#### 4.3.2.1 Dimensi Persyaratan Partisipasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi persyaratan partisipasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Persyaratan Partisipasi**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
---------	------	------------------	------------	----------

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
47	Masyarakat memiliki pengetahuan dalam mendalami fenomena masalah yang terjadi	294	77.37	Baik
48	Masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk mendalami permasalahan	262	68.95	Baik
49	Masyarakat dapat mengidentifikasi fenomena masalah yang terjadi di masyarakat	270	71.05	Baik
50	Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah sosial	293	77.11	Baik
51	Masyarakat memiliki kemampuan bertindak secara efektif	294	77.37	Baik
52	Masyarakat menghindari kecerobohan atau kesalahan dalam bertindak	294	77.37	Baik
Jumlah			449.21	
Rata-rata			74.87	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi persyaratan partisipasi, memiliki kriteria penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 74,87% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Artinya secara umum jawaban responden tersebut menilai dimensi persyaratan partisipasi dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 52 yaitu Masyarakat menghindari kecerobohan atau kesalahan dalam bertindak sebesar 77,37% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kewaspadaan dalam bertindak sehingga berusaha menghindari kecerobohan atau kesalahan. Hasil wawancara pun demikian bahwa tindakan yang diambil oleh masyarakat bersifat persuasif sedangkan tindakan yang terutama berkaitan dengan hukm maka pihak yang berwajiblah yang menangannya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 48 yaitu Masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk mendalami permasalahan, dengan persentase sebesar 68,95% dengan kriteria penilaian berdasarkan jawaban responden yaitu cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, menunjukkan bahwa belum masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga dalam mendalami permasalahanpun berbeda pula cara pendalamannya. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa perbedaan latar belakang pendidikan mempengaruhi pola pikir dan cara mendalami suatu permasalahan sehingga diperlukan suatu koordinasi agar terjalin kersama yang kompak.

#### 4.3.2.2 Dimensi Tipe-Tipe Partisipasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi tipe-tipe partisipasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden.

Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Tipe-Tipe Partisipasi**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
53	Masyarakat yang berpartisipasi harus tercantum keanggotaannya dalam sebuah organisasi	270	71.05	Baik
54	Masyarakat yang melakukan partisipasi memiliki pengalaman berorganisasi	257	67.63	Cukup baik
55	Seringnya mengikuti pertemuan-pertemuan dapat menentukan keberhasilan dalam melahirkan partisipasi	258	67.89	Cukup baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
56	Intensitas warga dalam partisipasi dapat menentukan efektifitas pelaksanaan partisipasi	270	71.05	Baik
57	Seringnya memberikan sumbangan berupa uang/dana pembangunan sosial merupakan tindakan partisipasi	294	77.37	Baik
58	Memberikan sumbangan uang yang besar merupakan aturan dari intensitas partisipasi	270	71.05	Baik
59	Aktif terlibat dalam berbagai kepanitiaan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat	258	67.89	Cukup baik
60	Aktif terlibat dalam program pembangunan di tingkat Desa	293	77.11	Baik
61	Seorang partisipan harus mempunyai posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat	297	78.16	Baik
62	Kepemimpinan seorang partisipan berperan penting dalam sendi-sendi aspek kehidupan	270	71.05	Baik
Jumlah			720.26	
Rata-rata			72.03	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tipe-tipe partisipasi memberikan tanggapan penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 72,03% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tipe-tipe partisipasi tersebut, secara umum tipe-tipe partisipasi dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 61 yaitu Seorang partisipan harus mempunyai posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, dengan persentase sebesar 78,16%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi diharapkan memiliki posisi dalam kehidupan masyarakat agar mudah dikenali dan diketahui kemampuan dirinya. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses awal dari perencanaan sampai evaluasi merupakan orang-orang yang memiliki posisi dan peran penting

dalam kehidupan masyarakat, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pembangunan..

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 54 yaitu Masyarakat yang melakukan partisipasi memiliki pengalaman berorganisasi dengan persentase sebesar 67,63% dengan kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya masyarakat yang berpartisipasi memiliki pengalaman organisasi, karena dianggap kurang mengetahui cara kerja suatu tim atau kelompok dalam proses pembangunan desa.

#### 4.3.2.3 Dimensi Tipe-Tipe Partisipan

Untuk mengetahui kondisi dimensi tipe-tipe partisipan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Tipe-Tipe Partisipan**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
63	Pemimpin di lingkungan setempat harus mengerti dan memahami permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat	294	77.37	Baik
64	Pemimpin lokal harus timbul atau lahir dari lingkungan dimana ia berada	270	71.05	Baik
65	Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu yaitu ahli di bidang pertanian pembangunan, pendidikan di lingkungan tempat berada	287	75.53	Baik
66	Seseorang yang ahli di anggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan tempat berada	270	71.05	Baik



No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
67	Warga pendatang atau penduduk sementara yang bertugas di wilayah anda seperti bidan, dokter dianggap sebagai profesional	287	75.53	Baik
68	Mereka yang diminta kehadirannya oleh masyarakat karena keahlian yang dimilikinya seperti konsultan, penceramah, mubaliqh dianggap sebagai profesional	293	77.11	Baik
69	Mereka yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial masyarakat	312	82.11	Baik
70	Mereka yang ahli dalam konsultan bidang pembangunan mental spiritual masyarakat	270	71.05	Baik
Jumlah			600.79	
Rata-rata			75.10	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Pada tabel 4.19, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tipe-tipe partisipan memberikan penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata sebesar 75,10% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tipe-tipe partisipan, secara umum dimensi dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 69 yaitu Mereka yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial masyarakat, dengan persentase 82.11% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial merupakan orang-orang yang diperlukan dalam proses pembangunan desa. Hasil wawancara pun menyatakan bahwa pekerja sosial memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian terutama dalam bidang sosial masyarakat sehingga mereka mudah berinteraksi dengan masyarakat lokal.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item pernyataan nomor 64 yaitu Pemimpin lokal harus timbul atau lahir dari lingkungan dimana ia berada sebesar 71,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin lokal belum tentu timbul atau lahir dari lingkungan tempat kita berada, karena bisa saja pemimpin lokal

adalah mereka yang berdomisili di lain tempat tetapi merupakan kelahiran di tempat asalnya, banyak contoh seperti pada saat pilkada atau sejenisnya.

#### 4.3.2.4 Dimensi Hubungan Partisipan

Untuk mengetahui kondisi dimensi hubungan partisipan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Hubungan Partisipan**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
71	Komunikasi diantara masyarakat setempat harus menggambarkan keakraban yang baik dan aktif	274	72.11	Baik
72	Pernimpin lingkungan setempat harus membangun keharmonisan dengan masyarakat	294	77.37	Baik
73	Komunikasi warga pendatang dengan masyarakat setempat harus terjalin dengan baik dan keakraban	293	77.11	Baik
74	Warga pendatang harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memudahkan dalam partisipasi	270	71.05	Baik
Jumlah			297.63	
Rata-rata			74.41	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi hubungan partisipan, penilaian responden menyatakan **baik** dengan persentase sebesar 74,41% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi hubungan partisipan tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada item butir 72 yaitu Pernimpin lingkungan setempat harus membangun keharmonisan dengan masyarakat, dengan persentase sebesar 77,37%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya pemimpin lingkungan setempat membangun keharmonisan dengan masyarakat agar terbentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan saling membantu .

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 74 yaitu Warga pendatang harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memudahkan dalam partisipasi, dengan persentase 71,05% dan berada pada kriteria baik. Pada dasarnya bila melihat hasil persentase sudah termasuk pada kriteria cukup baik, namun dalam dimensi hubungan partisipan menjadi item dengan persentase terendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga pendatang kurang bersosialisasi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat sehingga warga pendatang jarang ikut berpartisipasi. Peneliti pun menduga kurangnya warga pendatang turut berpartisipasi karena mereka menganggap bukan bagian dari masyarakat setempat sehingga mereka menunggu ajakan atau undangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **4.3.2.5 Dimensi Tahap-Tahap Perkembangan Organisasi dalam Kaitannya dengan Partisipasi**

Untuk mengetahui kondisi dimensi tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-

masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.21**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Pengawasan (*Controlling*)**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
75	Perencanaan yang dimulai dari pencarian gagasan dan ide tentang fenomena masalah yang ada di lingkungan serta menentukan rencana strategis	286	75.26	Baik
76	Menentukan pimpman atau perwakilan yang berminat dalam proses partisipasi di lingkungan	294	77.37	Baik
77	Warga masyarakat lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan daripada tahap permulaan	270	71.05	Baik
78	Partisipasi warga masyarakat dipandang sebagai tujuan pembangunan masyarakat	294	77.37	Baik
79	Partisipasi harus dilakukan secara terus menerus	273	71.84	Baik
80	Untuk kesinambungan partisipasi semua pimpinan masyarakat secara terbuka diundang untuk diskusi mengenai pembangunan masyarakat	297	78.16	Baik
Jumlah			451.05	
Rata-rata			75.18	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Pada tabel 4.21 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi memberikan penilaiannya adalah **baik** dengan persentase sebesar 75,18% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tahap-tahap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan partisipasi tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 80 yaitu Untuk kesinambungan partisipasi semua pimpinan masyarakat secara terbuka diundang

untuk diskusi mengenai pembangunan masyarakat, dengan persentase sebesar 78,16% dan termasuk kriteria baik.

Hal ini menunjukkan agar kesinambungan partisipasi dapat terpelihara dengan baik sebaiknya pimpinan atau tokoh masyarakat diundang untuk diskusi mengenai pembangunan dengan pihak pemerintahan desa dan masyarakat umum sehingga semua dapat mengetahui program pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 77 yaitu Warga masyarakat lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan daripada tahap permulaan, dengan persentase sebesar 71.05% dan berada pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada proses perencanaan tidak dilibatkan partisipasi anggota masyarakat padahal pada tahap perencanaan dapat menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan dalam pembangunan desa.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa keterlibatan anggota masyarakat dilibatkan tetapi dengan jumlah yang terbatas, pada proses perencanaan pemerintah desa mengundang tokoh-tokoh dan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bersangkutan dengan pembangunan desa.

#### **4.3.3 Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa**

Untuk mengetahui kondisi variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket

yang terdiri dari 28 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.

Hasil pengolahan data terhadap 28 pernyataan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Kriteria Penilaian**  
**Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
81	Prosentase aparat desa yang mengetahui rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa	306	80.53	Baik
82	Prosentase aparat desa yang memahami rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa	310	81.58	Baik
83	Prosentase aparat desa yang mengetahui secara umum tujuan dari program pembangunan desa	299	78.68	Baik
84	Prosentase aparat desa yang memahami secara umum pelaksanaan program pembangunan desa	294	77.37	Baik
85	Prosentase aparat desa yang mengetahui tentang kejelasan strategi pelaksanaan program pembangunan desa	299	78.68	Baik
86	Prosentase aparat desa yang memahami kejelasan strategi tentang prosedur pelaksanaan program pembangunan desa	262	68.95	Baik
87	Prosentase ketepatan strategi yang disusun pada program pembangunan desa	266	70.00	Baik
88	Prosentase pemahaman aparat desa terhadap ketepatan strategi dalam melaksanakan program pembangunan desa	269	70.79	Baik
89	Prosentase pencapaian tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas	308	81.05	Baik
90	Prosentase pembagian tugas dipengaruhi oleh kualitas aparat desa	309	81.32	Baik
91	Prosentase kejelasan tanggung jawab aparat desa mempengaruhi kualitas rencana pelaksanaan program pembangunan desa	303	79.74	Baik
92	Prosentase kualitas tujuan pelaksanaan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan tanggung jawab aparat desa	299	78.68	Baik
93	Prosentase kesesuaian program pembangunan desa dengan aturan yang berlaku	307	80.79	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
94	Presentase kepatuhan dalam melaksanakan perencanaan program yang telah ditetapkan	292	76.84	Baik
95	Presentase kualitas tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh fasilitas atau sumber daya yang dimiliki	287	75.53	Baik
96	Presentase kelayakan fasilitas atau sumber daya dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan rencana program pembangunan desa	299	78.68	Baik
97	Presentase pelaksanaan program pembangunan desa diawasi oleh instansi yang berwenang	295	77.63	Baik
98	Presentase hasil pengawasan tentang kesesuaian antara realisasi dengan perencanaan program pembangunan desa	292	76.84	Baik
99	Presentase Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa	295	77.63	Baik
100	Presentase evaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran terhadap pelaksanaan program pembangunan desa	301	79.21	Baik
101	Presentase kesesuaian target dengan rencana program pembangunan desa yang dapat direalisasikan	275	72.37	Baik
102	Presentase pencapaian tujuan dengan target pelaksanaan program pembangunan desa	268	70.53	Baik
103	Presentase pelaksanaan program pembangunan desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	295	77.63	Baik
104	Presentase ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan desa sesuai rencana yang telah ditetapkan	306	80.53	Baik
105	Presentase tingkat manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa	262	68.95	Baik
106	Presentase tingkat manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa	262	68.95	Baik
107	Presentase tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan desa	278	73.16	Baik
108	Presentase tingkat kepuasan masyarakat desa sesuai dengan partisipasinya dalam program pembangunan desa	309	81.32	Baik
Jumlah			2143.95	
Rata-Rata			76.57	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.22, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase jawaban responden pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa adalah **baik** yaitu sebesar 76,57% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut.

Berdasarkan jawaban responden pada variabel tersebut, secara umum Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa tersebut dianggap sudah baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item butir 82 yaitu Prosentase aparat desa yang memahami rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa, sebesar 81,58%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item butir 86 yaitu Prosentase aparat desa yang memahami kejelasan strategi tentang prosedur pelaksanaan program pembangunan desa, sebesar 66,46%.

Untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi yang mengukur variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut:

#### 4.3.3.1 Dimensi Keterbukaan Kebijakan Dasar

Untuk mengetahui kondisi dimensi keterbukaan kebijakan dasar, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data ke-6 pernyataan tersebut, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Keterbukaan Kebijakan Dasar**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
81	Prosentase aparat desa yang mengetahui rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa	306	80.53	Baik
82	Prosentase aparat desa yang memahami rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa	310	81.58	Baik
83	Prosentase aparat desa yang mengetahui secara umum tujuan dari program pembangunan desa	299	78.68	Baik
84	Prosentase aparat desa yang memahami secara umum pelaksanaan program pembangunan desa	294	77.37	Baik
Jumlah			318.16	
Rata-rata			79.54	



Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi keterbukaan kebijakan dasar, kategori penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata persentase sebesar 79,54% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi keterbukaan kebijakan dasar, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 82 yaitu Prosentase aparat desa yang memahami rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa, dengan persentase sebesar 81,58% dan termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa sudah mengetahui dan memahami rencana pelaksanaan program pembangunan desa. Hasil wawancara pun menyatakan bahwa Kepala Desa memberikan informasi dan pengarahan terkait program pembangunan desa tersebut, dan membuat tim agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Sedangkan penilaian terendah pada item butir 84 yaitu Prosentase aparat desa yang memahami secara umum pelaksanaan program pembangunan desa, dengan persentase sebesar 77,37% dan termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan aparat desa belum sepenuhnya memahami secara umum pelaksanaan program pembangunan desa. Peneliti menduga, aparat desa hanya mengetahui rencana program saja belum sampai pada tahapan perencanaan dan tahapan lainnya.

#### **4.3.3.2 Dimensi Strategi**

Untuk mengetahui kondisi dimensi strategi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang dilengkapi 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.24**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Strategi**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
85	Prosentase aparat desa yang mengetahui tentang kejelasan strategi pelaksanaan program pembangunan desa	299	78.68	Baik
86	Prosentase aparat desa yang memahami kejelasan strategi tentang prosedur pelaksanaan program pembangunan desa	262	68.95	Baik
87	Prosentase ketepatan strategi yang disusun pada program pembangunan desa	266	70.00	Baik
88	Prosentase pemahaman aparat desa terhadap ketepatan strategi dalam melaksanakan program pembangunan desa	269	70.79	Baik
Jumlah			288.42	
Rata-rata			72.11	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.24 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi strategi, kriteria penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata persentase sebesar 72,11% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tersebut, secara umum dimensi strategi yang dilakukan oleh para responden dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 85 yaitu Prosentase aparat desa yang mengetahui tentang kejelasan strategi pelaksanaan program pembangunan desa, dengan persentase sebesar 78,68%. Hal ini menunjukkan

aparatus desa setelah dibentuk tim atau kelompok kerja lebih banyak yang mengetahui tentang kejelasan strategi pelaksanaan program pembangunan desa.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 86 yaitu Prosentase aparatus desa yang memahami kejelasan strategi tentang prosedur pelaksanaan program pembangunan desa, dengan persentase sebesar 68,95% dan termasuk kategori cukup baik.

Hal ini menunjukkan bahwa aparatus desa yang memahami kejelasan strategi program pembangunan desa masih sedikit dikarenakan masih dalam tahap perencanaan. Hasil wawancara menjelaskan bahwa secara umum semua aparatus desa mengetahui strategi program pembangunan desa, namun untuk memahaminya maka kewenangan kepala desa yang menentukannya.

#### 4.3.3.3 Dimensi Pengorganisasian

Untuk mengetahui kondisi dimensi pengorganisasian, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.25**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Pengorganisasian**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
89	Prosentase pencapaian tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas	308	81.05	Baik
90	Prosentase pembagian tugas dipengaruhi oleh kualitas aparatus desa	309	81.32	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
91	Prosentase kejelasan tanggung jawab aparat desa mempengaruhi kualitas rencana pelaksanaan program pembangunan desa	303	79.74	Baik
92	Prosentase kualitas tujuan pelaksanaan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan tanggung jawab aparat desa	299	78.68	Baik
Jumlah			320.79	
Rata-rata			80.20	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.25, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pengorganisasian, kriteria penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata persentase sebesar 80,20% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi pengorganisasian di atas, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 90 yaitu Prosentase pembagian tugas dipengaruhi oleh kualitas aparat desa, sebesar 81,32% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan porogram pembangunan desa maka pembagian tugas disesuaikan dengan kualitas aparat desa agar pelaksanaannya efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pengamatan peneliti pun melihat bahwa kepala desa berusaha melaksanakan program pembangunan desa dengan profesional oleh karena itu tim atau kelompok kerja pun dibentuk dengan kualitas SDM yang terbaik.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 92 yaitu Prosentase kualitas tujuan pelaksanaan program pembangunan desa dipengaruhi oleh kejelasan tanggung jawab aparat desa, dengan persentase sebesar 78,68% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa memang sangat penting kualitas

tujuan pelaksanaan program pembangunan desa disesuaikan dengan tanggung jawab aparat desa, namun pada pelaksanaannya lebih banyak ditangani oleh kepala desa dan sekretaris desa sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada mereka.

#### 4.3.3.4 Dimensi Pelaksanaan Sesuai Rencana

Untuk mengetahui kondisi dimensi pelaksanaan sesuai rencana, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.26**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Pelaksanaan Sesuai Rencana**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
93	Prosentase kesesuaian program pembangunan desa dengan aturan yang berlaku	307	80.79	Baik
94	Prosentase kepatuhan dalam melaksanakan perencanaan program yang telah ditetapkan	292	76.84	Baik
95	Prosentase kualitas tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh fasilitas atau sumber daya yang dimiliki	287	75.53	Baik
96	Prosentase kelayakan fasilitas atau sumber daya dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan rencana program pembangunan desa	299	78.68	Baik
97	Prosentase pelaksanaan program pembangunan desa diawasi oleh instansi yang berwenang	295	77.63	Baik
98	Prosentase hasil pengawasan tentang kesesuaian antara realisasi dengan perencanaan program pembangunan desa	292	76.84	Baik
99	Prosentase Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa	295	77.63	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
100	Prosentase evaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran terhadap pelaksanaan program pembangunan desa	301	79.21	Baik
Jumlah			623.16	
Rata-rata			77.89	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.26, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pelaksanaan sesuai rencana, kriteria penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata persentase sebesar 77,89% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi pelaksanaan sesuai rencana di atas, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 93 yaitu Prosentase kesesuaian program pembangunan desa dengan aturan yang berlaku, sebesar 80,79% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program pembagunan yang dibiayai dari berbagai sumber seperti APBDDes, ADD dan Dana Desa pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena merupakan dana masyarakat.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 95 yaitu Prosentase kualitas tujuan program pembangunan desa dipengaruhi oleh fasilitas atau sumber daya yang dimiliki, dengan persentase sebesar 75,53% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa memang kualitas tujuan pelaksanaan program pembangunan desa dipengaruhi oleh fasilitas dan sumber daya yang dimiliki, namun pada kenyataannya fasilitas dan sumber daya yang dimiliki pemerintahan desa terkesan seadanya bahkan kekurangan.

#### 4.3.3.5 Dimensi Target Hasil

Untuk mengetahui kondisi dimensi target hasil, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden.

Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.27**  
**Kriteria Penilaian Dimensi Target Hasil**

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
101	Prosentase kesesuaian target dengan rencana program pembangunan desa yang dapat direalisasikan	275	72.37	Baik
102	Prosentase pencapaian tujuan dengan target pelaksanaan program pembangunan desa	268	70.53	Baik
103	Prosentase pelaksanaan program pembangunan desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	295	77.63	Baik
104	Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan desa sesuai rencana yang telah ditetapkan	306	80.53	Baik
105	Prosentase tingkat manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa	262	68.95	Baik
106	Prosentase tingkat manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa	262	68.95	Baik
107	Prosentase tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan desa	278	73.16	Baik
108	Prosentase tingkat kepuasan masyarakat desa sesuai dengan partisipasinya dalam program pembangunan desa	309	81.32	Baik
Jumlah			593.42	
Rata-rata			74.18	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.27, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi target hasil, kriteria penilaiannya adalah **baik** dengan rata-rata persentase

sebesar 74,18% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi target hasil di atas, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik oleh responden.

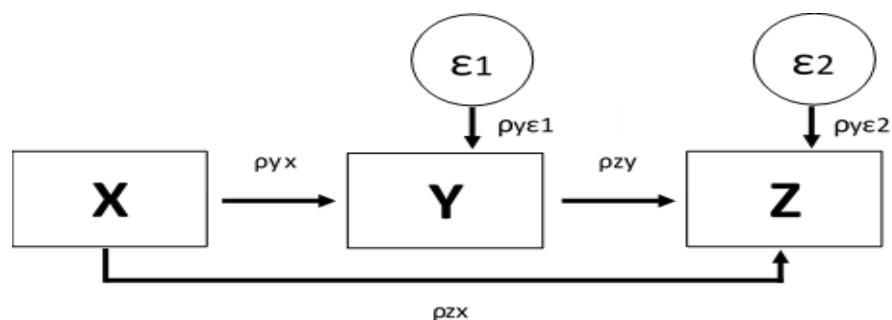
Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 108 yaitu Prosentase tingkat kepuasan masyarakat desa sesuai dengan partisipasinya dalam program pembangunan desa, sebesar 81,32% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat desa sesuai dengan partisipasinya dalam program pembangunan desa. Peneliti menduga bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan akan merasakan kepuasan karena mengetahui dari awal sampai selesai.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 105 yaitu Prosentase tingkat manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa, dan item nomor 106 yaitu Prosentase tingkat manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa, dengan persentase sebesar 68,95% dengan kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat manfaat dan keuntungan yang dirasakan masih rendah oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa, peneliti menduga rendahnya manfaat dan keuntungan tersebut disebabkan banyak faktor, diantaranya masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pembangunan berbeda merasakan hasil program pembangunan, atau sosialisasi informasi mengenai hasil program pembangunan desa belum sampai ke masyarakat.



#### 4.4 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan suatu pengujian dengan pendekatan statistik yaitu analisis jalur (*path analysis*) yang disusun dalam diagram berikut:



Gambar 4.1 Diagram Jalur

Dari diagram di atas, maka persamaan strukturalnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \rho_{yx} + \rho_{y\epsilon_1}$$

$$Z = \rho_{zx} + \rho_{yx} + \rho_{zy} + \rho_{z\epsilon_2}$$

Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur melalui tahapan:

1. Pengujian secara simultan, yaitu untuk menguji pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
2. Pengujian secara parsial, yaitu dimaksudkan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara masing-masing.

Selanjutnya, diuraikan hasil pengujian Hipotesis Utama dan Sub-sub Hipotesis, sebagai berikut:

#### 4.4.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X) Terhadap Partispasi Masyarakat (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partispasi Masyarakat dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partispasi Masyarakat dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.

Adapun untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1. Mendefinisikan Variabel:

Diketahui:

$$n = 76$$

$$k = 3$$

$$\alpha = 0,05$$

##### 2. Membuat Matriks Korelasi (R), dengan menggunakan persamaan:

$$R = \begin{bmatrix} r_{XX} & r_{YX} & r_{ZX} \\ & r_{YY} & r_{YZ} \\ & & r_{ZZ} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{\sum xy^2 - 1/n (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (x)^2][\sum y^2 - 1/n (y)^2]}}$$

$$\Gamma_{xz} = \frac{\sum xz^2 - 1/n (\sum x)(\sum z)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (x)^2][\sum z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

$$\Gamma_{yz} = \frac{\sum yz^2 - 1/n (\sum y)(\sum z)}{\sqrt{[\sum y^2 - 1/n (y)^2][\sum z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

Persamaan diatas dipergunakan untuk menghitung input data *Path Analysis*

(terlampir), maka diperoleh:

	X	Y	Z
X	1.0000	0.5056	0.6788
Y	0.5056	1.0000	0.6246
Z	0.6788	0.6246	1.0000

### 3. Membuat Matrik Invers Korelasi ( $R^{-1}$ ):

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{XX} & C_{YX} & C_{ZX} \\ & C_{YY} & C_{YZ} \\ & & C_{ZZ} \end{bmatrix}$$

	X	Y	Z
X		-	-
Y	1.8928	0.2533	1.1266
Z	0.2533	1.6736	0.8734
	1.1266	0.8734	2.3103

### 4. Menghitung Besarnya Pengaruh:

$$\rho_{ZX} = \frac{-C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZX} = -\frac{-1.1266}{2.3103} = 0.4877$$

$$\rho_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZY} = -\frac{-0.8734}{2.3103} = 0.3780$$

5. Menghitung Koefisien Determinasi Total:

$$R^2_{ZYX} = (\rho_{ZX} \cdot r_{ZX}) + (\rho_{ZY} \cdot r_{ZY})$$

$$R^2_{ZYX} = (0,4877 \times 0,6788) + (0,3780 \times 0,6246)$$

$$R^2_{ZYX} = 0,5671$$

$$R_{ZYX} = 0,7531$$

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7531. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara  $F_{\text{hitung}}$  dan  $F_{\text{tabel}}$ , dengan tahapan sebagai berikut:

Mencari  $F_{\text{hitung}}$ :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

$$F = \frac{(76-3-1) \cdot 0.5671}{3(1-0.5671)}$$

$$F = 31,4463$$

Menghitung  $F_{\text{tabel}} (\alpha, k, n - k - 1)$ :

$$F_{\text{tabel}} = 2,7318$$

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}}$  lebih besar dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  yaitu  $F_{\text{hitung}} = 31,4463 > F_{\text{tabel}} = 2,7318$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan

terhadap variabel Partisipasi Masyarakat dan variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.

Besarnya pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa ditunjukkan oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ( $R^2_{YZX}$ ) sebesar = 0,5671. Nilai tersebut diartikan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa sebesar 56,71%, sedangkan sisanya sebesar 43,29% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Kepemimpinan Kepala Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model.

$$\rho_{Z\epsilon}^2 = 1 - R_{ZYX}^2$$

$$\rho_{Z\epsilon}^2 = 1 - 0,5617$$

$$\rho_{Z\epsilon}^2 = 0,4329$$

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor mendengarkan, empati, menyembuhkan, kesadaran, persuasif, konseptualisasi, kemampuan meramalkan, kemampuan melayani, komitmen terhadap pekerjaan, dan membangun masyarakat dapat menentukan Partisipasi Masyarakat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Kecamatan Pameungpeuk di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa Kepala Desa beserta aparat desa berusaha menyampaikan informasi mengenai program pembangunan desa kepada masyarakat agar mendapat masukan dan saran bagi program pembangunan desa.

Penjelasan hasil pengujian diatas dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh secara nyata terhadap Partisipasi Masyarakat untuk mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Secara empiris hasil pengujian hipotesis ini memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Kepala Desa yang sesuai dengan prosedur dan keterlibatan partisipasi masyarakat telah memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat, terdapat faktor-faktor lain (epsilon) yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat sebesar 43,29% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa tersebut salah satunya adalah faktor sikap warga. Sikap warga masyarakat yang semakin individualis telah melunturkan budaya gotong-royong. Akibatnya tidak ada kepedulian dari warga masyarakat untuk membangun daerahnya secara bersama-sama.

#### **4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)**

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat.

$H_1$  : Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat.

Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur ( $\rho_{YX}$ ) sebesar 0,5056.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat., maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $t_{\text{hitung}}$  dan  $t_{\text{tabel}}$ . Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Mencari  $t_{\text{hitung}}$ :

$$t = \frac{\rho_{YX}}{\sqrt{\frac{1 - \rho_{YX}^2}{n - 2}}}$$

$$t = 5,0411$$

Menghitung  $t_{\text{tabel}}$  ( $\alpha, n - k - 1$ ):

$$t = 1,9935$$

Berdasarkan pengujian di atas, diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  yaitu  $t_{\text{hitung}} = 5,0411 > t_{\text{tabel}} = 1,9935$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Partisipasi Masyarakat. Adapun besar pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap variabel Partisipasi Masyarakat adalah sebesar 25,56% sedangkan sisanya sebesar 74,44% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui dari Matriks Korelasi:

$$R_{YX}^2 = 0,5056^2$$

$$R_{YX}^2 = 0,2556$$

Sehingga:

$$\rho_{Y\epsilon 1}^2 = 1 - R_{YX}^2$$

$$\rho_{Y\epsilon 1}^2 = 1 - 0,2556$$

$$\rho_{Y\epsilon 1}^2 = 0,7444$$

Hasil pengujian tersebut menguatkan dugaan bahwa faktor mendengarkan, empati, menyembuhkan, kesadaran, persuasif, konseptualisasi, kemampuan meramalkan, kemampuan melayani, komitmen terhadap pekerjaan, dan membangun masyarakat dapat menentukan Partisipasi Masyarakat..

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat, yaitu sebesar 25,66%, dengan nilai koefisien determinasi yang relatif kecil terhadap Partisipasi Masyarakat, menunjukkan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kepala Desa, diduga faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai salah satunya latar belakang pendidikan.

Selain faktor kepemimpinan Kepala Desa, variabel Partisipasi Masyarakat juga dipengaruhi faktor lain (epsilon). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain yang tidak diteliti relatif besar, yaitu sebesar 74,44%. Epsilon yang diduga turut mempengaruhi partisipasi adalah bahwa masyarakat sudah tidak ada kepedulian untuk mengetahui siapa yang menjadi pemimpin di wilayah mereka.



#### 4.4.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Partisipasi Masyarakat (Y) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur ( $\rho_{ZY}$ ) sebesar 0,3780.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa., maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $t_{\text{hitung}}$  dan  $t_{\text{tabel}}$ . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$ , yaitu  $t_{\text{hitung}} = 3,8706 > t_{\text{tabel}} = 1,9935$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Nilai tersebut di atas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZY} = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{ZY}^2)}}$$

$$t_{ZY} = 3,8076$$

Besar pengaruh variabel Partisipasi Masyarakat terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa secara langsung adalah sebesar 0,2361 atau sebesar 23,61% sedangkan sisanya sebesar 0,7639 atau sebesar 76,39% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Partisipasi Masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui bahwa:

$$r_{zy} = 0,6246 \text{ dan}$$

$$\rho_{zy} = 0,3780 \text{ maka:}$$

$$r_{zy} \cdot \rho_{zy} = 0,6246 \times 0,3780$$

$$r_{zy} \cdot \rho_{zy} = 0,2361 \text{ atau } 23,61\%$$

Dari hasil pengujian dan wawancara diketahui walaupun Partisipasi Masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu-satunya saja untuk meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa diduga juga adalah faktor efisiensi.

Hal ini senada seperti yang diutarakan oleh Flippo (dalam Iskandar, 2017: 334) bahwa untuk mengukur efektivitas juga digunakan indikator efisiensi yang sering diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan lebih banyak dengan tenaga kerja yang sama atau melaksanakan pekerjaan yang tetap dengan tenaga kerja kurang dari biasanya.

Kemudian hal sependapat dinyatakan oleh Makmur (2015:7), kriteria lainnya dalam melihat efektivitas salah satunya yaitu efisiensi. Kepala Desa

seyogyanya dalam menggunakan anggaran program pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sebanding bahkan lebih dengan anggaran yang sudah dikeluarkan. Dengan adanya efisiensi maka Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa pun dapat terwujud..

#### **4.4.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa (X) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Z)**

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur ( $P_{zx}$ ) sebesar 0,4877.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa., maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $t_{\text{hitung}}$  dan  $t_{\text{tabel}}$ . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  yaitu  $t_{\text{hitung}} = 5,4264 > t_{\text{tabel}} = 1,9935$ .

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas

Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Hal tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZX} = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

$$t_{ZX} = 5,4264$$

$$t_{\text{-tabel}} = (0,05:76-3-1) = 1,9935$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa secara langsung sebesar 0,2378 atau sebesar 23,78%, sedangkan pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa melalui Partisipasi Masyarakat adalah sebesar 0,0932 atau sebesar 9,32%, sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa sebesar 0,3310 atau sebesar 33,10% sedangkan sisanya sebesar 0,6690 atau sebesar 66,90% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Kepemimpinan Kepala Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

1. Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z:

Diketahui bahwa:

$$\rho_{ZX} = 0,4877, \text{ maka:}$$

$$\rho_{ZX} \cdot \rho_{ZX} = 0,4877 \times 0,4877$$

$$\rho_{ZX} \cdot \rho_{ZX} = 0,2378 \text{ atau } 23,78\%$$

2. Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z:

$$(\rho_{ZY})(r_{YZ})(\rho_{ZX}) = 0,3780 \times 0,6246 \times 0,4877$$

$$(\rho_{ZY})(r_{YZ})(\rho_{ZX}) = 0,0932 \text{ atau } 9,32\%$$

3. Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z:

$$(\rho_{ZY})^2 + (\rho_{ZY})(r_{YZ})(\rho_{ZX}) = 0,2378 + 0,0932$$

$$(\rho_{ZY})^2 + (\rho_{ZY})(r_{YZ})(\rho_{ZX}) = 0,3310 \text{ atau } 33,10\%$$

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa tersebut terjadi dikarenakan walaupun kepemimpinan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan baik adanya komitmen yang kuat, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Epsilon yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa adalah adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Tyson dan Jackson (dalam Iskandar, 2017: 340-341), yaitu efektivitas didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa adaptasi diukur dengan perubahan-perubahan dalam pangsa pasar dan laju perkembangan produk baru yang berhasil.

Membahas mengenai epsilon adaptasi yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, yaitu bahwa pembangunan dan pengembangan Desa saat ini mengalami perubahan yang signifikan melalui perubahan kebijakan terhadap Desa yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya. Dengan perubahan tersebut, maka

Pemerintah Desa perlu secepatnya beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut yang dapat dikatakan substantif agar program pembangunan desa berjalan efektif dan efisien.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada variabel Kepemimpinan Kepala Desa menunjukkan kriteria baik yang dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi mendengarkan, yaitu tentang pimpinan dalam memberikan informasi dan pengarahan melalui komunikasi yang baik dan jelas. Nilai terendah terdapat pada dimensi empati, yaitu pimpinan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik.
2. Pada variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan kriteria baik yang dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi tipe-tipe partisipan yaitu tentang mereka yang ahli di bidang pembangunan masyarakat seperti pekerja sosial masyarakat. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi tipe-tipe partisipasi yaitu masyarakat yang melakukan partisipasi memiliki pengalaman berorganisasi.
3. Pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa menunjukkan kriteria baik yang dibuktikan dengan rata-rata jawaban

responden mengenai variabel tersebut. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi keterbukaan kebijakan dasar yaitu tentang prosentase aparat desa yang memahami rencana mengenai pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi adaptasi yaitu tentang prosentase aparat desa yang memahami kejelasan strategi tentang prosedur pelaksanaan program pembangunan desa.

4. Kepemimpinan Kepala Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa dengan nilai koefisien determinasi sebesar 56,71% dan nilai epsilon sebesar 43,29%, artinya pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa relatif besar terhadap Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.
5. Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 25,56% dan nilai epsilon sebesar 74,44%, artinya pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Partisipasi Masyarakat .
6. Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa dengan nilai koefisien determinasi sebesar 23,61% dan nilai epsilon sebesar 76,39%, artinya Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa
7. Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan secara langsung dan tidak langsung terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa



dengan nilai koefisien determinasi sebesar 33,10% dan nilai epsilon sebesar 66,90%, artinya Kepemimpinan Kepala Desa memiliki pengaruh cukup besar terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.

Selanjutnya, terdapat temuan-temuan permasalahan penting yang terdapat dalam penelitian. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Kepemimpinan Kepala Desa ditemukan permasalahan berkaitan dengan Kepemimpinan antara lain; a) masalah interaksi dengan masyarakat, b) pemahaman terhadap kesulitan dan masalah bawahan, c) memberikan inspirasi bagi bawahannya agar selalu bekerja dengan baik belum maksimal, d) introspeksi diri belum optimal, e) kemampuan membujuk agar bawahannya dapat bekerja sama belum optimal, f) sikap pimpinan kurang sesuai dengan azas kepatutan dan azas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan g) memfasilitasi bawahan berkaitan pelaksanaan program belum optimal.
2. Pada variabel Partisipasi Masyarakat ditemukan permasalahan berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat, antara lain; a) masyarakat belum optimal mendalami permasalahan berkaitan dengan latar belakang pendidikan, b) masyarakat kurang memiliki pengalaman berorganisasi, c) kader pemimpin lokal atau tokoh masyarakat masih kurang, d) warga pendatang kurang optimal bekerja sama dengan masyarakat setempat, dan e) peran warga masyarakat lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan.
3. Pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa ditemukan permasalahan berkaitan dengan efektivitas tindakan, antara lain; a) tingkat pemahaman aparat desa tentang pelaksanaan program pembangunan desa,

kejelasan strategi dan prosedur pelaksanaan program pembangunan relatif rendah, b) kejelasan tanggung jawab aparat desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa belum spesifik, c) tingkat kelengkapan fasilitas atau sumber daya belum optimal, dan d) tingkat manfaat dan keuntungan hasil program pembangunan desa belum maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi hasil penelitian dan temuan permasalahan penting lainnya terhadap objek atau fenomena masalah penelitian, yaitu walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel mengindikasikan hasil yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan pada item jawaban responden sebagaimana temuan-temuan masalah tersebut di atas yang pada gilirannya akan mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

## **5.2 Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan permasalahan pada Kepemimpinan Kepala Desa, dengan kecenderungan kurang bersosialisasi, kurang memahami bawahannya, kurang memberikan inspirasi, kurang dapat mengintrospeksi diri apabila melakukan kekeliruan dalam pekerjaannya, kurang memiliki kemampuan membujuk, sikap yang kurang sesuai dengan azas kepatutan dan azas kepatuhan maka disarankan kepada Kepala Desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa harus melakukan evaluasi diri atau inspeksi diri dan mau mendengarkan keluhan bawahan dan masyarakat sebagai bagian proses perbaikan menjadi lebih baik.
  - b. Berusaha merangkul bawahan dan masyarakat tanpa membeda-bedakan status mereka dan berinteraksi secara langsung menggunakan kesempatan yang ada.
  - c. Kepala Desa hendaknya berupaya menjadikan dirinya sebagai individu yang dapat diteladani sehingga menjadi inspirasi bagi bawahannya baik dari sikap dan perilaku maupun profesionalisme dalam bekerja.
  - d. Kepala Desa harus bertindak adil kepada bawahan dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan dalam melayani kepentingan publik.
  - e. Kepala Desa hendaknya berusaha membantu dan memfasilitasi bawahannya dalam proses pelaksanaan program sehingga hasilnya pun akan memberi nilai yang baik bagi Kepala Desa.
2. Berdasarkan temuan permasalahan pada Partisipasi Masyarakat, dimana terlihat kecenderungan sikap masyarakat yang tidak ada kepedulian terhadap kebijakan kepala desa, warga pendatang yang kurang bersosialisasi, masih rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat yang berpartisipasi, maka diperlukan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:
- a. Walaupun kurang memiliki latar belakang pendidikan untuk mendalami permasalahan, hendaknya masyarakat mencari data dan informasi terkini yang dapat dipercaya minimal melalui Ketua RT-nya.
  - b. Diperlukan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa atau instansi yang terkait untuk meningkatkan pengalamannya dalam

berorganisasi sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

- c. Diperlukan proses pengkaderan kepemimpinan kepada masyarakat baik melalui organisasi formal ataupun informal melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya oleh Badan Permusyarahan Desa atau tokoh-tokoh masyarakat
  - d. Melakukan tindakan aktif dan persuasif kepada masyarakat, seperti mendatangi golongan profesional dan mengundangnya untuk berperan serta, dan mengajak warga pendatang sebagai undangan untuk meleburkan diri dalam kegiatan masyarakat.
  - e. Perlunya pembinaan dari pemerintah desa atau yang berwenang mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, supaya rasa memiliki yang tinggi terhadap hasil pembangunan.
3. Berdasarkan temuan permasalahan pada Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, dengan kecenderungan berkaitan dengan aparat desa dimana masih rendahnya tingkat pemahaman aparat desa tentang rencana dan kejelasan strategi dan prosedur pelaksanaan program pembangunan desa, rendahnya tingkat kelengkapan fasilitas atau sumber daya yang dimiliki, dan rendahnya tingkat manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa terhadap hasil program pembangunan desa. Secara teknis langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:
- a. Kepala Desa mengkomunikasikan pelaksanaan program pembangunan desa melalui berbagai cara sosialisasi kepada aparat desa seperti pertemuan/rapat koordinasi secara rutin tentang pelaksanaan dan strategi program pembangunan desa

- b. Kepala Desa selalu mengingatkan tugas pokok dan tanggungjawab para aparat desa agar dalam program pembangunan desa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sehingga dapat meningkatkan kualitas tujuan dari program tersebut.
  - c. Diperlukan pelatihan dan pembinaan aparat desa tentang perencanaan pembangunan desa sehingga memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu kepala desa melaksanakan program pembangunannya.
  - d. Pemerintahan Desa melakukan penganggaran dan pengajuan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana serta sumber daya yang lain kepada instansi di atasnya untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan desa.
  - e. Dimasa mendatang pemerintahan desa dalam melaksanakan program pembangunan desa harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
4. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, berkaitan dengan beberapa temuan permasalahan pada penelitian serta adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada masa yang akan datang dapat melakukan penelitian lebih lanjut selain dari variabel-variabel penelitian ini. Variabel penelitian lanjutan yang disarankan antara lain tentang efisiensi, koordinasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui penelitian yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-BUKU TEKS

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agusta, Ivanovich. 2014. *Paradigma Metodologi Ilmu Sosial: Simpang Jalan Konstruksi Teori*. IPB Press. Bogor.
- Anggarini, Yunita dan Puranto B. Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta,
- Badeni. 2013. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Echols, Jhon dan Shadily Hassan. 2014. *Kamus Indonesia Inggris*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handoko, Hani. 2010. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Edisi Kedua. BPFE UGM Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Iskandar. Jusman. 2017a. *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*. Edisi Keempat. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017b. *Bunga Rampai Administrasi Negara*. Edisi Keempat. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017c. *Dinamika Kelompok. Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017d. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Keempat. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017e. *Manajemen Publik*. Edisi Kelima. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017f. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Keenam. Puspaga. Bandung
- \_\_\_\_\_. 2017g. *Teori Administrasi*. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017h. *Teori Sosial*. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017i. *Teori dan Isu Pembangunan*. Puspaga. Bandung.
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Makmur. 2105. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Poerwadarmanta, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung. Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Mulyadi, Deddy. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, Agus. 2014. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Tiara. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algesindo Offset. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sadriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Supriatna, Mamat. 2011. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo. Jakarta.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. Jakarta.

## **II. JURNAL, ARTIKEL DAN PENELITIAN ILMIAH**

- Ajang, Marselinus. 2015. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*. e-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 4, p. 1871-1884.

- Djaenuri, M. Aries. 2015. *Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.  
(<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82634>)
- Fahri, Lutfhi Nur. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01. p.75-88.
- Maulid. 2015. *Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi di Desa Puuosu Kabupaten Kolaka)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas 19 November Kolaka. (<https://jurnalilmuadministrasinegara.wordpress.com/2015/09/21>).
- Meitaningrum, Dhita Ayu, dkk. 2013. *Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.3, pp. 192-199.
- Pangalila, Gredy, dkk. 2011. *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kembuan, Kembuan Satu, dan Desa Tonsea di Kecamatan Tondano Utara*. Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Setiawaty, Tuneka., dkk. 2015. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Penelitian di Desa jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)*. Tesis Pascasarjana Sosiologi. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

### **III. DOKUMEN-DOKUMEN**

- BPS Kabupaten Garut. 2016. *Garut dalam Angka Tahun 2016*. Kabupaten Garut Kantor Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. 2017. *Profil Kecamatan Pameungpeuk*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas



Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa.